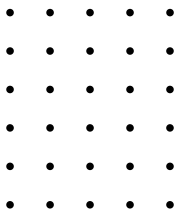


AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 2



**Renika Hasibuan
Richad Alamsyah
Nurchayati
Parju**

**Nita Andriyani Budiman
Rr. Supratinigrum
Novia Rizki
Yenny Wati
Paradisa Sukma
Daniel Kartika Adhi
Men Wih Widiatno**



AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 2

**Renika Hasibuan
Richad Alamsyah
Nurchayati
Parju
Nita Andriyani Budiman
Rr. Suprantiningrum
Novia Rizki
Yenny Wati
Paradisa Sukma
Daniel Kartika Adhi
Men Wih Widiatno**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 2

Penulis :

Renika Hasibuan
Richad Alamsyah
Nurchayati
Parju
Nita Andriyani Budiman
Rr. Suprantiningrum
Novia Rizki
Yenny Wati
Paradisa Sukma
Daniel Kartika Adhi
Men Wih Widiatno

ISBN : 978-623-198-082-3

Editor : Diana Purnama Sari. M.E

Penyunting : Ari Yanto. M.Pd.

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah
Padang Sumatera Barat
Website : www.globeleksekutifteknologi.co.id
Email : globeleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, 16 Februari 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Manajemen Syariah ini.

Buku Ini Membahas

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, 16 Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 KERANGKA DASAR PENYUSUNAN LAPORAN	
KEUANGAN	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Kerangka Konseptual Penyajian Laporan Keuangan.....	2
1.3 Standar Akuntansi Keuangan	11
1.3.1 PSAK-IFRS (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan- <i>International Financial Reporting</i> <i>Standard</i>)	13
1.3.2 SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntansi Publik)	14
1.3.3 PSAK-EMKM (Entitas Mikro, Kecil dan Menengah)	15
1.3.4 PSAK-Syariah (Pernyataan Standar Akuntansi Syariah).....	15
1.3.4 SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).....	16
DAFTAR PUSTAKA.....	17
BAB 2 KONSEP TEORITIS DAN PERHITUNGAN	
DAN METODE PENCATATAN INCOME TAXES DAN	
DEFERRED TAXES	19
2.1 Pendahuluan.....	19
2.2 Pengertian Akuntansi Pajak Tangguhan	20
2.3 Aset Pajak yang Ditangguhkan (<i>Deferred Tax Assets</i>).....	21
2.4 Perbedaan Sementara dan Tetap	23
2.4.1 Perbedaan Sementara	24
2.4.2 Perbedaan Tetap.....	25
2.5 Penerapan dalam Pelaporan Keuangan	26
DAFTAR PUSTAKA.....	28

BAB 3 AKUNTANSI UNTUK EKUITAS	29
3.1 Pengertian Ekuitas	29
3.2 Modal Disetor	30
3.3 Saldo Laba	30
3.4 Penghasilan Komprehensif lainnya.....	31
3.5 Saham Biasa	31
3.5.1 Penerbitan dengan nilai nominal.....	32
3.5.2 Penerbitan tanpa nilai nominal.....	33
3.5.3 Penerbitan dengan sekuritas lain	34
3.5.4 Penerbitan Saham Non-Tunai.....	36
3.5.5 Biaya Penerbitan Saham	38
3.6 Saham Preferen.....	38
3.7 Analisis Laporan Keuangan	43
DAFTAR PUSTAKA.....	44
BAB 4 AKUNTANSI SEKURITAS DILUTIF RENCANA KOMPENSASI DAN LABA PERSAHAM	45
4.1 Pengertian Sekuritas Dilutif.....	45
4.2 Jenis -Jenis Sekuritas Dilutif.....	46
4.3 Program Kompensasi Berbasis Saham	61
4.4 Perhitungan EPS.....	63
BAB 5 AKUNTANSI UNTUK PAJAK PENGHASILAN.....	70
5.1 Pajak Penghasilan.....	70
5.2 Perbedaan Permanen dan Perbedaan Temporer.....	71
5.3 Perhitungan Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan.....	73
5.4 Ilustrasi Komprehensif Pajak Tangguhan	76
5.5 Perlakuan Akuntansi Pajak Tangguhan.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	82
BAB 6 AKUNTANSI UNTUK PENSIUN DAN MANFAAT PURNAKARYA	83
6.1 Pendahuluan.....	83
6.2 Pengertian Program Pensiun (<i>Pension Pland</i>).....	84
6.3 Pengertian Dana Pensiun (<i>Pension Fund</i>).....	84
6.4 Landasan Hukum Operasional Dana Pensiun.....	85

6.5 Tujuan Umum Program Pensiun	86
6.6 Tujuan Menyelenggarakan Dana Pensiun.....	86
6.7 Tipe Program Pensiun	87
6.8 Fungsi Program Pensiun	91
6.9 Klasifikasi Dana Pensiun.....	91
6.10 Jenis-jenis Pensiun	95
6.11 Asas dan Norma Dana Pensiun.....	95
6.12 Akuntansi Dana Pensiun.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	102
BAB 7 AKUNTANSI UNTUK LEASE	105
7.1 Pengertian.....	105
7.2 Akuntansi Lessee	107
7.3 Akuntansi Lessor.....	110
7.4 Contoh Soal Sewa Pembiayaan	111
7.5 Sales and Lease Back (Jual dan Sewa Balik)	115
DAFTAR PUSTAKA.....	116
BAB 8 AKUNTANSI UNTUK PERUBAHAN	
DAN ANALISIS KESALAHAN	117
8.1 Perubahan Akuntansi.....	117
8.2 Perubahan Prinsip Akuntansi.....	118
8.3 Perubahan Estimasi Akuntansi.....	123
8.4 Perubahan Entitas Pelaporan.....	124
8.5 Analisis dan Koreksi Kesalahan.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....	129
BAB 9 AKUNTANSI UNTUK PELAPORAN ALIRAN KAS... 131	
9.1 Pendahuluan.....	131
9.2 Kegunaan Laporan Arus Kas (Tujuan)	131
9.3 Klasifikasi Laporan Arus Kas.....	133
9.4 Kas dan Setara Kas	135
9.5 Sumber Data Laporan Arus Kas	136
9.6 Format Laporan Arus Kas.....	137
9.6.1 Aktivitas Operasi.....	137
9.6.2 Aktivitas Investasi.....	140

9.6.3 Aktivitas Pendanaan.....	141
9.7 Contoh Kasus Laporan Arus Kas.....	141
9.7.1 Kasus Laporan Arus Kas PT Makmur Jaya	141
9.7.2 Penyelesaian Laporan Arus Kas Menggunakan Metode Langsung.....	143
9.7.3 Penyelesaian Laporan Arus Kas Menggunakan Metode Tidak Langsung.....	144
DAFTAR PUSTAKA.....	146
BAB 10 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PADA PELAPORAN KEUANGAN.....	147
10.1 Pendahuluan.....	147
10.2 Penyajian Laporan Keuangan.....	149
10.3 Pengungkapan pada Laporan Keuangan	155
DAFTAR PUSTAKA.....	159
BAB 11 METODE PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN PIRANTI LUNAK.....	161
11.1 Pendahuluan.....	161
11.2 Pembahasan.....	164
11.2.1 Sistem Akuntansi.....	164
11.2.2 Metode Penyusunan Laporan Keuangan	169
11.2.3 Laporan Keuangan	173
11.2.4 Unsur-Unsur Penyusun Laporan Keuangan.....	175
11.2.5 Komputerisasi Sistem Akuntansi.....	177
11.3 Kesimpulan.....	183
DAFTAR PUSTAKA.....	185
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Perbedaan Sementara Dan Aktiva Pajak Tangguhan PT. Selalu Ceria	22
Tabel 2.2 : Aktiva Pajak Tangguhan Pt. Selalu Ceria Tahun 2020 Dan 2021	23
Tabel 6.1 : Beda PPMP dan PPIP	89
Tabel 9.1 : Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Kas	134
Tabel 9.2 : Deskripsi Kas dan Setara Kas	136
Tabel 9.3 : Klasifikasi Laporan Posisi Keuangan	150

BAB 1

KERANGKA DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Oleh Renika Hasibuan

1.1 Pendahuluan

Secara umum laporan keuangan menggambarkan posisi keuangan, arus kas dan hasil dari usaha dan perubahan ekuitas perusahaan dalam periode tertentu. Sebagai titik awal dari proses akuntansi, sebuah perusahaan mengidentifikasi peristiwa-peristiwa ekonomi yang relevan untuk bisnisnya. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari akuntansi yang berisi serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis yang digunakan sebagai alat komunikasi mengenai aktivitas perusahaan kepada pemilik, manajemen, kreditur, investor, karyawan, dan pihak lainnya. Menurut Martani, Dwi,dkk (2012) Akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. Akuntansi merangkum transaksi yang terjadi dari sebuah entitas, kemudian memproses dan menyajikannya dalam bentuk laporan yang diberikan kepada para pengguna laporan keuangan,

Akuntansi menurut *American Institute of certified Public Accounting (AICPA)* dalam Ahmed Riahi Balkaoui (2000), mendefinisikan akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil tersebut. Menurut Kieso, et al. (2021) karakteristik penting akuntansi adalah Identifikasi, pengukuran,

dan komunikasi informasi keuangan mengenai entitas ekonomi kepada pihak yang berkepentingan.

Secara umum terdapat tiga aktivitas dalam akuntansi, yaitu sebagai berikut :

1. Aktivitas identifikasi transaksi (*identifying*). Dalam aktivitas ini dilakukan identifikasi terhadap transaksi yang terjadi dalam suatu entitas. Dalam proses ini akan dapat diklasifikasi apakah suatu transaksi merupakan transaksi merupakan transaksi ekonomi/keuangan atau non ekonomi.
2. Aktivitas pencatatan (*recording*). Dalam aktivitas ini semua transaksi ekonomi yang telah diidentifikasi pada tahap pertama akan dicatat secara kronologis dan sistematis dengan ukuran nilai moneter tertentu.
3. Aktivitas komunikasi (*communicating*). Dalam aktivitas ini akan dilakukan pelaporan dan distribusi terhadap informasi akuntansi berupa laporan keuangan kepada para pemakai laporan keuangan.

1.2 Kerangka Konseptual Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang disebut siklus akuntansi. Laporan keuangan menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan selama satu periode. Selain itu, laporan keuangan juga menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang ditunjukkan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan.

Menurut Kieso, *et al.* (2021) mendefenisikan akuntansi keuangan (*financial accounting*) adalah proses yang memuncak dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk digunakan oleh pihak internal dan eksternal. Sebaliknya, akuntansi manajerial (*managerial accounting*) adalah proses mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, dan mengomunikasikan

informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk merencanakan, mengendalikan dan mengevaluasi operasi perusahaan.

Menurut Rudianto (2012) dilihat dari siapa pemakai atau pengguna laporan keuangan perusahaan, akuntansi dibagi menjadi dua yaitu :

1. Akuntansi keuangan adalah sistem akuntansi yang pemakai informasinya adalah pihak eksternal organisasi perusahaan, seperti kreditor, pemerintah, pemegang saham, investor dan sebagainya.
2. Akuntansi Manajemen adalah sistem akuntansi yang pemakai informasinya adalah pihak internal organisasi perusahaan seperti, manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran, dan sebagainya. Akuntansi manajemen berguna sebagai alat bantu pengambilan keputusan.

Secara umum, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dan siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Tujuan laporan keuangan adalah untuk :

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal perusahaan.
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi perusahaan yang timbul dalam aktivitas usaha demi memperoleh laba,
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan untuk mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba di masa depan.

4. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan keuangan ketika mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
5. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi tentang aktivitas pembiayaan dan investasi.
6. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.

Kebutuhan terhadap informasi yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan tidak hanya muncul dari pihak eksternal perusahaan seperti kreditor, *supplier*, pemerintah atau calon investor, tetapi juga muncul dari pihak organisasi. Pihak manajemen akan membutuhkan informasi keuangan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang dilakukan perusahaan, seperti jumlah beban bahan baku yang dikeluarkan, beban tenaga kerja selama suatu periode, beban *overhead* pada periode terkait, atau beban produksi dalam satu tahun.

Selain sebagai alat pertanggungjawaban, informasi keuangan diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Pengambilan keputusan ekonomi adalah keputusan yang dilakukan secara sadar untuk menetapkan sesuatu atas dasar data dalam bidang bisnis. Menurut Kieso, et al. (2021) terdapat dua kelompok besar dari pengguna informasi keuangan yaitu :

1. Para Pengguna Internal

Para pengguna internal informasi adalah para manajer yang merencanakan, mengorganisasikan, dan menjalankan perusahaan.

2. Para Pengguna Eksternal

Para pengguna eksternal adalah orang-orang atau organisasi diluar perusahaan yang menginginkan informasi keuangan tentang perusahaan.

Pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan dan berhubungan dengan perusahaan adalah :

1. Kreditor, yaitu orang atau perusahaan yang memberikan pinjaman dana kepada perusahaan untuk berbagai keperluan usaha. Sebagai pihak yang memberikan pinjaman dana kepada perusahaan kreditor membutuhkan informasi untuk menjamin bahwa uang yang dipinjamkannya akan dibayar beserta bunganya. Karena itu, informasi yang diperlukan mencakup:
 - a. Besarnya kekayaan perusahaan
 - b. Kemampuan menghasilkan laba usaha
 - c. Perbandingan utang dan total kekayaan perusahaan
2. Pemerintah, yaitu lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan usaha dan hal-hal yang terkait dengannya. Sebagai pihak yang memungut pajak penghasilan kepada perusahaan, informasi utama yang diperlukan pemerintah mencakup:
 - a. Laba usaha yang diperoleh
 - b. Beban yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan
3. Calon Investor, yaitu orang-orang atau lembaga yang akan menanamkan uangnya dalam suatu perusahaan dimasa mendatang. Sebagai pihak yang akan menanamkan uangnya dalam perusahaan, calon investor harus memiliki keyakinan bahwa perusahaan tersebut dapat memberikan pengembalian yang memadai dalam jangka panjang. Karena itu, informasi yang diperlukan investor mencakup:

- a. Laba usaha yang diperoleh dalam beberapa tahun terakhir
 - b. Pertumbuhan kekayaan perusahaan
4. Pemasok (*supplier*) yaitu orang atau perusahaan yang menjual berbagai barang kepada perusahaan, mulai dari peralatan kantor, mesin, kendaraan hingga bahan baku usaha. Sebagai pihak penjual barang secara kredit kepada perusahaan, pemasok harus memiliki keyakinan bahwa kredit yang diberikannya kepada perusahaan akan dapat dibayar sesuai kesepakatan. Karena itu, informasi yang diperlukan mencakup :
- a. Besarnya kekayaan perusahaan
 - b. Kemampuan menghasilkan laba usaha
 - c. Perbandingan utang dan total kekayaan perusahaan
5. Pemilik/pemegang saham yaitu orang atau lembaga yang telah menanamkan uang atau kekayaannya pada perusahaan. Sebagai pihak yang telah menanamkan uangnya dalam perusahaan, pemilik perusahaan harus memperoleh imbalan atas kekayaan yang telah ditanamkannya tersebut. Imbalan dapat berupa pembagian atas sebagian atau seluruh laba usaha yang telah diperoleh perusahaan. Karena itu informasi utama yang diperlukan adalah :
- a. Laba usaha yang diperoleh
 - b. Perubahan kekayaan perusahaan dalam beberapa tahun
6. Manajer Produksi yaitu orang yang bertanggungjawab terhadap keseluruhan proses menghasilkan produk dalam suatu perusahaan. Sebagai pihak internal perusahaan yang bertanggungjawab terhadap proses produksi, manajer produksi memerlukan informasi tentang keseluruhan biaya

maupun rincian biaya yang diperlukan untuk menghasilkan produk perusahaan,

7. Manajer Pemasaran, yaitu orang yang bertanggungjawab terhadap keseluruhan proses pemasaran produk perusahaan mulai dari promosi, distribusi hingga pelayanan purna jual. Sebagai pihak internal perusahaan yang bertanggungjawab atas pemasaran produk perusahaan, manajer pemasaran memerlukan data biaya produksi dari setiap produknya guna menentukan harga jual produk tersebut dan rincian biaya pemasaran untuk mencari alternatif biaya pemasaran yang paling efisien bagi perusahaan tanpa mengabaikan efektivitas pemasarannya.
8. Berbagai pihak internal perusahaan lainnya yang memerlukan data dan informasi keuangan lain yang harus disediakan oleh akuntansi.

Laporan keuangan merupakan sarana utama untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak di luar perusahaan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Berikut penjelasannya :

1. Laporan Laba Rugi Komprehensif adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun. Secara umum laporan laba rugi terdiri dari unsur pendapatan dan unsur beban usaha.
2. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan hak residu atas asset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Secara umum laporan perubahan ekuitas milik perusahaan perseroan terbatas melibatkan unsur modal saham, laba usaha dan dividen.

Modal saham dan laba ditahan pada awal periode ditambah dengan penambahan modal saham dan laba usaha periode tersebut dikurangi dividen yang dibagikan kepada pemegang saham perusahaan akan menghasilkan ekuitas pada akhir periode.

3. Laporan Posisi Keuangan adalah daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh.
4. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan yang digunakan perusahaan selama satu periode akuntansi, beserta sumber-sumbernya. Secara umum semua aktivitas perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok aktivitas utama yang berkaitan dengan penyusunan laporan arus kas. Ketiga kelompok aktivitas tersebut yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.
5. Catatan atas laporan keuangan adalah informasi tambahan yang harus diberikan menyangkut berbagai hal yang terkait secara langsung dengan laporan keuangan yang disajikan entitas tertentu, yaitu kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan, dan berbagai informasi yang relevan dengan laporan keuangan tersebut.

Dalam penyusunan laporan keuangan untuk digunakan oleh pihak-pihak pengambil keputusan, diperlukan suatu kerangka konseptual yang menyeluruh dan integral yang mendasari dan mengatur prinsip dari penyusunan laporan keuangan agar fungsi dari laporan keuangan dapat dicapai. Kieso, et al. (2014) menyatakan bahwa kerangka konseptual merupakan sistem terpadu yang bersumber dari maksud disajikannya laporan keuangan, yang selanjutnya tujuan dari laporan keuangan dapat teridentifikasi.

Konsep lain mengatur tentang (1) batasan dari pelaporan keuangan (2) pemilihan transaksi, kejadian, dan situasi yang akan disajikan; (3) bagaimana transaksi diakui dan diukur; dan (4) bagaimana transaksi diikhtisarkan dan dilaporkan dalam laporan keuangan (Kieso, 2014) Kerangka konseptual pelaporan keuangan yang diadopsi Ikatan Akuntan Indonesia yang berasal dari IASB (*International Accounting Standards Board*) terdiri dari (1) Tujuan laporan keuangan; (2) Karakteristik kualitatif laporan keuangan yang bermanfaat (3) Elemen dalam laporan keuangan; dan (4) Konsep pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan (SAK, 2016).

Komponen dari kerangka konseptual penyusunan laporan keuangan dijelaskan sebagai berikut :

1) Tingkat pertama : Tujuan Dasar

Tujuan umum dari pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang menyediakan sumberdaya kepada entitas pelapor.

2) Tingkat kedua : Konsep Fundamental

Tingkat kedua dari kerangka konseptual menjelaskan karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang bermanfaat dan mendefinisikan elemen-elemen dalam laporan keuangan, dapat diartikan bahwa tingkat kedua dari kerangka konseptual merupakan jembatan antara tujuan akuntansi dan bagaimana tujuan tersebut dicapai.

a) Karakteristik Kualitatif Informasi Akuntansi

Standar akuntansi menetapkan karakteristik kualitatif yang membedakan antara informasi akuntansi yang berdaya guna dan informasi yang tidak berdaya guna. Karakteristik kualitatif dibagi menjadi dua bagian yaitu kualitas fundamental dan kualitas penambah. (SAK, 2017)

a. Kualitas Fundamental terdiri dari Relevan dan Penyajian Wajar. Informasi akuntansi dapat dikatakan relevan jika informasi tersebut dapat

memberikan perbedaan dalam pengambilan keputusan ekonomik. Sedangkan penyajian wajar merupakan kualitas informasi dimana angka yang disajikan serta deskripsi kejadian ekonomi yang diungkapkan sesuai dengan realitas.

b. Kualitas penambah terdiri dari keterbandingan, dapat diverifikasi, tepat waktu, dan dapat dipahami. Dengan diterapkannya karakteristik kualitatif tersebut penyusunan laporan keuangan akan menjadi kredibel dan bermanfaat bagi para pengambil keputusan.

b) Elemen-elemen dalam Laporan Keuangan

Definisi elemen-elemen dalam laporan keuangan menjadi penting karena hal tersebut dapat menjadi panduan dan dasar bagi penyusun laporan keuangan untuk menentukan klasifikasi elemen dalam laporan keuangan manakah yang tepat untuk transaksi atau kejadian ekonomik khusus. Adapun definisi elemen-elemen seperti dijelaskan dalam Standar Akuntansi Keuangan adalah sebagai berikut :

a. Aset

Merupakan sumberdaya yang dikendalikan entitas sebagai hasil dari kejadian masa lalu yang manfaat ekonomiknya diharapkan akan mengalir kepada entitas.

b. Liabilitas

Kewajiban kini dari entitas yang berasal dari kejadian masa lalu, penyelesaian kewajiban tersebut akan menghasilkan arus keluar manfaat ekonomik dari entitas.

c. Ekuitas

Klaim residu atas aset entitas setelah kewajiban entitas terpenuhi.

- d. Pendapatan
Peningkatan manfaat ekonomik selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan nilai aset atau penurunan nilai liabilitas yang menghasilkan kenaikan dari ekuitas, selain dari kontribusi pemilik modal kepada entitas.
 - e. Beban
Penurunan manfaat ekonomik selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau penurnunan nilai aset atau kenaikan nilai liabilitas yang menghasilkan penurunan dari ekuitas, selain dari distribusi kepada pemilik modal dari entitas.
- c) Tingkat ketiga : Konsep Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan.
Tingkat ketiga dari kerangka konseptual terdiri dari konsep-konsep yang mengimplementasikan tujuan utama pelaporan keuangan pada tahap pertama (Kieso, 2014). Konsep tersebut mengatur bagaimana perusahaan harus mengakui, mengukur, dan mengungkapkan elemen dalam laporan keuangan beserta kejadiankejadian ekonomik lain. Konsep tersebut terdiri dari asumsi dasar, prinsip, dan batasan biaya (Kieso, 2014).

1.3 Standar Akuntansi Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Dengan adanya standar akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Di dunia ada 2 standar yang

dijadikan referensi yaitu *International Financial Reporting Standard* (IFRS) dan *US Generally Accepted Accounting Principles* (US-GAAP). IFRS disusun oleh *International Accounting Standard Board* (IASB) sedangkan US-GAAP disusun oleh *Financial Accounting Standard Board* (FASB).

Di Indonesia, Efektif per 1 Januari 2015 secara garis besar akan konvergen dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang berlaku efektif 1 Januari 2014. DSAK IAI telah berhasil meminimalkan perbedaan antara kedua standar, dari tiga tahun di 1 Januari 2012 menjadi satu tahun di 1 Januari 2015. Ini merupakan suatu bentuk komitmen Indonesia melalui DSAK IAI dalam memainkan perannya selaku satu-satunya anggota G20 di kawasan Asia Tenggara. Dengan perbedaan yang semakin sedikit antara SAK dan IFRS maka diharapkan akan memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan di Indonesia. Perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik, regulator yang berusaha menciptakan infrastruktur pengaturan yang dibutuhkan, khususnya dalam transaksi pasar modal, serta pengguna informasi laporan keuangan dapat menggunakan SAK sebagai suatu panduan dalam meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan.

Penyusunan dan pencabutan SAK wajib mengikuti *due process procedure* yang telah ditetapkan dalam Peraturan Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia. Proses tersebut meliputi : identifikasi isu; konsultasi isu dengan Dewan Konsultatif SAK (DKSAK) (jika diperlukan); melakukan riset terbatas; pembahasan materi SAK; pengesahan dan publikasi *exposure draft*; pelaksanaan *public hearing*; pelaksanaan *limited hearing* (jika diperlukan); pembahasan masukan publik; dan pengesahan SAK. Sedangkan penyusunan buletin teknis dan *annual improvements* tidak wajib mengikuti keseluruhan tahapan *due process procedure*.

Dalam proses akuntansi, seorang akuntan harus menjalankannya sesuai standar yang berlaku. Di Indonesia, Standar akuntansi di Indonesia berkembang menjadi 5 pilar yang disusun dengan mengikuti perkembangan dunia usaha yaitu : PSAK-IFRS (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan-*International Financial Reporting Standard*), SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntansi Publik), PSAK-EMKM (Entitas Mikro, Kecil dan Menengah), PSAK-Syariah (Pernyataan Standar Akuntansi Syariah), SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).

1.3.1 PSAK-IFRS (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan-*International Financial Reporting Standard*)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau *International Financial Reporting Standard* (PSAK) adalah nama lain dari SAK yang diterapkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sejak tahun 2012 lalu sampai dengan tahun 2021. Standar ini wajib digunakan oleh badan usaha yang memiliki akuntabilitas publik yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, BUMN, ataupun perusahaan dana pensiun). Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan.

Penggunaan IFRS sendiri ditentukan karena Indonesia merupakan anggota IFAC (*International Federation of Accountants*) yang menjadikan IFRS sebagai standar mereka. Selama tahun 2020, DSAK IAI telah mengesahkan 1 (satu) PSAK, 1 (satu) ISAK, 6 (enam) judul Amendemen atas PSAK, 1 (satu) Penyesuaian Tahunan 2020, dan 2 (dua) standar lain yang statusnya masih berupa Draf Eksposur (yaitu, Draf Eksposur SAK Entitas Privat dan Draf Eksposur Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan).

Ciri - ciri entitas yang dianggap memiliki akuntabilitas publik yang signifikan yaitu :

- a. Entitas tersebut telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, kepada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan sekuritas (efek) di pasar modal.
- b. Entitas tersebut menguasai asset dalam kapasitas sebagai fidusia bagi sekelompok besar masyarakat, seperti bank, ensitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi.

1.3.2 SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Tanpa Akuntansi Publik)

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik yaitu entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. SAK-ETAP dikeluarkan tahun 2010. SAK-ETAP merupakan hasil penyederhanaan IFRS yang meliputi tidak adanya laporan laba rugi komprehensif, penilaian untuk aset tetap, aset tak berwujud, dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan. Tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar, serta tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan karena beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak.

Ciri - ciri entitas yang tanpa akuntabilitas publik yaitu :

- a. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan.
- b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.

Badan usaha yang tergolong sebagai entitas tanpa akuntabilitas public adalah :

- Entitas Perorangan
- Persekutuan Perdata
- Firma
- CV
- Perseroan Terbatas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan.
- Koperasi

1.3.3 PSAK-EMKM (Entitas Mikro, Kecil dan Menengah)

SAK-EMKM keluar pada tahun 2016. SAK-EMKM disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah yaitu entitas yang belum mampu memenuhi persyaratan sesuai SAK-ETAP. Entitas yang menggunakan PSAK-EMKM sebagai pedomannya memuat laporan keuangan secara eksplisit dan tetap harus patuh dalam pembuatannya

1.3.4 PSAK-Syariah (Pernyataan Standar Akuntansi Syariah)

PSAK-Syariah adalah standard yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas berbasis syariah. PSAK-Syariah merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk lembaga-lembaga kebijakan syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, badan zakat, dan lain sebagainya. Bank syariah menggunakan dua standard dalam menyusun laporan keuangan. Sebagai entitas yang memiliki akuntabilitas public signifikan, bank syariah menggunakan PSAK, sedangkan untuk transaksi syariahnya menggunakan PSAK syariah.

Pengembangan standar ini dibuat berdasarkan acuan dari fatwa yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama

Indonesia). Standar ini terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan istishna.

1.3.4 SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah ditetapkan sebagai peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dibuat untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. 2017. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Kieso, Donald.E., Jerry J. Weygandt, dan Terry D.Warfield. 2021. *Intermediate Accounting(IFRS edition)*. Jakarta. Salemba Empat.
- Martani, Dwi.,dkk. 2012. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Jakarta: Salemba Empat.
- Rudianto. 2012.Pengantar Akuntansi (Adaptasi IFRS). Jakarta:Erlangga.
- Stice, E.Kay. James D. Stice., dan Fred Skousen. 2011. *Intermediate Accounting* (edisi keenambelas). Jakarta : Salemba Empat.

BAB 2

KONSEP TEORITIS DAN PERHITUNGAN DAN METODE PENCATATAN *INCOME TAXES* DAN *DEFERRED TAXES*

Oleh Richad Alamsyah

2.1 Pendahuluan

Dasar pengakuan penghasilan dalam peruntukan perhitungan suatu penghasilan kena pajak berbeda terkait basis perhitungan penghasilan yang digunakan untuk kebutuhan secara komersil, atau maka dari itu diferensiasi diakibatkan pengakuan suatu beban serta pendapatan. Sehingga, terjadi diferensiasi yang mempengaruhi antara kedua pengakuan tersebut. Penghasilan kena pajak yang dikalkulasikan berdasarkan pada suatu penghasilan kena pajak yang sebenarnya dibayarkan kepada regulator atau fiskus dinyatakan sebagai “ PPh yang masih harus dibayar- *Income Taxes payable* maka dari itu pajak atas pendapatan yang dikalkulasikan atas pendapatan sebelum pajak yang dinyatakan sebagai “Beban pajak penghasilan – *Income Tax Expense*”.

Terdapat suatu diferensiasi antara PPh yang masih harus dibayar dengan biaya Pajak yang diartikan perihal yang berhubungan dengan perbedaan temporer (tetap) baiknya dibukukan dan terlihat dalam pelaporan keuangan komersil pada akun pajak yang ditangguhkan (*deferred tax*) baik aset pajak yang ditangguhkan maupun utang pajak yang ditangguhkan.

Perbedaan temporer bisa meningkatkan nilai pajak dimasa depan yang diakui layaknya kewajiban pajak yang

ditangguhkan dan pengakuan beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*) oleh entitas, yang mana mengindikasikan setiap peningkatan terhadap utang pajak tangguhan tetap secara terus menerus dengan akrue penghasilan atau menunda beban untuk laporan keuangan komersial dibandingkan dengan laporan pajak oleh entitas.

2.2 Pengertian Akuntansi Pajak Tangguhan

Permasalahan utama dalam suatu proses akuntansi pada penghasilan yang dikenai pajak sebagaimana ketentuan berlaku adalah bagaimana mempertanggungjawabkan akibat dari suatu pajak pada tahun berjalan dan tahun pembukuan yang akan datang untuk :

- a) Pengembalian nominal yang telah dibukukan pada suatu aset entitas yang dibukukan pada laporan posisi keuangan atau nominal penerimaan atas pelunasan yang telah dibukukan atas utang yang dibukukan pada laporan posisi keuangan entitas ;
- b) Aktivitas dari suatu transaksi di tahun berjalan yang telah dibukukan pada pelaporan keuangan entitas (PSAK46, FASB Statemnt No.109)

Terkait pengaplikasian akuntansi dalam pendapatan yang dikenakan pajak mengharuskan diterapkan oleh semua entitas (*non -profit oriented dan profit*) yang mengkalkulasi PPh badan seperti lembaga bentuk usaha tetap, PT, dana pensiun, koperasi, yayasan dan lain-lain. Semua entitas yang berbadan hukum diwajibkan mengkalkulasikan PPh badan dan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan).

Profitabilitas suatu entitas yang dilaporkan pada SPT dengan metode secara fiskal dipastikan terjadi perbedaan nominal jumlahnya terhadap profitabilitas yang dibukukan pada suatu pelaporan keuangan dengan metode secara komersial. Oleh

karenanya, mengakibatkan adanya diferensiasi dasar yang digunakan. Menurut Kieso et al. (2018) mengemukakan bahwa di sejumlah negara, jumlah profit yang dikenai pajak sama dengan profit sebelum pajak sehingga berdampak pada akuntansi atas profitabilitas menurut pajak dan akuntansi memiliki perbedaan yang tidak material.

Diferensiasi penerapan terhadap pengakuan penghasilan dengan prinsip akuntansi yang dicatat dalam profit (laba) sebelum pajak secara akuntansi non fiskal (komersial) pada ketentuan pajak penghasilan yang telah dibukukan dalam laba yang dikenakan pajak yang menimbulkan dampak diferensiasi biaya pajak (*tax expense*) terhadap utang pajak (*tax liabilities*). keuntungan secara akuntansi komersial yang sebelum dikenakan pajak adalah laba-rugi pada pelaporan keuangan terkait adanya pendapatan sebelum dikenai pajak yang tercantum dalam pernyataan standar akuntansi (PSAK46). Sedangkan laba yang terkena pajak merupakan jumlah pendapatan yang dijadikan sebagai dasar formula perhitungan atas pajak yang tercantum dalam ketentuan perpajakan.

2.3 Aset Pajak yang Ditangguhkan (*Deferred Tax Assets*)

Aktivitas atas transaksi yang menimbulkan liabilities hingga tahun dalam pelaporan yang diproyeksi untuk mengkalkulasikan biaya atau utang dalam pencatatan yang berdampak pada timbulnya perbedaan sementara. Oleh sebab itu terjadi dikarenakan ketentuan pajak tidak memperbolehkan pengakuan atau mengurangi biaya hingga utang tersebut dilunasi.

Aset pajak yang sedang ditangguhkan merupakan peningkatan dari angka pengembalian biaya pajak dimasa depan yang menimbulkan atas berkurangnya terhadap nominal perbedaan sementara yang timbul pada akhir periode. Untuk

memberikan gambaran lebih jelas berikut perhitungan dari contoh studi kasus :

PT. Selalu Ceria diasumsikan mengeluarkan proyeksi beban jaminan produk sesuai dengan tabel 1. Berikut merupakan data yang berhubungan dengan pendapatan dan beban garansi produk untuk periode 2020 dan 2021. Tarif pajak efektif adalah 15%

Tabel 2.1 : Perbedaan Sementara Dan Aktiva Pajak Tangguhan PT. Selalu Ceria

Tahun	Pembukuan			Pajak			Perbedaan Sementara	
	Penghasilan	Biaya	Beban Pajak	Penghasilan	Biaya	Hutang Pajak	Pengurang dimasa mendatang	Aktiva Pajak Tangguhan (keuntungan)
2020	6.000.000	600.000	510.000	6.000.000	0	600.000	600.000	90.000
2021	4.000.000	400.000	340.000	4.000.000	1.000.000	250.000	(600.000)	(90.000)
Total	10.000.000	1.000.000	850.000	10.000.000	1.000.000	850.000	0	0

Tabel 2.1 memperlihatkan manfaat atas pajak yang ditangguhkan (*deferred tax benefit*) adalah indikator negatif biaya pajak penghasilan. manfaat pajak yang ditangguhkan adalah kenaikan angka aset pajak yang ditangguhkan (*deferred tax assets*) dari saldo permulaan sampai akhir tahun pembukuan akuntansi. Berikut dibawah ini merupakan mutasi yang berdampak pada saldo aktiva pajak yang ditangguhkan PT. Selalu Ceria.

**Tabel 2.2 : Aktiva Pajak Tangguhan Pt. Selalu Ceria
Tahun 2020 Dan 2021**

Aktiva Pajak Tangguhan	2020	2021
Saldo Akhir	90.000	0
Saldo Awal	0	90.000
Beban Pajak yang ditangguhkan	(90.000)	90.000
Beban Pajak Tahun Berjalan	600.000	250.000
Beban Pajak	510.000	340.000

Dari data yang kita dapatkan pada informasi diatas ayat jurnal yang bisa kita catat atas pajak penghasilan tahun 2020 dan 2021. Antara lain :

Jurnal pada akhir tahun 2020 :

Income Tax	Rp.510.000
Deferred Tax Assets	Rp. 90.000
Income Tax Liabilities	Rp. 600.000

Jurnal pada akhir tahun 2021

Income Tax Expense	Rp. 340.000
Income Tax Liabilities	Rp.250.000
Deferred Tax Assets	Rp. 90.000

2.4 Perbedaan Sementara dan Tetap

Dalam hal penyusunan laporan keuangan terdapat perbedaan pengakuan akuntansi yang mana terletak pada akun dalam akuntansi yang menimbulkan diferensiasi antara keuntungan (laba) setelah pajak dan keuntungan (laba) kena pajak. Dalam hal tersebut perbedaan diklasifikasikan kedalam dua kondisi yaitu perbedaan sementara dan perbedaan tetap.

2.4.1 Perbedaan Sementara

Dalam hal perbedaan sementara yang diatur dalam PSAK 46 mewajibkan entitas untuk mengklaim suatu utang atas pajak tangguhan dan aset atas pajak tangguhan akibat dari pengakuan pajak atas aset dan utang dalam pelaporan keuangan.

Perbedaan temporer (sementara) berakibat pada total penghasilan kena pajak pada masa yang akan datang bertambah sehubungan dengan aset yang ditetapkan kembali atau disebut sebagai perbedaan sementara penghasilan yang dikenakan pajak (*taxable temporary differences*). Yang mana dalam paragraf 07 PSAK 45 berbunyi :

Perbedaan sementara kena pajak (*taxable temporary differences*) adalah perbedaan sementara yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi.

Perbedaan temporer yang mengakibatkan pada penurunan jumlah pada masa yang akan datang dan berhubungan dengan kewajiban merupakan pengurang perbedaan sementara. Perbedaan sementara yang dikenakan pajak meningkatkan kewajiban pajak yang ditangguhkan sedangkan pengurang perbedaan sementara meningkatkan pencatatan aktiva pajak yang ditangguhkan.

Semua dampak terkait perbedaan sementara yang dikenai perpajakannya dianggap sebagai utang pajak yang ditangguhkan, melainkan diferensiasi itu muncul atas hak paten atau copy right yang penyusutannya (amortisasi) tidak dapat mengurangi terhadap tujuan fiskal, atau klaim terhadap aset atau utang dari setiap transaksi antara lain :

- a) Tidak terhadap transaksi penyatuan usaha ; dan
- b) Tidak berdampak terhadap laba secara akuntansi komersial dan fiskal.

Penetapan perbedaan temporer (sementara) pada suatu entitas mungkin mengalami kesulitan. Entitas harus membuat laporan posisi keuangan (neraca) sebagai tujuan pajak agar dapat dibandingkan dengan laporan posisi keuangan (neraca) untuk tujuan komersial, beberapa perbedaan dengan dua laporan posisi keuangan tersebut ditetapkan menjadi perbedaan temporer (sementara). Menurut Kieso et al (2016) dan stice et al (2004) mengklasifikasikan perbedaan temporer (sementara) ke dalam beberapa klasifikasi antara lain :

- a) Pendapatan yang dikenai pajak sesudah dibukukan dalam pelaporan keuangan ;
- b) Beban yang telah dikurangi sesudah dibukukan dalam pelaporan keuangan;
- c) Pendapatan yang belum dibukukan dalam pelaporan keuangan;
- d) Beban yang telah dikurangi sebelum dibukukan dalam pelaporan keuangan.

2.4.2 Perbedaan Tetap

Sedangkan dalam hal pengakuan perbedaan secara tetap terhadap penghasilan atau biaya yang diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK), akan tetapi oleh perundangan-undangan perpajakan pendapatan tidak dibukukan, ataupun dibukukan. Entitas telah memiliki peraturan terkait ketentuan perpajakan upaya untuk mencapai tujuan tertentu dalam beberapa bidang. Menurut Kieso *et al* (2016) beberapa dari ketentuan tersebut menghilangkan beberapa penghasilan yang dikenakan pajak, batas biaya untuk biaya tertentu dan memperkenankan menghilangkan beberapa pengeluaran tertentu lainnya lebih besar dari pengeluaran yang dihilangkan.

Entitas yang memiliki penghasilan tidak kena pajak, biaya yang tidak dikurangi atau diperbolehkan mengurangi atas

tambahan dari beban yang memiliki tarif pajak efektif yang berlawanan atas dikenakannya pajak normal.

Perbedaan tetap hanya berdampak dalam 1 tahun pelaporan dimana diferensiasi itu terjadi, diferensiasi tersebut tidak menyebabkan jumlah yang terkena pajak atau jumlah yang dapat mengurangi pajak dikemudian hari. Sebagai dampak tidak adanya dampak penangguhan pajak yang diperkenalkannya.

2.5 Penerapan dalam Pelaporan Keuangan

Aset atas pajak lancar (*current tax asset*) yang berasal dari dana yang dibayarkan terlebih dahulu atas pajak penghasilan semisal PPh pasal 22, 23 dan 25 wajib dimasukkan dalam hitungan terhadap utang pajak lancar (*current tax liability*). Jumlah hitungan bersih atas pajak tersebut nampak di laporan posisi keuangan (neraca) atas aset pajak lancar yang boleh dikompensasikan atau seperti utang pajak penghasilan yang masih harus dibayar atas utang lancar.

Aset pajak yang ditangguhkan dan utang pajak yang ditangguhkan harus dipisahkan antara aset lancar dan utang lancar. Menurut ayers (1998) dalam penelitiannya menunjukan bahwa pasar akan melihat aset pajak tangguhan dan utang pajak tangguhan sama dengan aset dan utang lainnya, maka dari itu informasi ini akan menambah pengguna laporan keuangan.

Berdasarkan PSAK 46 mengemukakan bahwa aset dan utang atas pajak yang ditangguhkan wajib disajikan sebagai tidak lancar (*non-current*) dan tidak sebagai lancar (*current*). Meskipun PSAK 46 tidak mengungkapkan secara tegas bahwa keduanya dapat dikompensasikan dalam penyajian di neraca.

Sedangan berdasarkan PSAK 46 pada laporan laba-rugi (*income statment*), beban pajak diperuntukan terkait kegiatan normal wajib dialporkan secara tersendiri. Hal tersebut menandakan wajib dialokasikan pajak antar periode. Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan PPh final dibukukan dalam

laporan laba rugi sebagai pajak lancar (*current tax*) secara proporsi dengan jumlah penghasilan periode tahun laporan yang dibukukan berdasarkan pencatatan akuntansi. Perbedaan jumlah antara jumlah PPh final yang terutang dengan PPh final yang diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi dibukukan sebagai PPh dibayar dimuka atau utang PPh, masing-masing wajib disajikan secara terpisah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayers. B. 1998. *Deferred Tax Accounting under SFAS No. 109: An Empirical Investigation on Its Incremental Value-Relevance Relative To APB No 11*, The Accounting Review.
- Financial Accounting Standard Board. 1992. Summary of Statment No. 109- Accounting for Income Taxes (Issued 2/92) dapat diakses;
<https://www.fasb.org/page/PageContent?pageId=/reference-library/superseded-standards/summary-of-statement-no-109.html&bcpath=tff> (diakses 28 Desember 2022)
- Standar akuntansi Keuangan. 2014 . Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46 (PSAK 26) : Akuntansi pajak penghasilan , Jakarta : Divisi Publikasi IAI
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygant, Terry D. Warfield,. 2016. Intermediate Accounting, Jon Wiley & Sons.
- Stice, James D., Earl K Stice, K Fred Skousen, 2007. Intermediate Accounting, Sixteenth Edition, Thomson- Southwestern

BAB 3

AKUNTANSI UNTUK EKUITAS

Oleh Nurchayati

3.1 Pengertian Ekuitas

Ekuitas adalah hak pemilik atas aset sebuah perusahaan setelah dikurangi dengan jumlah kewajiban. Padanan arti ekuitas adalah modal. Dengan demikian, rumus ekuitas adalah aset dikurangi kewajiban atau liabilitas. Ekuitas adalah jumlah aset atau harta yang bisa dikembalikan kepada pemilik perusahaan apabila perusahaan dilikuidasi dan semua kewajiban utangnya sudah terbayar. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) menyatakan bahwa ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Arti ekuitas lainnya yakni investasi yang ditanamkan pemilik dalam perusahaan. Jumlah ekuitas ini bisa berkurang apabila pemilik perusahaan melakukan penarikan aset.

Ekuitas juga bisa berkurang karena sebab lainnya seperti kerugian perusahaan atau keuntungan perusahaan yang ditarik oleh pemiliknya. Ekuitas bisa menjadi negatif alias defisit saat jumlah kewajiban lebih besar daripada jumlah asetnya. Jumlah ekuitas sendiri dilaporkan perusahaan dalam neraca perusahaan yang menggambarkan kondisi sehat tidaknya perusahaan. Perusahaan bisa dikatakan tak sehat apabila ekuitas adalah selalu negatif.

Komponen ekuitas untuk perseroan terbatas terdiri atas :

1. Modal disetor
2. Saldo Laba

3.2 Modal Disetor

Untuk perusahaan dengan bentuk Perseroan Terbatas, kepemilikan dalam lembar saham, secara umum pemilik setiap lembar saham memiliki hak sebagai berikut:

- a. Pembagian keuntungan (dan kerugian) perusahaan secara proposional sesuai dengan persentase kepemilikan
- b. Partisipasi dalam manajemen, seperti hak suara untuk menunjuk direksi dan komisaris secara proposional sesuai dengan persentase kepemilikan
- c. Pembagian aset perusahaan pada saat likuidasi secara proporsional sesuai persentase kepemilikan
- d. Hak prioritas untuk membeli saham yang baru diterbitkan secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan, yang dikenal dengan hak memesan terlebih dahulu atau *preemptive right*.

Saham yang bisa diterbitkan oleh Perseroan Terbatas ada dua jenis

- a. Saham biasa (*ordinary share*), yang merupakan kepemilikan perusahaan karena
 - 1) Menanggung seluruh risiko kerugian
 - 2) Menerima manfaat terbesar atas sukses perusahaan
 - 3) Tidak ada jaminan untuk memperoleh dividen atau pada saat likuidasi, hasil penjualan aset.
- b. Saham preferen (*preferred share*) yang timbul karena kontrak dengan pemegang saham yang bersedia mengorbankan beberapa hak tertentu untuk mendapatkan kepastian hak atau *privilege* lainnya, seperti prioritas pembagian saham.

3.3 Saldo Laba

Saldo laba atau *retained earnings* merupakan bagian dari ekuitas pemegang saham yang berasal dari akumulasi laba bersih perusahaan yang tidak dikembalikan atau dibagikan kepada

pemilik atau pemegang saham. Laba bersih perusahaan yang diperoleh dalam satu periode adalah hak pemegang saham, apabila laba bersih dibagikan kepada pemegang saham disebut dengan dividen, yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Setiap lembar saham mendapat pembagian yang sama, misal Rp100 per lembar sehingga semakin besar saham yang dimiliki maka semakin besar dividen yang diterima.

Bagian laba yang diakumulasikan sebagai saldo laba biasanya menambah atau memperkuat permodalan ekuitas perusahaan. Saldo laba adakalanya disisihkan untuk keperluan tertentu, misal untuk investasi atau pembelian aset tertentu yang dikenal sebagai saldo laba yang diappropriasikan (*appropriated retained earnings*).

3.4 Penghasilan Komprehensif lainnya

Penghasilan komprehensif (*comprehensive income*) adalah akun-akun yang memengaruhi nilai ekuitas perusahaan, yang tidak terkait langsung dengan pemegang saham. Penghasilan komprehensif dibagi menjadi dua yaitu laba bersih dan penghasilan komprehensif lainnya (*other comprehensive income*), oleh karena laba bersih sudah ditampung dalam akun saldo laba maka penghasilan komprehensif lainnya menjadi akun tersendiri dalam bagian ekuitas pemegang saham. Contoh: penghasilan komprehensif lainnya adalah saldo keuntungan atau kerugian belum terealisasi dari investasi sekuritas kategori tersedia untuk dijual (*unrealized gain/loss from available for sale securities*) atau keuntungan/kerugian akibat translasi laporan keuangan.

3.5 Saham Biasa

Setiap saham yang diterbitkan merupakan representasi dari modal yang disetor dan ditempatkan. Jumlah dari modal disetor (*paid-in capital*) tidak selalu sama dengan jumlah modal dasar (*authorized capital*). Modal dasar adalah jumlah modal maksimal

yang dapat diterbitkan oleh suatu perusahaan, yang tercantum dalam Akta Perusahaan atau Anggaran Dasar. Umumnya modal disetor lebih kecil dari modal dasar. Apabila perusahaan telah menerbitkan saham senilai modal dasar, dan kemudian dirasakan adanya kebutuhan modal maka perusahaan harus melakukan Anggaran Dasar. Ada dua jenis saham biasa yang dapat diterbitkan perusahaan yaitu saham biasa dengan nilai nominal dan saham biasa tanpa nilai nominal.

3.5.1 Penerbitan dengan nilai nominal

Saham dapat diterbitkan dengan nilai nominal (*par value*) tertentu untuk setiap lembarnya. Penentuan besar kecilnya nilai nominal bergantung kepada masing-masing perusahaan. Umumnya nilai nominal lebih rendah daripada harga saham perdana atau harga penerbitan saham. Nilai nominal yang rendah menghindari perusahaan untuk menghadapi liabilitas kontijensi lebih lanjut.

Apabila harga saham perdana atau harga penerbitan saham lebih tinggi daripada nilai nominal maka perusahaan mencatat timbulnya agio saham (*share premium*).

Contoh penerbitan saham biasa dengan nilai nominal:

PT Merdeka menerbitkan 1.000.000 lembar saham biasa bernilai nominal Rp100 dengan harga Rp500 per lembar yang dibayar tunai oleh sejumlah investor yang membelinya. Perusahaan mencatat penerbitan saham dengan jurnal sebagai berikut:

Kas		500.000.000	
Modal	saham		100.000.000
biasa			
Agio	saham		400.000.000
biasa			

3.5.2 Penerbitan tanpa nilai nominal

Saham dapat diterbitkan tanpa nilai nominal, dengan alasan

- a. Perusahaan terhindar dari liabilitas kontijensi
- b. Perusahaan maupun investor terhindar dari kebingungan antara mencatat nilai nominal atau nilai wajar pasar

Di Indonesia menetapkan undang-undang yang melarang perusahaan menerbitkan saham tanpa nilai nominal. Nilai nominal terendah saham ditetapkan sebesar Rp5 per lembar.

Contoh penerbitan saham biasa tanpa nilai nominal:

PT Merdeka yang menerbitkan 1.000.000 lembar saham, namun tanpa nilai nominal. Harga penerbitan saham, Rp500 per lembar dibayar tunai oleh sejumlah investor yang membelinya, maka perusahaan mencatat penerbitan saham dengan jurnal sebagai berikut:

Kas	500.000.000	
Modal saham biasa		500.000.000

Di beberapa negara, saham tanpa nilai nominal tetap harus memiliki nilai yang ditetapkan (*stated value*) yang berfungsi seperti nilai nominal. Perbedaan utamanya adalah nilai yang ditetapkan sepenuhnya merupakan keputusan manajemen dan tidak terkait dengan anggaran dasar perusahaan.

Contoh penerbitan saham biasa tanpa nilai nominal tetapi memiliki nilai yang ditetapkan:

PT Merdeka menerbitkan 1.000.000 lembar saham biasa tanpa nilai nominal dengan harga Rp500 per lembar yang dibayar tunai oleh sejumlah investor yang membelinya. Manajemen memutuskan nilai yang ditetapkan saham adalah Rp100 per lembar maka perusahaan mencatat penerbitan saham dengan jurnal sebagai berikut:

Kas	500.000.000	
-----	-------------	--

Modal saham biasa	100.000.000
Agio saham biasa	400.000.000

3.5.3 Penerbitan dengan sekuritas lain

Ada kalanya perusahaan menerbitkan saham bersama dengan surat berharga atau sekuritas lain. Penerbitan seperti ini dilakukan untuk meningkatkan daya tarik saham perusahaan sehingga semakin banyak investor yang bersedia untuk menanamkan dana di perusahaan atau dengan harga yang relatif tinggi

Terdapat dua cara untuk mengakui dana yang diterima yaitu

- a. Metode proporsional
- b. Metode inkremental

Contoh penerbitan dengan sekuritas lain:

PT Merdeka menerbitkan 3.000.000 lembar saham bernilai nominal Rp100 dan 1.000.000 lembar saham preferen bernilai nominal Rp500. Total dana yang diperoleh adalah sebesar Rp1.350.000.000. Saham biasa memiliki nilai pasar sebesar Rp200 dan saham preferen memiliki nilai pasar Rp900 per lembar.

Apabila dicatat dengan metode proporsional, maka perhitungan alokasinya adalah sebagai berikut:

	Jumlah	Nilai	Total	%tase
Saham biasa	3.000.000	Rp200	Rp600 juta	40%
Saham preferen	1.000.000	Rp900	Rp900 juta	60%
			Rp1.500 juta	100%
Alokasi				
	Saham Biasa	Saham Preferen		
Harga penerbitan	Rp1.350 juta	Rp1.350 juta		
% alokasi	40%	60%		
Jumlah	Rp540 juta	Rp810 juta		

Jurnal yang dicatat sebagai berikut

Kas	1.350.000.000	
Saham preferen		500.000.000
Agio saham preferen		310.000.000
Saham biasa		300.000.000
Agio saham biasa		240.000.000

Keterangan:

Saham preferen = 1.000.000 x Rp500

Agio saham preferen = Rp810.000.000 – Rp500.000.000

Saham biasa = 3.000.000 x Rp100

Agio saam biasa = Rp540.000.000 – Rp300.000.000

Apabila dicatat dengan metode inkremental sebagai berikut:

	Jumlah	Nilai	Total
Saham biasa	3.000.000	Rp200	Rp600 juta
Saham Preferen	1.000.000		
	Nilai pasar wajar		Rp600 juta
Alokasi	Saham Biasa	Saham Preferen	
Harga penerbitan		Rp1.350 juta	
Alokasi		Rp(600 juta)	
Jumlah	Rp600 juta	Rp750 juta	

Jurnal yang dicatat sebagai berikut

Kas	1.350.000.000	
Saham preferen		500.000.000
Agio saham preferen		250.000.000
Saham biasa		300.000.000
Agio saham biasa		300.000.000

Keterangan:

Saham preferen = 1.000.000 x Rp500

Agio saham preferen = Rp750.000.000 – Rp500.000.000

Saham biasa = 3.000.000 x Rp100

Agio saham biasa = Rp600.000.000 – Rp300.000.000

3.5.4 Penerbitan Saham Non-Tunai

Penerbitan saham dapat dilakukan ketika perusahaan melakukan transaksi untuk membeli aset atau properti, ataupun memperoleh layanan atau *service* dalam bentuk selain kas tunai. Perusahaan perlu mencatat saham yang diterbitkan sebesar:

1. Nilai wajar barang atau jasa yang diterima atau
2. Jika nilai wajar barang atau jasa tidak adapat diukur secara andal, maka sebesar nilai wajar saham yang diterbitkan

Contoh saham yang diterbitkan dalam transaksi non-tunai:

Pada 1 Desember 2019 PT Merdeka membeli merk dagang obat flu “fluensa” dari salah satu perusahaan farmasi dari Malaysia. PT Merdeka dalam pembelian tidak melakukan pembayaran tunai melainkan menerbitkan 100.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.

Kondisi 1

PT Merdeka tidak dapat menentukan nilai wajar merek dagang, namun berdasarkan harga penutupan perdagangan, harga saham per lembar PT Merdeka diketahui sebesar Rp1.600 per lembar. Jurnal yang dicatat adalah

Merek dagang	160.000.000	
Saham biasa		100.000.000
Agio saham biasa		60.000.000

Kondisi 2

PT Merdeka tidak dapat menentukan nilai wajar saham, namun nilai wajar merek dagang diperkirakan sebesar Rp175.000.000

Jurnal yang dicatat:

Merek dagang	175.000.000	
Saham biasa		100.000.000
Agio saham biasa		75.000.000

Kondisi 3

PT Merdeka tidak dapat menentukan nilai wajar saham maupun merek dagang. Dalam kondisi ini perusahaan dapat meminta bantuan dari konsultan penilai independen. Dari analisis model arus kas terdiskonto, misalkan nilai merek dagang

diestimasi sebesar Rp130.000.000. Jurnal yang dicatat sebagai berikut:

Merek dagang	130.000.000	
Saham biasa		100.000.000
Agio saham biasa		30.000.000

3.5.5 Biaya Penerbitan Saham

Ketentuan PSAK 21, Akuntansi Ekuitas biaya yang dikeluarkan selama proses penerbitan saham dikategorikan sebagai biaya langsung, seperti biaya penjaminan emisi efek, biaya imbalan jasa audit dan penasehat hukum, biaya dokumen dan pajak, dikurangkan langsung dari penerimaan uang yang diperoleh melalui penerbitan saham. Apabila pengeluaran tersebut dikeluarkan secara terpisah maka dicatat sebagai pengurang terhadap agio saham yang diterbitkan.

3.6 Saham Preferen

1. Karakteristik

Saham preferen (*preferred stock*) merupakan jenis saham yang diterbitkan oleh perusahaan dengan karakteristik:

- Preferensi saat pembagian dividen
- Preferensi saat pembagian aset, dalam proses likuidasi perusahaan
- Dapat dikonversikan (*convertible*) menjadi saham biasa atau sekuritas lainnya
- Dapat ditarik kembali (*callable*), sebagai eksekusi hak opsi bagi perusahaan
- Tidak memiliki hak suara
- Sifat dividen dapat kumulatif artinya dividen yang tidak dibagikan dapat diakumulasikan ke periode berikutnya
- Partisipatif yaitu kemungkinan mendapatkan dividen tambahan setelah pengalokasian dividen untuk pemegang saham

- h. Dapat dijual kepada pihak lain perusahaan yang menerbitkan saham (*redeemable*).

Perusahaan dapat menentukan salah satu atau beberapa bahkan seluruhnya atas saham preferensi yang ditawarkan, selama tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Saham preferen tidak memiliki hak suara maka banyak investor yang memandang saham preferen sebagai instrumen yang kurang strategis.

2. Penerbitan saham

Contoh penerbitan saham preferen:

PT Merdeka menerbitkan 100.000 lembar saham preferen dengan nilai nominal Rp100 per lembar. Saham ini dibeli tunai para investor dengan harga perdana sebesar Rp150 per lembar. Jurnal yang dicatat perusahaan sebagai berikut:

Kas	15.000.000	
Saham preferen		10.000.000
Agio saham preferen		5.000.000

Untuk saham preferen yang memiliki fitur konvertibel pada saat dilakukan konversi, misalkan terhadap saham biasa maka menggunakan nilai wajar aset atau saham yang diperoleh.

3. Pembagian dividen

Fitur preferensi pembagian dividen untuk saham preferen bergantung pada jenis dan karakteristiknya. Secara umum ada dua karakteristik umum dividen saham preferen.

- Dividen kumulatif adalah pembagian dividen suatu periode mendahulukan dividen periode sebelumnya yang tidak dibagikan (*dividend in arrears*). Jika masih ada sisa barulah dianggap sebagai dividen periode berjalan.
- Dividen partisipatif adalah kebijakan dividen suatu periode yang memberikan tambahan dividen kepada

pemegang saham preferen, jika masih terdapat kelebihan dividen setelah pemegang saham biasa memperoleh alokasi dividen dalam persentase yang sama terlebih dahulu.

Contoh pembagian dividen tunai:

Pada 1 November 2020 PT Merdeka melakukan pembagian dividen tunai sebesar Rp50.000.000 kepada para pemegang saham. Komposisi pemegang saham terdiri sebagai berikut:

Saham preferen 6% dengan nilai nominal	Rp100.000.000
Saham biasa dengan nilai nominal	Rp400.000.000

Selama tahun 2018 dan 2019 PT Merdeka tidak membagikan dividen karena kebutuhan dana investasi yang besar. Diasumsikan bahwa komposisi pemegang saham tidak berubah selama tahun 2018-2020

1. Dividen saham preferen bersifat non-kumulatif dan non-partisipatif

Pembagian dividen untuk saham preferen dan saham biasa dihitung sebagai berikut:

Perhitungan	Saham Preferen	Saham Biasa	Total
6%(Rp100 juta)	Rp6.000.000		Rp6.000.000
Sisa		Rp44.000.000	Rp44.000.000
Jumlah	Rp6.000.000	Rp44.000.000	Rp50.000.000

Pemegang saham preferen menerima dividen sebesar 6% dari nilai nominal (yaitu Rp6.000.000) dan sisanya (yaitu Rp44.000.000) dialokasikan untuk pemegang saham biasa.

2. Dividen saham preferen bersifat kumulatif dan non-partisipatif

Perhitungan	Saham Preferen	Saham Biasa	Total
2x6%(Rp100 juta)	Rp12.000.000		Rp12.000.000
6%(Rp100 juta)	Rp6.000.000		Rp6.000.000
Sisa		Rp32.000.000	Rp32.000.000
Jumlah	Rp18.000.000	Rp32.000.000	Rp50.000.000

Pemegang saham preferen menerima dividen sebesar Rp18.000.000 terdiri atas dividen 2 tahun sebelumnya yang belum dibagikan (masing-masing Rp6.000.000, total Rp12.000.000) dan dividen saham tahun berjalan sebesar 6% dari nilai nominal (yaitu Rp6.000.000). Sisanya sebesar Rp32.000.000 dialokasikan untuk pemegang saham biasa.

3. Dividen saham preferen bersifat non-kumulatif dan non-partisipatif

Perhitungan	Saham Preferen	Saham Biasa	Total
Dividen tahun berjalan 6%	Rp6.000.000	Rp24.000.000	Rp30.000.000
Dividen partisipatif 4%	Rp4.000.000	Rp16.000.000	Rp20.000.000
Jumlah	Rp10.000.000	Rp32.000.000	Rp50.000.000

Setelah pemegang saham preferen dan saham biasa mendapatkan dividen tahun berjalan dengan persentase yang sama yaitu 6% dari nilai nominal, sisanya dibagikan sebagai dividen partisipatif dengan perhitungan sebagai berikut:

Total dividen tahun berjalan	Rp30.000.000
Dividen tersedia untuk partisipatif	Rp20.000.000 (Rp50 juta - Rp30 juta)
Nilai nominal saham preferen dan biasa	Rp500 juta (Rp100 juta + Rp400 juta)
Tingkat partisipasi 4% (Rp20.000.000/Rp500.000.000) Besarnya dividen partisipatif saham preferen = 4% x Rp100.000.000 = Rp4.000.000 Besarnya dividen partisipatif saham biasa = 4% x Rp400.000.000 = Rp16.000.000	

Pemegang saham preferen menerima total dividen sebesar Rp10.000.000 dan pemegang saham biasa sebesar Rp40.000.000

4. Dividen saham preferen bersifat non-kumulatif dan non-partisipatif

Perhitungan	Saham Preferen	Saham Biasa	Total
2 x 6% x Rp100.000.000	Rp12.000.000		Rp12.000.000
46 x Rp100 juta	Rp6.000.000	Rp24.000.000	Rp30.000.000
Dividen partisipatif	Rp1.600.000	Rp6.400.000	Rp8.000.000
Jumlah	Rp19.600.000	Rp30.400.000	Rp50.000.000
Tingat partisipasi 1,6%(Rp8.000.000/Rp500.000.0000) Besarnya dividen partisipatif saham preferen = 1,6% x Rp100.000.000 = Rp1.600.000 Besarnya dividen partisipatif saham biasa = 1,6% x Rp400.000.000 = Rp6.400.000			

3.7 Analisis Laporan Keuangan

Rasio keuangan yang menyangkut ekuitas dan umum digunakan dalam analisis laporan keuangan adalah

- a. Pengembalian atas ekuitas (*return on equity-ROE*)

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih} - \text{Dividen Preferen}}{\text{Rata-rata jumlah Jumlah Saham Biasa yang beredar}}$$

- b. Rasio pembagian saham (*dividend payout ratio-DPR*)

$$\text{Dividend Payout Ratio} = \frac{\text{Dividen tunai}}{\text{Laba Bersih} - \text{Dividen Preferen}}$$

DAFTAR PUSTAKA

- Kieso, Donald E; Weygandt, Jerry J and Warfield, Terry D. 2008. *Akuntansi Intermediate Jilid 2*. Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Martani, Dwi; Siregar, Sylvia Veronica; Wardhani, Ratna; Farahmita, Aria; Tabujaya, Edward & Hidayat, Taufik. 2018. *Akuntansi Keuangan Menengah: Berbasis PSAK, jilid 2*. Jakarta, Salemba Empat.
- <https://money.kompas.com>

BAB 4

AKUNTANSI SEKURITAS DILUTIF

RENCANA KOMPENSASI DAN LABA PERSAHAM

Oleh Parju

4.1 Pengertian Sekuritas Dilutif

Sekuritas dilutif adalah sekuritas yang bisa diubah menjadi saham biasa dan perubahan tersebut berpengaruh terhadap pengurangan laba per lembar saham atau *Earnings per share (EPS)*. Sekuritas dilutif merupakan surat berharga yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa sehingga pada saat dikonversikan akan memengaruhi jumlah saham yang beredar lebih besar dan berpengaruh terhadap penurunan nilai *EPS*, yang komponennya Pendapatan dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar, jika semakin banyak jumlah saham yang beredar dikerenakan adanya sekuritas dilutif, maka akan berpotensi menurunkan nilai EPS atau EPS Dilusian.

Sekuritas Dilutif merupakan jumlah total sekuritas seperti opsi saham, obligasi konversi, waran saham, saham preferen konversi, yang dimiliki perusahaan pada titik waktu tertentu yang dapat diubah menjadi sekuritas normal oleh pemegang sekuritas tersebut dengan menggunakan hak yang tersedia. Instrumen keuangan sebagai sekuritas dilutif jika mereka meningkatkan jumlah saham beredar, artinya sekuritas delutif merupakan instrumen yang dengan mudah dikonversi menjadi saham biasa.

Sekuritas delutif memiliki pengaruh pada saat menghitung EPS dilusian penuh. dengan adanya sekuritas delutif, EPS bisa berkurang, sehingga investor mungkin tidak tertarik untuk

berinvestasi di perusahaan. Sekuritas delutif. Namun juga memiliki sisi bagus, perusahaan menawarkan sekuritas yang dapat dikonversi, sebuah perusahaan yang berkembang baru dalam bisnis, memperoleh banyak keuntungan, merupakan daya tarik bagi investor untuk membeli sekuritas dilutif.

4.2 Jenis -Jenis Sekuritas Dilutif

Sekuritas yang digolongkan sebagai sekuritas dilutif meliputi opsi saham, Waran Saham, obligasi konversi, saham preferen dan kompensasi berbasis saham. Sekuritas delutif merupakan sekuritas yang berpotensi menurunkan nilai EPS. Penjelasan mengenai jenis-jenis sekuritas dilutif adalah sebagai berikut :

1. Opsi Saham

Opsi saham merupakan kontrak yang diterbitkan oleh investor untuk dijual kepada investor lain, dimana kontrak tersebut memberikan hak bagi penerimanya untuk menjual atau membeli suatu saham perusahaan yang menjadi dasar perdagangan opsi tersebut dalam jumlah dan pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya, serta berlaku dalam periode tertentu. Opsi saham dibagi atas dua jenis yaitu opsi beli dan opsi jual. Opsi saham menjadikan jumlah saham perusahaan yang beredar menjadi bertambah sehingga menurunkan EPS.

Opsi saham berhubungan dengan tanggal-tanggal sebagai berikut :

- a) Tanggal pemberian opsi merupakan tanggal kesepakatan mengenai persyaratan program kompensasi berbasis saham
- b) Tanggal memperoleh hak kompensasi merupakan tanggal karyawan memperoleh hak atas manfaat dari program kompensasi

- c) Tanggal eksekusi merupakan tanggal karyawan menggunakan haknya yaitu menukar opsi yang dimilikinya dengan saham biasa
- d) Tanggal penukaran merupakan tanggal pada hari pertama dimana jumlah lembar saham yang akan diterima karyawan dan harga eksekusi dapat diketahui atau diestimasi
- e) Tanggal kadaluwarsa merupakan tanggal berakhirnya masa berlakunya opsi.

Akuntansi Opsi Saham

- 1) Tanggal pemberian: tidak ada jurnal, cukup dengan memo
- 2) Akhir periode akuntansi selama masa bakti karyawan yang diharapkan:

Beban Kompensasi	xx	
Modal Disetor Opsi Saham		xx

- 3) Tanggal eksekusi:

Kas	xx	
Modal Disetor Opsi Saham	xx	
Modal Saham Biasa		xx
Agio Saham Biasa		xx

- 4) Tanggal Kadaluwarsa

Modal Disetor Opsi Saham	xx	
Modal Disetor Opsi Saham Kadaluwarsa		xx

Contoh :

Pada tanggal 1 Nopember 2021 pemegang saham Chen Company menyetujui program opsi saham kepada lima

eksekutif perusahaan untuk membeli 2000 lembar saham biasa dengan nilai pari \$1. Opsi ini diberikan tanggal 1 Januari 2022 dan dapat digunakan setiap saat selama 10 tahun mendatang. Harga opsi per saham \$60 dan harga pasar pada tanggal hibah \$70 per saham. Total beban kompensasi 2 tahun 2022 dan 2023 sebesar \$220.000

Jurnal yang diperlukan :

- a. Pada tanggal pemberian opsi saham tidak ada jurnal
- b. Mencatat beban kompensasi 2021

Beban kompensasi	\$ 110.000	
Modal disetor opsi saham		\$ 110.000

- c. Mencatat beban kompensasi 2022

Beban kompensasi	\$ 110.000	
Modal disetor opsi saham		\$ 110.000

- d. Jika 20% atau 2000 dari 10.000 opsi digunakan eksekutif Chen pada Tanggal 1 Juni 2025 (3 tahun lima bulan setelah tanggal pemberian), jurnal yang diperlukan

Kas(200x\$60)	\$120.000	
Modal disetor opsi saham	\$ 44.000	
Saham biasa(2000x\$1)		\$ 2.000
Agió Saham (20%x\$220.00=\$44.000)		\$162.000

- e. Jika opsi sisa digunakan eksekutif Chen setelah tanggal kedaluwarsa, yaitu pada tanggal 1 Januari 2030

Modal disetor \$176.000

Opsi Saham

Modal Disetor \$176.000
dari Opsi Saham
kedaluwarsa

2. Waran Saham

Warran adalah sertifikat yang memberikan hak pada pemegangnya untuk memperoleh saham dengan harga tertentu dalam periode yang ditentukan. Opsi ini mirip dengan hak istimewa konversi, warran jika digunakan akan menjadi saham biasa, akan berpengaruh menurunkan EPS, mirip dengan konversi sekuritas konvertibel.

Perbedaan antara sekuritas konvertibel dan warran terletak pada saat penggunaan waran, pemegang harus membayar sejumlah uang tertentu untuk mendapatkan saham.

Penerbitan warran atau opsi untuk membeli saham tambahan biasanya muncul di bawah tiga situasi:

- 1) Saat penerbitan, seperti obligasi atau saham preferen, perusahaan menyertakan warran untuk membuat lebih menarik.
- 2) Setelah penerbitan saham biasa tambahan, pemegang saham yang memiliki preemptive hak untuk membeli saham biasa. Perusahaan dapat mengeluarkan warran sebagai bukti yang benar.
- 3) Perusahaan memberikan warran, sering disebut sebagai opsi saham, kepada eksekutif dan karyawan sebagai bentuk kompensasi.

Warran diterbitkan bertujuan untuk menarik minat investor untuk membeli saham. Biasanya diterbitkan karena perusahaan membutuhkan tambahan modal saham baru. Selain itu, dapat berfungsi sebagai pemanis dari suatu produk investasi yang perusahaan keluarkan untuk menarik dana.

Warran merupakan insentif bagi pemegang saham yang diberikan bersamaan dengan *Right Issue*, agar pemegang saham mau menebus *Right Issuena*. *Warran* merupakan suatu hak dan bukanlah kewajiban. Investor boleh menebusnya dan juga bisa menjual *warran* tersebut kepada investor lainnya yang ingin menebusnya. Bila sebuah *Warran* tidak tertebus, maka akan hangus.

Secara singkat, warran merupakan hak untuk membeli saham. Perusahaan yang menerbitkannya pun haruslah perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di bursa. Sebelum perusahaan menerbitkannya ada sejumlah aturan emisinya yang harus emiten penuhi. *Warran* merupakan produk turunan dari saham, tercipta pertama kali oleh perusahaan Jepang di bursa saham Swiss. Perusahaan Jepang tersebut menciptakan produk *tersebut* dengan tujuan *hedging*. Hingga sekarang, emiten-emiten di bursa saham Indonesia juga sudah banyak yang menerbitkannya sebagai bonus bagi para pemegang saham

Akuntansi Waran Saham

1) Waran Pisah

Waran yang dapat dipisah, waran yang bisa dijual terpisah dari sekuritas lainnya. Ada dua metode harga jual dialokasikan ke waran dan sekuritas lainnya dengan Metode Proporsional atau Inkremental

Metode Proporsional jurnal yang diperlukan :

a. Saat dijual bersama sekuritas lainnya

Kas	Xx	
Diskonto		xx
Utang		
Obligasi		
Utang		xx
Obligasi		
Modal Disetor		xx
Warran		

Atau

Kas	xx	
Modal Saham		xx
Preferen		
Agio Saham		xx
Preferen		
Modal Disetor		xx
Warran		

b. Saat dikonversikan menjadi saham biasa

Kas	xx	
Modal Disetor	xx	
Warran		
Modal Saham		xx
Biasa		
Agio Saham		xx
Biasa		

c. Saat waran sudah kadaluwarsa

Modal	Disetor	xx
Waran		
Modal	Disetor	xx
Waran		
Kadaluwarsa		

Contoh

Pada suatu waktu AT&T menerbitkan obligasi dengan warran yang dapat dipisah berjangka 5 tahun untuk membeli 1 lembar saham biasa nilai pari \$5 seharga \$25 pada saat selembarnya dijual kira-kira \$50 yang memungkinkan menawarkan obligasi pada nilai pari dengan hasil 83/4% sedikit lebih rendah dari suku bunga yang berlaku saat itu. Untuk menentukan nilai kedua sekuritas tersebut dapat ditetapkan 1) nilai obligasi tanpa warran dan 2) nilai warran. Misal obligasi AT & T nilai parinya \$1.000 dijual dengan harga 99 tanpa warran, segera setelah diterbitkan. Nilai pasar warran pada saat itu adalah \$30. Sebelum dijual warran itu tidak mempunyai nilai jual. Alokasi digunakan estimasi nilai pasar, yang umumnya ditetapkan oleh banker investasi atau berdasar nilai relative obligasi serta warran, segera setelah diterbitkan dan diperdagangkan. Harga yang dibayar untuk 10 obligasi bernilai \$1.000 yang dilampirkan nilai warran adalah nilai pari \$10.000.000. Diminta dari transaksi warran tersebut alokasi menggunakan metode proporsional :

a. Alokasi ke obligasi dan warran

Nilai wajar obligasi tanpa warran	= \$ 9.900.000
Nilai Wajar warran	<u>= \$ 300.000</u>
Nilai pasar agregat	= \$10.200.000
Dialokasikan ke obligasi	= \$ 9.705.882
Dialokasikan ke warran	<u>= \$ 294.118</u>

Total alokasi = \$10.000.000

Keterangan:

*\$ 9.900.000 = 10.000 x 0,99

*\$ 300.000 = 10.000 x \$30

*\$ 9.705.882 = \$ 9.900.000 / \$10.200.000 x \$10.000.000

*\$ 294.118 = \$ 300.000 / \$10.200.000 x \$10.000.000

b. Pencatatan saat obligasi dijual

Kas \$9.705.882

Diskonto atas Utang \$ 294.118

Obligasi

Utang Obligasi \$10.000.000

c. Pencatatan Warran dijual

Kas \$294.118

Modal Disetor \$294.118

Warran Saham

d. Pencatatan jika 10.000 warran digunakan investor

Kas (10.000 x \$25) \$250.000

Modal Disetor Warran \$294.118

Saham

Saham Biasa \$50.000

(10.000 x \$5)

Agio \$494.118

Saham

Jika metode alokasi menggunakan inkremental maka alokasi sebagai berikut :

Penerimaan lump sum = \$10.000.000

Dialokasikan ke warran = \$ 300.000

Saldo dialokasikan ke obligasi = \$ 9.700.000

2) Waran Lekat

Waran Lekat waran yang tidak dapat dijual terpisah dari sekuritas yang dilekatinya. Harga jual tidak dialokasikan ke waran dan sekuritas lain yang dilekatinya. Seluruh harga jual dipakai sebagai dasar pencatatan hutang atau modal saham preferen.

Contoh 1 :

PT ABCD akan melakukan IPO sebanyak 2 miliar lembar saham dengan harga penawaran Rp1.000 per lembar saham. Bersamaan dengan itu, PT ABCD juga menerbitkan 1 miliar lembar *warran* sebagai hak untuk menebus lembar saham baru di harga tebus sesuai ketentuan. Pada saat IPO, setiap pemegang saham yang memegang 2 lembar saham mendapat 1 hak *warran* secara cuma-cuma.

Contoh 2

Harga saham PT ABC pada tahun 2021 adalah Rp100 per lembar. Pada tahun 2022, perusahaan tersebut menerbitkan waran senilai Rp20 per lembar saham dengan harga eksekusi Rp150. Jika di masa mendatang harga saham PT ABC naik menjadi Rp500 per lembar, maka para pemegang waran tersebut dapat menebus saham PT ABC dengan harga Rp170 saja

3) Obligasi Konversi

Obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan perusahaan untuk diperjualbelikan kepada masyarakat sebagai investor. Terdapat obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham, jika memenuhi suatu persyaratan. Obligasi konvertibel merupakan obligasi yang diterbitkan perusahaan dan dapat dikonversi menjadi saham. Selain obligasi konversi terdapat juga utang konvertibel, yaitu utang jangka panjang tanpa jaminan yang diterbitkan perusahaan dan dapat dikonversi menjadi saham

Obligasi konvertibel merupakan surat utang yang memberikan sifat opsi bagi pemegangnya untuk mengonversikannya menjadi saham biasa perusahaan setelah, tanggal tertentu, setelah surat utang dikeluarkan pada rasio pertukaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu pada saat penerbitan obligasi tersebut. Obligasi konvertibel merupakan sekuritas hibrida yaitu suatu sekuritas yang terdiri dari dua unsur yaitu ekuitas dan utang.

Terdapat beberapa alasan bagi perusahaan untuk mengeluarkan utang konversi. Pertama, meningkatkan permodalan perusahaan dengan kemungkinan mengeluarkan saham dalam jumlah yang lebih kecil. Kedua, fitur konversi yang melekat pada obligasi dapat berfungsi sebagai pemanis yang berdampak pada tingginya permintaan atas obligasi tersebut dan turunya biaya modal dari pengeluaran obligasi tersebut.

Jenis Obligasi Konversi

obligasi konversi meliputi obligasi tukar, obligasi wajib konversi, Saham Preferen yang Dikonversi, Obligasi Konversi Bersyarat Saham Preferen Konversi dan Kompensasi Berbasis Saham, masing masing penjelasannya sebagai berikut :

1. Obligasi Tukar merupakan pinjaman dana yang diberikan investor obligasi dilakukan dengan tujuan dana obligasi dikonversi menjadi saham perusahaan penerbit obligasi sesuai syarat dan perjanjian.
2. Obligasi Wajib Konversi merupakan obligasi dengan kewajiban yang harus dipenuhi investor yaitu mengubah obligasi menjadi saham saat jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo obligasi wajib konversi biasanya singkat, namun dengan tingkat pengembalian yang cenderung tinggi.

3. Saham Preferen yang Dikonversi merupakan Saham preferen yang dapat dikonversi merupakan sekuritas hibrida yang memberikan opsi kepada pemegangnya untuk mengubah saham preferen mereka menjadi saham biasa pada tanggal yang ditentukan. Investor memilih untuk saham preferen konvertibel karena dapat berpartisipasi ketika terjadi apresiasi harga saham.
4. Obligasi konversi Bersyarat merupakan Obligasi yang bisa diubah menjadi saham jika syarat tertentu terpenuhi. Syarat Obligasi Konversi Bersyarat yaitu investor diperkenankan mengkonversi menjadi saham, kalau harga saham di pasar modal mencapai persentase tertentu lebih tinggi dari harga konversi
5. *Reverse Convertible* merupakan obligasi yang memberikan pilihan kepada penerbit obligasi. Pihak penerbit dapat membeli kembali obligasi secara tunai atau melakukan konversi surat utang ke saham. Harga konversi telah ditentukan sebelumnya
6. *Vanilla Convertible Bond* merupakan Obligasi konversi memberikan opsi kepada pemegang obligasi untuk mengkonversi obligasi yang dimiliki ke sejumlah saham. Selama masa berlaku obligasi, pemegang obligasi tetap mendapatkan bunga atau kupon. Saat tanggal jatuh tempo, pemegang obligasi berhak atas nilai nominal obligasi tersebut atau bisa melakukan konversi surat utang menjadi saham

Akuntansi Obligasi Konversi

- a) Saat dijual: sama dengan surat obligasi biasa
- b) Selama pemilikan: dilakukan amortisasi premium /diskonto dengan metode garis lurus/bunga efektif
- c) Saat dikonversikan:

a. Pendekatan Harga Pasar

Dasar pencatatan: harga pasar obligasi atau saham biasa pada saat dikonversikan mana yang dapat ditentukan lebih andal

Diakui laba/rugi pelunasan obligasi = harga pasar – nilai buku obligasi

Rugi/laba diklasifikasikan sebagai elemen biasa, bukan elemen luar biasa.

b. Pendekatan Nilai Buku

Dasar perhitungan: nilai buku obligasi saat dikonversikan

Tidak ada laba/rugi yang diakui

d) Saat dilunasi:

a. sebelum jatuh tempo laba/rugi pelunasan diklasifikasikan sebagai elemen luar biasa

b. pada jatuh tempo tidak ada laba/rugi yang diakui

Contoh 1

Hilton inc menerbitkan obligasi kovertibel bernilai \$1.000 yang bisa dikonversikan menjadi 10 lembar saham biasa dengan nilai pari \$10

Pencatatan pada saat konversi

Utang Obligasi	\$1.000
Premi atas Utang Obligasi	\$ 50
Saham Biasa	\$100
Agio Saham	\$950

Contoh 2

Helloid Inc mempunyai surat utang konvertibel yang beredar dan bernilai pari \$ 1.000.000 yang dapat dikonversi menjadi 100.000 lembar saham biasa dengan nilai pari \$1. Helloid

kepingin mengurangi biaya bunga tahunannya. Untuk itu Helloid setuju membayar pemegang surat hutang konvertibel suatu tambahan sebesar \$80.000 jika mereka akan mengkonversikannya. Dengan asumsi telah terjadi konversi, maka ayat jurnal yang dibuat Helloid Inc adalah :

Biaya Konversi Utang	\$ 80.000	
Hutang Obligasi	\$1.000.000	
Saham Biasa		\$100.000
Agio Saham		\$900.000
Kas		\$ 80.000

4) Saham Preferen Konversi

Saham preferen merupakan saham yang memiliki beberapa preferensi, keutamaan dalam pendistribusian deviden, pembagian aktiva saat likuidasi, dan sering kali juga saham preferen memiliki sifat konversi, dapat diubah menjadi saham biasa. Saham Preferen Konversi adalah sekuritas saham utama yang mana pemilik saham preferen dapat mengonversi menjadi saham biasa dalam jumlah yang telah ditentukan sebelumnya.

Berbeda dengan obligasi konversi yang mana utamanya merupakan sekuritas utang dan opsi konversinya merupakan sekuritas ekuitas, sekuritas saham preferen konversi secara prinsipnya merupakan sekuritas. Oleh karena itu, perusahaan tetap memasukan kedua komponen tersebut dalam ekuitas perusahaan.

Akuntansi Saham Preferen Konversi

- a) Pada saat penjualan: Sama dengan saham preferen biasa
- b) Pada saat Saham preferen konversi dilakukan konversi:
 - a. Dasar pencatatan: nilai buku saham preferen saat dikonversikan
 - b. Tidak ada laba/rugi yang diakui

- c. Nilai nominal saham biasa < nilai buku saham preferen selisihnya masuk agio/premium
- d. Nilai nominal saham biasa > nilai buku saham preferen selisihnya di debit ke Laba Ditahan/Saldo Laba

Contoh

Perusahaan Morse menerbitkan 1.000 saham preferen konversi yang memiliki nilai nominal sebesar \$1 per saham. Saham yang diterbitkan seharga \$200 per saham. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut.

Kas (1000x\$200)	\$200.000	
Saham Preferen(1000x\$1)		\$10.000
Agio Saham Preferen		\$199.000

Jadi, jurnal atas konversi saham preferen Perusahaan Morse oleh investor menjadi 500 lembar saham biasa dengan harga \$2 perlembar:

Saham Preferen	\$1.000	
Agio Saham Preferen	\$199.000	
Saham Biasa		\$10.000
Agio Saham Biasa		\$190.000

Jika saham preferen tersebut bisa dikonvesikan ke saham biasa sebanyak 900 lembar dengan nilai nominal \$ 250 per lembarnya, jurnal atas konversi saham preferen Perusahaan Morse sebagai berikut:

Saham Preferen	\$1.000	
Agio Saham Preferen	\$199.000	
Laba Ditahan	\$25.000	
Saham Biasa		\$225.000

Jika saham preferen tersebut bisa dikonvesikan ke saham biasa dibeli \$ 410.000 per lembarnya, jurnal atas konversi saham preferen Perusahaan Morse sebagai berikut:

Saham Preferen	\$1.000	
Agio Saham Preferen	\$199.000	

Laba Ditahan	\$210.000	
Kas		\$410.000

4.3 Program Kompensasi Berbasis Saham

Kompensasi berbasis saham merupakan imbalan yang diberikan perusahaan pemaso barang atau jasa yang dapat mencakup pihak karyawan dan non karyawan yang mana kompensasi tersebut berbentuk saham atau pengakuan kewajiban yang jumlahnya ditentukan berdasarkan pada harga saham atau instrumen ekuitas perusahaan.

Akuntansi kompensasi berbasis saham, langkahnya pertama menentukan beban kompensasi: dengan metode nilai wajar dan kedua Mengalokasi beban kompensasi: selama periode karyawan bekerja

Contoh:

PT ABC merencanakan pemberian kompensasi kepada 10 anggota direksi untuk membeli saham masing-masing sebanyak 1000 lembar dengan nilai par Rp 600. Opsi diberikan tanggal 1 Januari 2021 dan dapat digunakan selama 6 tahun ke depan. Harga opsi per lembar saham adalah Rp 2000, dan harga pasar saham adalah Rp 3000 per lembar. Nilai wajar beban kompensasi adalah Rp 16 juta. Perkiraan masa bakti (expected period of benefit) direksi adalah 2 tahun lagi.

- a. Pencatatan beban kompensasi untuk 31 Desember 202 dan 31 Desember 2022

Beban kompensasi	Rp 8.000.000
Agió saham-opsi	Rp 8.000.000
(16 juta / 2 thn)	

- b. Pencatatan saat direksi menggunakan 40% hak opsi (4.000 lembar) tanggal 25 Februari 2024

Kas (4.000 x Rp 2.000)	Rp 8.000.000
Agió saham - opsi (40% x 16jt)	Rp 6.400.000
Saham biasa (4.000 x Rp 600)	Rp 2.400.000
Agió saham - biasa	Rp 12.000.000

- c. Pencatatan ketika direksi tidak menggunakan hak opsi sampai tanggal kadaluarsa (1 Januari 2027)

Agió saham - opsi (60% x 16jt)	Rp 9.600.000
Agió saham - opsi kadaluarsa	Rp 9.600.000

Akuntansi kompensasi saham untuk Saham Terikat karena Perusahaan memberikan saham kepada karyawan dengan syarat saham tersebut tidak dapat dijual, dipindahtangankan, atau dijamin sampai kondisi tertentu terpenuhi. Jika dilanggar, maka harus ditebus beserta dividen yang telah diterima. Kelebihan saham terikat dibandingkan opsi saham : 1) tidak akan menjadi percuma berapapun harga saham di pasar memberikan pengurangan ekuitas lebih sedikit kepada pemegang saham dan 2) Menyelaraskan tujuan karyawan dengan tujuan perusahaan.

Akuntansi kompensasi saham, berkaitan Rencana Pembelian Saham oleh Karyawan, yaitu perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk membeli saham dengan potongan harga selama periode waktu tertentu. Rencana ini merupakan program kompensasi dan harus dicatat sebagai beban selama masa kerja.

Pengungkapan Rencana Kompensasi memastikan pengguna laporan keuangan memahami : 1) Sifat dan tingkat penetapan pembayaran berbasis saham yang terjadi selama periode tersebut, 2) Cara penentuan nilai wajar untuk barang/jasa yang diterima atau instrumen ekuitas yang diberikan, dan 3) Dampak transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba/kerugian pada posisi keuangan perusahaan.

4.4 Perhitungan EPS

Pada prinsipnya dalam menghitung EPS Dilusian, perlu dipahami bahwa sekuritas dianggap dilutif bila dikonversi menjadi saham biasa, dapat berpotensi menurunkan laba bersih per saham. Karena ada saatnya tidak dilakukan perhitungan EPS dilusian apabila saham biasa yang dimiliki perusahaan bersifat antidilutif. Maksudnya bahwa efek tersebut tidak berpotensi menurunkan EPS atau bisa jadi malah menaikkan nilai EPS.

EPS menunjukkan laba yang diperoleh oleh setiap lembar saham biasa. Perusahaan melaporkan EPS hanya untuk saham biasa. Ketika laporan laba/rugi berisi komponen laba intermediate, perusahaan harus menyajikan EPS untuk setiap komponen. Perhitungan laba perlembar saham meliputi : a) EPS struktur modal sederhana, yang ada hanya saham biasa; tidak ada sekuritas dilutive, b) EPS struktur modal kompleks, ada sekuritas dilutive, dan c) Dilutif berarti kemampuan untuk mempengaruhi EPS ke arah penurunan (menurunkan EPS karena faktor pembagiya bertambah).

a. EPS Struktur Modal Sederhana

Rumus= Laba Bersih – Dividenham Preferen

Rata-rata Tertimbang Jumlah saham yang Beredar

Tanggal	Keterangan	Jumlah Saham Beredar
1 Januari	Saldo awal	180.000
1 Mei	Dibeli 39.000 lembar Saham Tresuri	30.000
		150.000
1 juli	300.000 saham tambahan (pemecahan saham 3 untuk 1)	300.000
		450.000
1 Desember	Diterbitkan 50.000 saham secara tunai	50.000
31 Desember	Saldo akhir	500.000

Menghitung rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar, sebagai berikut :

Tanggal Beredar	Saham yang beredar (A)	Penetapan kembali (B)	Bagian dari Tahun (C)	Saham Tertimbang
1Jan-1Mei	180.000	3	4/12	180.000
1Mei-1Jul	150.000	3	2/12	75.000
1Jul-1Des	450.000		6/12	225.000
Rata-rata terimbang jumlah saham beredar				480.000

Perusahaan memperoleh laba sebelum pos luar biasa untuk pemegang saham biasa \$580.000 dan bagikan kepada pemegang saham preferen \$100.000. Keuntungan

luar biasa setelah pajak \$240.000. Dari data diatas diminta perhitungan laba per lembar saham adalah sebagai berikut :

Laba	Informasi laba (a)	Saham tertimbang (b)	EPS (c)
Laba sebelum pos luar biasa untuk pemegang saham biasa	\$480.000	480.000	\$1,00
Keuntungan luar biasa setelah pajak	\$240.000	480.000	\$0,50
	\$720.000	480.000	%1,50

b. EPS Struktur Modal Komplek

Struktur modal kompleks terjadi jika perusahaan memiliki Sekuritas konversi, dan Opsi dan waran, yang jika dikonversi atau ditukarkan dapat menurunkan angka EPS, perusahaan dapat melaporkan EPS dasar dan EPS Dilusi.

EPS dilusi mencakup pengaruh seluruh sekuritas adalah dilutif terhadap saham yang beredar selama periode tersebut. Perhitungan EPS dilusi sama dengan perhitungan EPS dasar. Pebedaanya adalah EPS yang dilusi mencakup pengaruh dari seluruh saham biasa dilutive yang potensial, yang telah beredar selama periode berjalan.

Rumus perhitungan EPS Struktur Modal Komplek atau EPS dilusi sama dengan perhitungan EPS dasar dikurang EPS pengaruh seluruh sekuritas dilutif terhadap saham yang beredar selama periode tersebut

Contoh:

Tahun 2013, PT ABC memiliki laba bersih Rp 50 juta dengan rata-rata tertimbang jumlah saham beredar 1 juta lembar. Perusahaan juga memiliki 2 obligasi (A dan B) yang dapat dikonversi beredar.

Obligasi A berjumlah 200 lembar dengan total nilai Rp 60 juta dan memiliki bunga 8 persen. Obligasi diterbitkan pada awal tahun dan dapat dikonversi menjadi 200.000 lembar saham.

Obligasi B berjumlah 100 lembar dengan total nilai 40 juta dan memiliki bunga 7 persen. Obligasi diterbitkan pada 1 September dan dapat dikonversi menjadi 90.000 lembar saham.

Beban bunga tahun 2013 yang dapat diatribusikan ke komponen liabilitas obligasi A sebesar Rp 5 juta dan obligasi B sebesar 3 juta. Tarif pajak efektif adalah 25 persen.

Diminta:

a. Perhitungan penyesuaian laba bersih

Laba bersih	Rp50.000.000
penyesuaian beban bunga setelah pajak	
Obligasi A ($\text{Rp } 5\text{jt} \times [1-.25]$)	Rp 3.750.000
Obligasi B ($\text{Rp } 3\text{jt} \times 4/12 \times [1-.25]$)	Rp 750.000
Penyesuaian laba bersih	Rp 54.500.000

b. Perhitungan penyesuaian rata-rata tertimbang saham beredar

ta tertimbang saham beredar	1.000.000
saham yang diasumsikan akan diterbitkan	
Obligasi A (awal tahun)	200.000
Obligasi B (Tgl penerbitan, 1 September = $4/12 \times 90.000$)	30.000
Penyesuaian saham beredar	1.230.000

c. Perhitungan EPS dasar dan EPS dilusi

Laba bersih Tahun Bejalan	Rp 50.000.000
---------------------------	---------------

EPS dasar (Rp50jt/1 jt lembar saham)	Rp 50
EPS terdilusi (Rp54.5 juta / 1.23 jt lembar saham)	Rp 44,31

Contoh 2 :

Perusahaan ABC mencatatkan laba bersih sebesar Rp5.000.000 selama setahun. Selama periode tersebut, rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar adalah 2.000.000 saham. Perusahaan juga memiliki 50.000 saham preferen konversi yang beredar di mana mereka membayar dividen Rp7 per saham. Masing-masing saham ini dapat dikonversi menjadi 2 saham.

Diminta

a. hitung EPS dasar

Rumus untuk EPS dasar :

EPS dasar = (Laba bersih – Dividen saham preferen) / Rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar

Total dividen saham preferen= Rp350.000 (50.000 x Rp7).

EPS dasar = (5.000.000-350.000) / 2.000.000 = Rp2,33

b. Hitung EPS dilusian

Jika saham preferen konversi menjadi saham biasaya, maka perhitungan EPS dilusian sebagai berikut:

EPS dilusian = (Laba bersih – Dividen saham preferen + Dividen saham preferen konversi)/(Rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar + Saham biasa baru dikeluarkan setelah konversi)

EPS dilusian = (5.000.000 – 350.000 + 350.000) / (2.000.000 + 100.000) = Rp2,38

DAFTAR PUSTAKA

- Admin, Sekuritas Dilutif, 2017
- Nulur Latifah, Akuntansi Keuangan 2, STIE PENA Semarang
- Tri Kurniawati, Akuntansi Keuangan 2, Stie International Golden Institute, Jakarta, 2020
- Ahmad Nasudiin , 2022, Opsi Definisi Karakteristik Jenis Cara Kerja dan Contoh,
- Harris Darmawan, 2017, Waran Pengertian Tujuan Karakteristik dan Contoh,
- Vlora Riyandi, 2022, Convertible Bonds Adalah: Pengertian, Jenis, Kelebihan dan Kekurangan
- Yudhianto Thohirin , 2022, Mengenal Obligasi Konversi yang Dapat Diubah Menjadi Saham
- Irsyad Dwi Martani, Akuntansi Keuangan 2, Departemen Akuntansi FEUI, Jakarta
- Ika Puspitasari, dan Herlina Kartika Dewi, Adi Sarana Armada (ASSA) terbitkan obligasi konversi melalui rights issue,2020
- Donald E, Kieso, Weygandt Jerry J, Warfield Terry D. 2017. Akuntansi Keuangan Menengah. Cetakan Kedua. Jakarta: Salemba Empat
- susi Susilawati, Sekuritas Dilutif Akuntansi Keuangan 2, STIE Muhammadiyah Jakarta, 2019

BAB 5

AKUNTANSI UNTUK PAJAK PENGHASILAN

Oleh Nita Andriyani Budiman

5.1 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ke kas negara atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. PPh dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan dari Penghasilan Kena Pajak (PKP). Perusahaan di Indonesia dalam hal penyusunan laporan keuangan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), sedangkan untuk kepentingan pajak berpedoman pada peraturan perpajakan. Adanya perbedaan antara prinsip akuntansi dengan aturan perpajakan mengharuskan manajer perusahaan untuk membuat dua jenis laporan laba rugi, yaitu laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal. Laporan laba rugi komersial disusun berdasarkan PSAK, sedangkan laporan laba rugi fiskal disusun berdasarkan peraturan perpajakan.

Berdasarkan PSAK No. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan, beban pajak dalam penghitungan laba rugi terdiri dari:

1. Pajak Kini (*Current Tax*)

Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas laba kena pajak untuk satu periode. Beban pajak kini harus dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan PKP hasil rekonsiliasi fiskal yang dikalikan dengan tarif pajak, kemudian dibayarkan sendiri oleh wajib pajak, dan

dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku

2. Pajak Tangguhan (*Deferred Tax*)

Pajak tangguhan adalah beban pajak (*deferred tax expense*) atau manfaat pajak (*deferred tax income*) yang dapat memberikan pengaruh menambah atau mengurangi beban pajak tahun bersangkutan. Adanya perbedaan antara PSAK dan peraturan perpajakan mengakibatkan timbulnya:

- a. Aset pajak tangguhan (*deferred tax asset*): jumlah PPh yang dapat dipulihkan pada periode masa depan akibat adanya akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi, perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan akumulasi kredit pajak yang belum dimanfaatkan dalam hal diperbolehkan dalam peraturan perpajakan. Berdasarkan definisi tersebut mengakibatkan adanya pemulihan pada masa mendatang, sehingga menyimpulkan bahwa aset pajak tangguhan merupakan jumlah PPh terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian
- b. Liabilitas pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*): jumlah PPh terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Definisi tersebut menyebabkan adanya konsep tentang pajak terutang pada periode mendatang.

5.2 Perbedaan Permanen dan Perbedaan Temporer

Laporan laba rugi yang disajikan perusahaan untuk para pemegang saham dibuat berdasarkan PSAK. Namun, sebagai wajib pajak yang harus melaporkan penghitungan pajaknya kepada otoritas pajak menggunakan peraturan perpajakan dalam membuat laporan laba rugi. Peraturan perpajakan mengharuskan

perusahaan untuk melakukan rekonsiliasi fiskal dengan tujuan menyesuaikan perbedaan konsep dalam pajak dengan konsep dalam akuntansi komersial. Perbedaan tersebut mengakibatkan dua jenis perbedaan, yaitu:

1. Perbedaan Permanen/Tetap (*Permanent Differences*)

Perbedaan permanen disebabkan oleh pengaturan yang berbeda terkait dengan pengakuan penghasilan dan beban antara SAK dengan peraturan perpajakan. Menurut peraturan perpajakan terdapat beberapa penghasilan yang bersifat final dan penghasilan bukan objek pajak, sedangkan secara komersial, penghasilan tersebut dapat diakui sebagai penghasilan. Begitu pula sebaliknya, terdapat pula beberapa beban yang sesuai peraturan perpajakan termasuk dalam beban fiskal yang tidak boleh dikurangkan, sedangkan menurut komersial beban tersebut diperhitungkan sebagai beban. Hal tersebut tidak menimbulkan masalah akuntansi karena tidak diperhitungkan dalam menentukan laba fiskal, namun diperhitungkan dalam laba akuntansi, sehingga perbedaan ini tidak mempengaruhi pajak kini dan pajak tangguhan. Jenis perbedaan tetap, yaitu:

- a. Penghasilan yang telah dipotong PPh final (UU PPh Pasal 4 Ayat 2)
- b. Penghasilan yang bukan termasuk objek pajak (UU PPh Pasal 4 Ayat 3)
- c. Beban yang tidak boleh dikurangkan dalam pajak (UU PPh Pasal 9 Ayat 1)

2. Perbedaan Temporer/Waktu (*Temporary Differences*)

Perbedaan temporer disebabkan karena adanya perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan beban untuk perhitungan laba. Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan peraturan perpajakan terdapat penghasilan atau beban yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode akuntansi sekarang.

Sementara itu, laporan keuangan komersial mengakuinya sebagai penghasilan atau beban pada periode yang bersangkutan. Perbedaan temporer dapat menyebabkan aset atau liabilitas pajak tangguhan. Apabila laba menurut akuntansi (laba komersial) lebih kecil dibandingkan dengan laba menurut pajak (laba fiskal), maka terjadi aset pajak tangguhan, demikian sebaliknya. Contoh aset pajak tangguhan adalah pendapatan diterima dimuka, beban garansi, beban piutang tak tertagih, atau kerugian yang belum direalisasi untuk sekuritas perdagangan, sedangkan contoh liabilitas pajak tangguhan adalah penjualan cicilan, keuntungan yang belum direalisasi untuk sekuritas perdagangan, atau perbedaan metode penyusutan aset tetap.

5.3 Perhitungan Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan

Ilustrasi 1. PT Insani, Tbk mencatat garansi produk selama tahun 2022 sebesar Rp 50.000.000. Klaim garansi yang sebenarnya terjadi sebesar Rp 15.000.000. Tarif pajak adalah 19% dan asumsi selama tahun 2022 terdapat pendapatan sebesar Rp 100.000.000. Untuk tujuan perpajakan, perusahaan akan mengurangi beban garansi tersebut ketika telah benar-benar terjadi, namun akan menjadi akrual pada tahun bersangkutan untuk tujuan pelaporan keuangan.

Keterangan	Laba Komersial	Perbedaan		Laba Fiskal
		Permanen	Temporer	
Pendapatan	100.000.000			100.000.000
Beban garansi	(50.000.000)		35.000.000	(15.000.000)
Laba setelah koreksi	50.000.000		35.000.000	85.000.000

Beban pajak kini dihitung dari tarif pajak dikalikan laba fiskal/PKP dengan hasil sebesar Rp 16.150.000 ($19\% \times \text{Rp } 85.000.000$). Perusahaan juga mencatat aset pajak tangguhan

sebesar Rp 6.650.000 (19% X Rp 35.000.000). Ayat jurnal untuk mencatat beban pajak kini dan aset pajak tangguhan pada 31 Desember 2022 adalah:

Beban pajak penghasilan	Rp 9.500.000
Aset pajak tangguhan	Rp 6.650.000
Liabilitas pajak penghasilan	Rp 16.150.000

Berikut adalah penyajian laporan laba rugi parsial untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022:

PT Insani, Tbk
Laporan Laba Rugi (Parsial)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

Pendapatan	Rp 100.000.000
(-) Beban garansi	<u>Rp 50.000.000</u>
Laba sebelum pajak	Rp 50.000.000
(-) Beban PPh:	
Kini	Rp 16.150.000
Manfaat Tangguhan	<u>(Rp 6.650.000)</u>
Laba bersih	<u>Rp 40.500.000</u>

Ilustrasi 2. PT Insani, Tbk memiliki penjualan cicilan selama tahun 2022 sebesar Rp 400.000.000. Dari penjualan tersebut 60% diantaranya ditagih dan dibayar secara tunai, dan sisanya ditagih pada tahun 2023. Tarif pajak adalah 19% dan asumsi selama tahun 2022, beban perusahaan hanya beban PPh. Untuk tujuan perpajakan, perusahaan menggunakan dasar kas, sedangkan untuk pelaporan keuangan menggunakan dasar akrual untuk pengakuan pendapatan penjualan, sehingga untuk sisa yang ditagih 2023, pendapatannya tidak dikenakan pajak di tahun 2022.

Keterangan	Laba Komersial	Perbedaan		Laba Fiskal
		Permanen	Temporer	
Pendapatan	400.000.000		(160.000.000)	240.000.000
Beban PPh	(0)			(0)
Laba setelah koreksi	400.000.000		(160.000.000)	240.000.000

Beban pajak kini dihitung dari tarif pajak dikalikan laba fiskal/PKP dengan hasil sebesar Rp 45.600.000 (19% X Rp 240.000.000). Perusahaan juga mencatat liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp 30.400.000 (19% X Rp 160.000.000). Ayat jurnal untuk mencatat beban pajak kini dan liabilitas pajak tangguhan pada 31 Desember 2022 adalah:

Beban pajak penghasilan	Rp 76.000.000
Liabilitas pajak penghasilan	Rp 45.600.000
Liabilitas pajak tangguhan	Rp 30.400.000

Berikut adalah penyajian laporan laba rugi parsial untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022:

PT Insani, Tbk

Laporan Laba Rugi (Parsial)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

Laba sebelum pajak		Rp 400.000.000
(-) Beban PPh:		
Kini	Rp 45.600.000	
Tangguhan	<u>Rp 30.400.000</u>	<u>Rp 76.000.000</u>
Laba bersih		<u>Rp 324.000.000</u>

5.4 Ilustrasi Komprehensif Pajak Tangguhan

PT Insani, Tbk memulai operasionalnya pada tahun 2022. Untuk tahun pajak 2022, perusahaan melaporkan laba sebelum pajak sebesar Rp 900.000.000. Berikut adalah data yang berkaitan dengan perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal perusahaan selama tahun 2022:

1. Tahun 2022 terdapat pendapatan bunga obligasi pemerintah sebesar Rp 25.000.000
2. Perusahaan mengakui penjualan cicilan dalam laporan keuangan sebesar Rp 400.000.000 untuk 4 tahun. SPT tahun 2022 mengakui sebesar Rp 100.000.000 dan sisanya dibayarkan sebesar Rp 100.000.000 per tahun selama 3 tahun kedepan
3. Perusahaan mengeluarkan beban gaji sebesar Rp 280.000.000, termasuk didalamnya terdapat beban gaji yang dibayarkan perusahaan untuk sopir pribadi direktur perusahaan sebesar Rp 30.000.000
4. Pendapatan bunga deposito tahun 2022 sebesar Rp 10.000.000 yang dikenakan PPh final
5. Penyusutan aset tetap yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah Rp 82.500.000, sedangkan yang dilaporkan dalam laporan pajak adalah sebesar Rp 90.000.000
6. Dalam tahun 2022, perusahaan membayar sanksi administrasi karena terlambat membayar dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 sebesar Rp 550.000
7. Perusahaan memberikan garansi produk sebesar Rp 14.550.000 dan jumlah yang telah dibayarkan pada tahun 2022 sebesar Rp 10.000.000
8. Perusahaan menerapkan metode pencadangan piutang atas piutang tak tertagih. Terdapat beban piutang tak tertagih sebesar Rp 10.000.000 dan perusahaan melaporkan pula terdapat penghapusan piutang yang tak tertagih Rp 5.000.000

Diminta:

Buatlah jurnal dan laporan keuangan PT Insani, Tbk untuk tahun 2022!

Jawab:

Laba sebelum pajak/laba akuntansi Rp 900.000.000

Perbedaan permanen:

Pendapatan bunga obligasi (Rp 25.000.000)

Beban gaji Rp 30.000.000

Pendapatan bunga deposito (Rp 10.000.000)

Sanksi administrasi Rp 550.000

Perbedaan temporer:

Penjualan cicilan (Rp 300.000.000)

Penyusutan aset tetap (Rp 7.500.000)

Beban garansi Rp 4.550.000

Piutang tak tertagih Rp 5.000.000

Laba kena pajak/laba fiskal Rp 597.600.000

Beban PPh (19% X Rp 597.600.000) Rp 113.544.000

Ayat jurnal untuk mencatat beban pajak kini dan liabilitas pajak tangguhan pada 31 Desember 2022 adalah:

Beban pajak penghasilan-kini Rp 113.544.000

Liabilitas pajak penghasilan Rp 113.544.000

Beban pajak penghasilan-tangguhan *Rp 57.000.000

Liabilitas pajak tangguhan-lancar **Rp 19.000.000

Liabilitas pajak tangguhan-tidak lancar ***Rp 38.000.000

*19% X (Rp 400.000.000 – Rp 100.000.000)

**19% X Rp 100.000.000

***19% X Rp 200.000.000

Beban pajak penghasilan-tangguhan *Rp 1.425.000

Liabilitas pajak tangguhan-tidak lancar Rp 1.425.000

*19% X Rp 7.500.000

Aset pajak tangguhan-lancar *Rp 864.500

Manfaat pajak penghasilan-tangguhan Rp 864.500

*19% X Rp 4.550.000

Aset pajak tangguhan-lancar	*Rp 950.000
Manfaat pajak penghasilan-tangguhan	Rp 950.000
*19% X Rp 5.000.000	

Pencatatan ayat jurnal dapat digabung menjadi satu jurnal sebagai berikut:

Beban pajak penghasilan-kini	Rp 113.544.000
Beban pajak penghasilan-tangguhan	Rp 56.610.500
Aset pajak tangguhan-lancar	Rp 1.814.500
Liabilitas pajak penghasilan	Rp 113.544.000
Liabilitas pajak tangguhan-lancar	Rp 19.000.000
Liabilitas pajak tangguhan-tidak lancar	Rp 39.425.000

Penyajian laporan keuangan PT Insani, Tbk pada tahun 2022 adalah:

PT Insani, Tbk
Laporan Laba Rugi (Parsial)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

Laba sebelum pajak	Rp 900.000.000
(-) Beban PPh:	
Kini	Rp 113.544.000
Tangguhan	<u>Rp 56.610.500</u>
Laba bersih	<u>Rp 729.845.500</u>

PT Insani, Tbk
Laporan Posisi Keuangan (Parsial)
Per 31 Desember 2022

Aset:

Aset lancar:

Aset pajak tangguhan	Rp 1.814.500
----------------------	--------------

Liabilitas:

Liabilitas jangka pendek:

Liabilitas pajak penghasilan	Rp 113.544.000
Liabilitas pajak tangguhan	Rp 19.000.000

Liabilitas jangka panjang:

Liabilitas pajak tangguhan	Rp 39.425.000
----------------------------	---------------

5.5 Perlakuan Akuntansi Pajak Tangguhan

Perlakuan akuntansi pajak tangguhan diatur dalam PSAK No. 46. Akuntansi pajak yang ditangguhkan terdiri dari empat kegiatan, yaitu:

1. Pengakuan

Pengakuan aset dalam liabilitas pajak yang ditunda pada laporan keuangan artinya bahwa perusahaan yang menyusun laporan keuangan dapat mengakui nilai tercatat pada aset atau akan melunasi nilai tercatat pada liabilitas. Perbedaan temporer yang dapat menambah jumlah pajak di masa depan akan diakui sebagai liabilitas (utang pajak yang ditangguhkan dan perusahaan harus mengakui adanya beban pajak tangguhan)

2. Pengukuran

Pengukuran pajak yang ditangguhkan akan dihitung dengan menggunakan tarif yang berlaku di masa yang akan datang. Pengukuran atas liabilitas dan aset pajak yang ditunda harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan diterapkan

pada periode dimana aset direalisasi atau liabilitas dilunasi, yaitu dengan tarif pajak yang secara substansif berlaku pada tanggal laporan keuangan. Secara teknis, pengakuan liabilitas dan aset pajak yang ditunda ini dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan serta perbedaan temporer (waktu) antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang dikenakan pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku

3. Penyajian

Aset dan liabilitas pajak yang ditangguhkan harus disajikan secara terpisah dari aset atau liabilitas pajak kini serta disajikan dalam unsur tidak lancar dalam laporan posisi keuangan. Sementara beban atau penghasilan (manfaat) pajak yang ditangguhkan harus disajikan terpisah dengan beban pajak kini dalam laporan laba rugi perusahaan. Aset pajak dan liabilitas pajak harus disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya dalam laporan posisi keuangan. Aset dan liabilitas pajak yang ditunda harus dibedakan dari aset pajak kini dan liabilitas pajak kini. Apabila dalam laporan keuangan suatu perusahaan, aset dan liabilitas lancar disajikan terpisah dari aset dan liabilitas tidak lancar, maka aset (liabilitas) pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset (liabilitas) lancar

4. Pengungkapan

Pengungkapan pajak yang ditangguhkan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan diantaranya:

- a. Jumlah pajak kini dan pajak yang ditunda berasal dari transaksi-transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas
- b. Penjelasan mengenai hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dalam salah satu atau kedua bentuk berikut:

1. Rekonsialisasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi serta tarif pajak yang berlaku dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku
 2. Rekonsialisasi antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku
- c. Perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya
- d. Jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun berikut dan diakui sebagai aset pajak yang ditangguhkan pada laporan posisi keuangan

DAFTAR PUSTAKA

IAI. 2022. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

BAB 6

AKUNTANSI UNTUK PENSIUN DAN MANFAAT PURNAKARYA

Oleh Rr. Suprantiningrum

6.1 Pendahuluan

Dana Pensiun berperan sangat penting dalam pembangunan baik dari segi ekonomi maupun kesejahteraan sosial. Melalui program pensiun diharapkan tabungan masyarakat dapat terakumulasi dan dikelola secara bijak dan aman agar kesejahteraan pensiunan terjamin dan kebutuhan pembiayaan pembangunan dapat terpenuhi secara berkesinambungan. Sehubungan dengan itu Pada tanggal 20 April 1992 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Berdasarkan revisi PSAK 18 tentang Akuntansi Dana Pensiun yang telah disahkan pada tanggal 22 Oktober 2010 menyatakan bahwa Program Manfaat Purnakarya kadang dikenal dengan berbagai istilah, seperti “Program Pensiun” atau “Tunjangan Hari Tua”. Tetapi, seringkali masyarakat menyebutnya dengan Program Pensiun (Pension Plan). Program pensiun ini adalah suatu perjanjian oleh karyawan atau calon penerima pensiun dengan pemberi kerja atas jasa-jasa yang telah diberikan selama bekerja. Program pensiun ini kemudian dikelola oleh 13 suatu entitas lain daripada perusahaan tersebut yakni yang disebut Yayasan Dana Pensiun atau yang kini berkembang disebut dengan Perusahaan Dana Pensiun.

Program manfaat purnakarya menjadi dambaan setiap karyawan di suatu instansi atau perusahaan. Dengan adanya

program tersebut diharapkan kesejahteraan karyawan akan tetap didapat dan kebutuhan hidup pribadi dan keluarganya dapat tercukupi walaupun karyawan tersebut telah purna karya karena usia maupun disebabkan oleh faktor tertentu, semisal berhenti bekerja karena adanya kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak dapat bekerjanya karyawan tersebut.

6.2 Pengertian Program Pensiun (*Pension Pland*)

Donald E. Kieso *et al* (2008), menerangkan bahwa: “Program pensiun (*pension plan*) adalah sebuah perjanjian yang menetapkan bahwa pemberi kerja atau majikan memberikan tunjangan (pembayaran) kepada para karyawan setelah mereka pensiun atas jasa-jasa yang mereka berikan ketika masih bekerja”.

Mathis dan Jackson (2009), menyatakan bahwa: “Program pensiun adalah tunjangan pensiun yang ditetapkan dan didanai oleh pengusaha dan karyawan”.

Wursanto (2001), menyatakan bahwa: “Program pensiun adalah pembayaran dana pensiun yang diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan kepada karyawan atas jasa-jasanya selama bekerja”.

6.3 Pengertian Dana Pensiun (*Pension Fund*)

Dana Pensiun berperan sangat penting dalam pembangunan baik dari segi ekonomi maupun kesejahteraan sosial. Beberapa sumber memberikan pengertian dana pensiun (*pension fund*) sebagai berikut:

Scott, (1988) mendefinisikan dana pensiun adalah: “*Pension funds is a financial institution that controls assets and disburses income to people after they have retired from gainful employment*”.(dana pensiun adalah lembaga keuangan yang mengontrol aset dan pendapatan disalurkan kepada orang-orang setelah mereka pensiun dari pekerjaan yang menguntungkan).

Abdulkadir Muhammad dan Rita Muniarti, (2000) pengertian dana pensiun adalah: Dana yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, mengalami cacat, atau meninggal dunia.

PSAK Nomor 18 (2010) mendefinisikan dana pensiun sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. perjanjian ini mengatur pemilik perusahaan melakukan pembayaran kepada karyawan apabila karyawan tersebut berhenti bekerja. manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang akan dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara-cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Ditetapkan dalam UU No 11 / 1992, dana pensiun mempunyai status badan hukum. Manfaat pensiun merupakan bagian dari penghasilan karyawan yang dijanjikan pemberi kerja, Tetapi pembayarannya ditunda sampai dengan karyawan tersebut pensiun.

6.4 Landasan Hukum Operasional Dana Pensiun

1. **Tenaga Kerja** Program yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu jamsostek karyawan swasta dan BUMN. Dipegang oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan departemen keuangan memegang peranan dan pengawasan berdasarkan UU No.3/1992.
2. **Taspen (Tabungan Pensiun) Pegawai** baik pegawai negeri sipil dan pensiun swasta yang di pegang oleh Departemen Keuangan berdasarkan (Keputusan Presiden No. 8/1997).
3. **ASABRI** dana pensiun angkatan bersenjata, berada di bawah Departemen Pertahanan berdasarkan (Kepres No. 8/1977).

Dan dari ketiga program memiliki ketentuan hukum yang berbeda-beda. Yang berlandaskan pada UU Dana Pensiun No. 11 tahun 1992. Sedangkan dana pensiun syariah hanya mengacu pada peraturan dana pensiun yang umum dan fatwa MUI yang juga umum.

6.5 Tujuan Umum Program Pensiun

Dari segi ekonomi merupakan upaya pemberi kerja (perusahaan) untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi dan produktif yang diharapkan dapat mengembangkan perusahaan.

Dari segi sosial merupakan wujud tanggung jawab sosial pemberi kerja (perusahaan) kepada karyawan ketika tidak mampu lagi bekerja dan juga kepada keluarga pada saat karyawan meninggal dunia.

6.6 Tujuan Menyelenggarakan Dana Pensiun Bagi Pemberi Kerja :

- a. Memberikan penghargaan kepada karyawan. Agar dimasa pensiun karyawan tetap dapat menikmati hasil kerjanya.
- b. Memberikan rasa aman batiniah bagi karyawan.
- c. Meningkatkan motivasi kerja karyawan.
- d. Meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat dan pemerintah.

Bagi karyawan:

- a. Kepastian memperoleh penghasilan dimasa akan datang(masa pensiun).
- b. Memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi kerja.

Lembaga pengelola dana pensiun:

- a. Mengalokasikan dana pensiun dalam kegiatan investasi.
- b. Turut membantu dan mendukung program pemerintah.

6.7 Tipe Program Pensiun

Ada dua tipe program pensiun yaitu :

1. Program Pensiun Iuran Pasti (*defined contribution plans*)

Program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun (iuran ditanggung oleh perusahaan dan karyawan). Metode Perhitungan:

- Money purchase Saving plan:
- Iuran peserta maksimum 7.5% x gaji dasar
- Iuran pemberi kerja maksimum 12.5% x gaji dasar

Rumus perhitungan PPIP sekaligus :

$$IP = 3 \times FPD \times PDP$$

Rumus perhitungan PPIP bulanan :

$$IP = 3 \times FDe \times PDP$$

Keterangan :

IP : Iuran pasti

FPd : Faktor penghargaan pertahun dalam desimal

FDe : Faktor penghargaan per tahun dalam persentase

PDP : Penghasilan dasar pensiun pertahun

2. Program Pensiun Manfaat Pasti (*Defined benefit plans*)

Program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti (iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gaji)

Rumus perhitungan PPMP sekaligus :

$$MP = FPD \times MK \times PDP$$

Rumus perhitungan PPIP bulanan :

$$MP = FPe \times MK \times PDP$$

Keterangan :

Mp : Manfaat pensiun

FPd : Faktor penghargaan dalam desimal

MK : Masa kerja

PDP : Penghasilan dasar pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir.

Ilustrasi Perhitungan Manfaat Pensiun Normal Bulanan

a/n Sdr. Drs. Andika , M.Si

Nama	Drs. Andika, M.Si
NIP-UMM	1010101212
Tempat/Tanggal Lahir	Semarang, 1 April 1956
Pendidikan	S2
Tahun Masuk	01 April 1987
Masa Kerja s/d April 2021	32 Tahun (Maksimal)
Penghasilan Dasar Pensiun	Rp. 5.000.000,-
Rumus Manfaat Pensiun Normal (MPN) = $FPe \times MK \times PhDP$ = $2,5 \times \text{Masa Kerja} \times PDP$ = $2,5 \times 32 \times \text{Rp. 5.000.000,-}$	Rp. 400.000.000,-
Penerimaan 20% Manfaat Pensiun = $20\% \times \text{Rp. 400.000.000,-}$	Rp. 80,000,000,-
Perhitungan Pajak PPh 21 Final Pajak dikenakan pada : 0% x Rp. 50.000.000,- 5% x Rp. 30.000.000,-	Rp. 0 Rp. 1.500,000
Manfaat Pensiun yang Diterima = Rp. 80.000.000 - Rp. 1.500.000	Rp. 78,500,000
Manfaat Pensiun yang Diterima (bulanan) :	

Manfaat Pensiun Normal $= 80\% \times 2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{PDP}$ $= 80\% \times 2,5\% \times 32 \times \text{Rp } 5.000.000,-$	Rp. 3,200,000
---	---------------

Dari tabel diatas, Bapak Drs. Andika, M.Si menerima Manfaat Pensiun Bulanan sebesar Rp. 3.200.000-, dan berhak Menerima 20% dari total Manfaat Pensiun sebesar Rp. 78.500.000 setelah dikurangi pajak PPh 21 sebesar 5%.

Tabel 6.1 : Beda PPMP dan PPIPI

Aspek Pembeda	Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)	Pprogram Pensiun Iuran Pasti (PPIPI
Manfaat pensiun	Ada kepastian manfaat yang akan diterima	Tidak ada kepastian manfaat yang akan diterima
Iuran	Tidak pasti dan harus dihitung aktuaris	Pasti
Dana awal	Dibutuhkan dana awal	Tidak dibutuhkan dana awal
Pengendalian dana	Kelompok dan actuarial intensif	Perorangan dan administratif intensi
Investasi	Bersifat	Lebih berani

	konservatif	
Kegagalan investasi	Risiko pemberi kerja	Risiko peserta
Portability	Kurangfleksibel	Lebih fleksibel
Penyelenggara	Dana pensiun pemberi kerja	Dana pensiun lembaga kerja
Aktuaris	Mutlak diperlukan	Tidak diperlukan
Besarnya iuran	Dibatasi	Dibatasi
Kekayaan	Dibatasi (110% kewajiban)	Tidak dibatasi
Besarnya manfaat	Dibatasi	Tidak dibatasi
Penarikan	Tidak diperbolehkan, kecuali saat mulai batas pensiun sebesar 20% dari nilai sekarang	Diperbolehkan sebatas iuran sendiri

Sumber : Giri (1997)

6.8 Fungsi Program Pensiun

Menurut Kieso, et al (2002) program pensiun mempunyai 2 (dua) fungsi, yang meliputi:

- a. Fungsi Asuransi Penyelenggara program pensiun mengandung azas kebersamaan sebagaimana halnya dengan program asuransi. Sebagai contoh, seorang Peserta program pensiun yang mengalami cacat atau meninggal dunia karena kecelakaan yang menyebabkan kehilangan pendapatan sebelum memasuki usia pensiun. Kepada peserta tersebut akan diberikan manfaat pensiun sebesar yang dijanjikan atas beban dana pensiun. Lebih lanjut dalam perhitungan besarnya iuran dan manfaat digunakan dasar aktuaria.
- b. Fungsi Tabungan Karena dana pensiun bertugas mengumpulkan dan mengembangkan dana maka dana tersebut merupakan akumulasi dari iuran, kemudian iuran itu akan diperlakukan seperti tabungan. Selanjutnya dana yang terkumpul akan dikembangkan yang nantinya akan digunakan untuk membayar manfaat pensiun peserta

6.9 Klasifikasi Dana Pensiun

Terdapat tiga jenis Dana Pensiun yaitu pertama

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dimana Dana Pensiun yang dapat didirikan oleh perorangan maupun badan/ perusahaan umum
2. Dana Pensiun didirikan Lembaga Keuangan (DPLK) hanya dapat didirikan oleh Bank Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa.

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

Dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau

Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja.

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan, baik Bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Tabel 6.2 : Beda DPPK dan DPLK

Aspek Pembeda	DPPK	DPLK
1. Pendiri	Pemberi kerja atau Mitra pendiri	Pengurus bank dan pengurus perusahaan asuransi
2. Pengawas	Diangkat sendiri terdiri atas : Unsur perusahaan dan karyawan komposisi sama	Diangkat pendiri
3. Pengurus	Diangkat Pendiri	Pengurus adalah pendiri
4. Program yang	Program pensiun manfaat pasti (PPMP)	Program pensiun iuran pasti (PPIP)

Aspek Pembeda	DPPK	DPLK
	• Program pensiun iuran pasti (PPIP) • Program pensiun berdasarkan keuntungan (PPKB)	
5, Keuntungan	• Perbaikan program • Mengurangi iuran perusahaan	Untuk pemegang saham dan beserta
6. Kegagalan investasi	Risiko pemberi kerja	Risiko karyawan risiko
7. Fasilitas pajak	Untuk pemberi kerja dan peserta	Pendiri, pemberi kerja, dan peserta

Sumber : Giri (1997)

Peranan aktuaris

Aktuaris adalah individu yang telah dilatih melalui program jangka panjang untuk menentukan kemungkinan terjadinya masa depan dan dampak keuangannya. dalam industri asuransi aktuaris berfungsi menentukan risiko dan memberikan nasehat dalam penentuan premi dan berbagai kebijakan asuransi. perusahaan membutuhkan bantuan aktuaris untuk membuat prediksi tingkat mortalitas, Turn Over

karyawan, tingkat laba dan bunga, berhenti kerja, gaji masa depan, dan aspek dana pensiun yang lain.

Utang pensiun

Penentuan jumlah utang perusahaan dan utang pensiun yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan. pada umumnya akuntansi lebih setuju mengakui kewajiban pensiun sebagai kewajiban kompensasi ditanggungkan berdasarkan syarat rencana pensiun yang telah ditetapkan.

Ada tiga alternatif pengukuran utang pensiun yaitu :

- a. Kewajiban manfaat tetap (*vested benefit obligation*) : VBO
- b. Kewajiban manfaat akumulasi (*acumulated benefit obligation*) = ABO
- c. Kewajiban manfaat terproyeksi (*proyektif benefit obligation*) = PBO

Berdasarkan VBO, karyawan diberi hak tetap untuk menerima manfaat, Meskipun tidak ada dasar tambahan yang diserahkan. VBO dihitung menggunakan level gaji saat ini, dan hanya menyangkut manfaat tetap. ABO mendasarkan perhitungan jumlah kompensasi ditanggungkan pada jasa yang dilaksanakan karyawan pada semua tahun (manfaat tetap dan tidak tetap). ABO menggunakan level gaji saat ini. Sedangkan PBO, jumlah jasa tetap dan tidak tetap dihitung berdasarkan level gaji masa depan.

Pemilihan pendekatan yang akan digunakan merupakan faktor penting, sebab menyangkut jumlah utang pensiun dan biaya pensiun tahunan Yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Di USA profesi memilih Pendekatan ketiga (PBO), yang merupakan nilai sekarang dari manfaat tetap dan tidak tetap yang terutang berdasarkan pada level gaji masa depan.

6.10 Jenis-jenis Pensiun

- a. **Pensiun Normal**, Pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang telah ditetapkan perusahaan. yaitu usia paling rendah saat karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja dengan memperoleh manfaat pensiun penuh. karyawan umumnya berkisar 55 tahun.
- b. **Pensiun Dipercepat**, Ketentuan pensiun yang mengizinkan peserta pensiun untuk mempercepat pensiun karena suatu hal. misalnya karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan tersebut.
Diberikan kepada karyawan yang meminta pensiun sendiri saat usia pensiun belum mencukupi.
- c. **Pensiun Ditunda**, Ketentuan ini memperkenankan karyawannya yang secara mental dan fisik masih sehat untuk tetap bekerja melampaui usia pensiun normal.
- d. **Pensiun Cacat** , Pensiun yang diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk bekerja.

6.11 Asas dan Norma Dana Pensiun

1. Asas Dana Pensiun

Berdasarkan UU No. 11/1992, Asas-asas dana pensiun yaitu:

- a. Asas keterpisahaan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya
- b. Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan
- c. Asas pembinaan dan pengawasan
- d. Asas penundaan manfaat
- e. Asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun

2. Norma Dana Pensiun

- a. Manfaat pensiun bagi peserta didasarkan atas himpunan iuran ditambah bonus.
- b. Uang pertanggungan bagi peserta yang meninggal/cacat sebelum masa pensiun diberikan penuh.
- c. Nilai tunai bagi peserta yang berhenti sebelum mencapai masa kepesertaan 3 tahun hanya didasarkan atas himpunan iuran sendiri ditambah bonus.
- d. Nilai tunai bagi peserta yang berhenti setelah 3 tahun, perhitungan nilai tunai didasarkan atas himpunan iuran sendiri dan iuran pemberi kerja serta bonus.

Pembayaran manfaat pensiun, uang pertanggungan dan nilai tunai ditujukan kpd peserta/ahli waris peserta yang ditunjuk dalam Sertifikat Dana Pensiun.

6.12 Akuntansi Dana Pensiun

1. Laporan Keuangan Dana Pensiun

- **Jenis laporan: DPPK-PPMP, DPPK-PPIP, DPLK**
- Informasi dalam LK memuat informasi: sumber daya yang dimiliki, perubahan sumber daya, dan akumulasi MP.
- Bentuk laporan keuangan: Neraca, Laporan Aktiva Bersih (LAB), Laporan Perubahan Aktiva Bersih (LPAB), Laporan Arus Kas (LAK), Perhitungan Hasil Usaha, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Neraca

- Merupakan posisi keuangan (aktiva dan kewajiban) pada periode tertentu
- Unclassified Balance Sheet

- Debet: Investasi, SPI, Aktiva Lancar Non Investasi, Aktiva Operasional, Aktiva Lain (PPMP dan PPIP sama).
- Kredit PPMP: Kewajiban Aktuarial, Selisih Kewajiban Aktuarial, Kewajiban diluar KA.
- Kredit PPIP: Kewajiban Manfaat Pensiun, Pendapatan yang Belum Direalisasi, Kewajiban diluar KMP.

Penilaian

- Investasi = harga perolehan (historical cost).
- SPI = selisih antara nilai perolehan dengan nilai wajar. SPI bukan merupakan unsur hasil usaha.
- Aktiva lancar non investasi, Aktiva operasional dan Aktiva lain = harga perolehan.
- Kewajiban aktuarial (PPMP) = aktuaris (nilai estimasi/proyeksi)
- Kewajiban manfaat pensiun (PPIP) = nilai historis (nilai jatuh tempo)
- SKA (PPMP) = selisih antara kewajiban aktuarial dengan aktiva bersih
- Pendapatan belum direalisasi (PPIP) = selisih total aktiva dengan total kewajiban (jumlahnya akan sama dengan SPI)

3. Perlakuan kewajiban aktuarial (PPMP):

- Jika tanggal neraca sama dengan tanggal valuasi aktuarial = Nilai kewajiban aktuarial dineraca didasarkan hasil valuasi aktuarial
- Jika tanggal neraca berbeda dengan tanggal valuasi aktuarial = Nilai kewajiban aktuarial dineraca disajikan sebesar nilai kewajiban aktuarial yang diproyeksikan sesuai tanggal neraca yang terdapat pada laporan aktuaris terakhir.

4. Perlakuan kewajiban manfaat pensiun (PPIP):

Nilai kewajiban MP diperoleh dari iuran (PK dan peserta) + hasil usaha + pengalihan dana dari DP lain – pembayaran manfaat pensiun – pengalihan dana ke DP lain – penarikan iuran (khusus DPLK)

5. Perlakuan selisih kewajiban aktuarial (SKA)

- Hanya terdapat pada PPMP
- SKA disajikan sebesar kenaikan (penurunan) aktiva bersih ditambah (dikurang) penyesuaian nilai kewajiban aktuarial
- Penyesuaian nilai kewajiban aktuarial disajikan sebesar selisih antara kewajiban aktuarial dalam laporan keuangan terakhir dengan kewajiban aktuarial dalam laporan periode sebelumnya.

6. Laporan Aktiva Bersih

- Informasi tentang jumlah aktiva yang tersedia untuk membayar kewajiban MP
- Komponen LAB: (1) Investasi (2) Aktiva lancar non investasi (3) Aktiva operasional (4) Aktiva lain (5) Kewajiban diluar kewajiban aktuarial / kewajiban MP
- Penilaian komponen LAB :
 - Investasi dinilai dengan nilai wajar
 - Deposito dan deposito on call nilai wajarnya adalah nilai nominal
 - Sertifikat deposito, SBI, dan SPH > 1 thn nilai wajarnya adalah nilai tunai
 - Saham, obligasi dan surat berharga pemerintah nilai wajarnya tergantung dari jenis klasifikasinya
 - Reksa dana dan unit penyertaan investasi kolektif nilai wajarnya adalah nilai aktiva bersih

- Penempatan langsung nilai wajarnya adalah nilai appraisal atau ekuitastanah, bangunan sert
- Tanah dan bangunan nilai wajarnya adalah nilai appraisal
- Komponen aktiva selain investasi nilainya sama dengan komponen nilai neraca

7. Program Pensiun Iuran Pasti

- Penjelasan atas kegiatan penting Dana Pensiun selama suatu periode pelaporan dan dampak setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun
- Laporan tentang transaksi dan kinerja investasi selama periode pelaporan dan posisi keuangan Dana Pensiun pada akhir periode pelaporan
- Penjelasan mengenai kebijakan/arahan investasi

8. Program Pensiun Manfaat Pasti

- Penjelasan mengenai kegiatan penting selama suatu periode pelaporan dan dampak dari setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun
- Laporan tentang transaksi dan kinerja investasi selama periode pelaporan dan posisi keuangan Dana Pensiun pada akhir periode pelaporan
- Penjelasan mengenai kebijakan/arahan investasi
- Perhitungan kewajiban aktuarial berdasarkan laporan aktuaris terakhir

9. Laporan Keuangan Dana Pensiun

- a. Laporan aset bersih
- b. Laporan perubahan aset bersih
- c. Neraca
- d. Perhitungan hasil usaha
- e. Laporan arus kas
- f. Catatan atas laporan keuangan

10. Laporan Perubahan Aktiva Bersih

- Informasi tentang perubahan aktiva bersih yang tersedia untuk membayar MP dan menguraikan penyebab perubahannya (tambah atau kurang)
- Komponen LPAB:
 - Penambahan aktiva bersih: hasil investasi, peningkatan/penurunan investasi, iuran, pendapatan lain-lain, dan pengalihan dari DP lain.
 - Pengurangan aktiva bersih: beban investasi, beban operasional, beban diluar inv & opr, manfaat pensiun, pajak penghasilan, dan pengalihan ke dp lain.

11. Laporan Hasil Usaha

- Laporan yang menggambarkan hasil usaha selama periode tertentu
- Komponen LHU:
 - Pendapatan investasi: bunga, dividen, sewa, laba/rugi pelepasan investasi, dan pendapatan investasi lain.
 - Beban investasi: beban transaksi, beban pemeliharaan tanah & bangunan, beban penyusutan bangunan, beban manajer investasi, dan beban investasi lain.
 - Beban operasional: gaji, kantor, pemeliharaan, penyusutan, jasa pihak ketiga, dan beban operasional lainnya
 - Pendapatan dan beban lain-lain: bunga keterlambatan iuran, laba/rugi penjualan aktiva lain-lain/operasional, pendapatan diluar inv., dan beban lain diluar beban ivestasi dan operasional

12.Laporan Arus Kas

- Laporan yang menggambarkan penerimaan dan penggunaan kas. Disusun dengan metode langsung
- Komponen LAK:
 - Arus kas dari kegiatan investasi (penerimaan: bunga, dividen, sewa, investasi lain, pelepasan investasi. Pengeluaran: penanaman investasi, pembayaran beban investasi)
 - Arus kas dari kegiatan operasional (penerimaan: penjualan aktiva inv & opr, pendapatan diluar inv. Pengeluaran: pembayaran beban operasional, pembelian aktiva operasional, beban operasional lain, dan pajak penghasilan)
 - Arus kas dari kegiatan pendanaan (penerimaan: iuran normal dan untuk PPMP tambahan, penerimaan bunga keterlambatan, pengalihan dari DP lain. Pengeluaran: manfaat pensiun dan pengalihan ke DP lain)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, Rilda Murniati. 2000. Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan. Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama.*
- Dwi Martani, 2010. PSAK 18 Program Purnakarya (Revisi 2010) Retirement Benefit Plans, Pelaporan. <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/PSAK-18-DANA-PENSIUN-detail-260911.pdf>
- Giri, Efraim Ferdinan. 1997. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Yogyakarta : Unit penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Hery. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Dewi, Hayuningtyas Pramesti, Fenny Dwi Lestari. 2016. Akuntansi Dana Pensiun Program Manfaat Pasti Terhadap Laporan Keuangan Studi Pada Dana Pensiun Bank Indonesia (DAPENBI). <https://ojs.ekonomi-un kris.ac.id/index.php/JABK/article/view/51>.
- Kieso, Donald E. dan Jerry J. Weygandt. 2008. *Akuntansi Intermediate. Jilid 3*. Jakarta : Erlangga
- Robert L. Mathis. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Salemba empat.
- Skousen, K Fred et.all. 2005. *Intemidiate Accounting*. Jakarta : Salemba Empat
- Sutjipto Ngumar. 2018. Akuntansi Dana Pensiun DI Indonesia. <https://www.researchgate.net/journal/EKUITAS-Jurnal-Ekonomi-dan-Keuangan-2548-298X>
- Undang-Undang Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun. <file:///C:/Users/Administrator/Downloads/UU%20Nomor%2011%20Tahun%201992.pdf>
- Warren, Reeve ,Fess. 2006. *Accounting 21st Edition*. Jakarta : Salemba Empat

Wursanto .2001. Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia.
Yogyakarta. PT. Kanisius

BAB 7

AKUNTANSI UNTUK LEASE

Oleh Novia Rizki

7.1 Pengertian

Lease atau lebih dikenal dengan sewa memiliki arti sebagai sebuah perjanjian bisnis antara *lessor* (pemilik properti/pesewa) dan *lessee* (penyewa properti), dimana hak pengendalian penggunaan properti diberikan kepada lessee dalam jangka waktu tertentu dan lessor berhak menagih sejumlah biaya untuk hal tersebut. Beberapa contoh properti yang sering dijadikan objek dalam leasing adalah komputer, mesin produksi, kendaraan, alat berat konstruksi, pesawat, gedung, dan lain sebagainya.

Bab ini akan menjelaskan kontrak sewa yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengatur *leasing* dalam PSAK 73: Sewa, yang merupakan adopsi dari *Annual Improvements to IFRSs 2018-2020* tentang Amandemen terhadap *IFRS 16 Lease* yang berlaku efektif 1 Januari 2022. Dikecualikan dari peraturan ini antara lain:

1. Sewa dalam rangka eksploitasi atau penambangan mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbaharui (PSAK 64);
2. Sewa asset biologis (PSAK 69);
3. Perjanjian konsesi jasa (ISAK 16);
4. Lisensi kekayaan intelektual yang diberikan oleh pesewa (*lessor*) (PSAK 72);
5. Hak yang dimiliki oleh penyewa dalam perjanjian lisensi (PSAK 19) untuk item seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip, hak paten dan hak cipta.

Pilihan untuk melakukan sewa sering diambil oleh *lessee* untuk melakukan manajemen keuangan. Selain tidak perlu mengeluarkan kas yang besar untuk melakukan pembelian aset, *lessee* juga dapat melakukan penghematan biaya perbaikan dan pemeliharaan karena kadang kala biaya tersebut ditanggung oleh *lessor*. *Leasing* juga dinilai lebih fleksibel karena *lessee* bisa menyesuaikan waktu penyewaan dengan keuangan yang dimilikinya. Pilihan ini juga membuat *lessee* dapat menghindari adanya aset usang dalam perusahaan mereka. Manfaat lainnya yaitu berhungan dengan pajak penghasilan, dimana beban sewa dapat diakui sebagai beban yang mengurangi laba sehingga dapat memperkecil pajak yang harus dibayar (khusus *operating lease*).

Dua jenis *lease* yang dikenal dengan *operating lease* atau sewa operasi dan *financial lease* atau sewa pembiayaan. Perbedaan keduanya terletak pada transfer risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Jika terdapat pengalihan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan atas aset sewa, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sementara sewa operasi tidak akan mentransfer risiko dan manfaat tersebut dari *lessor* kepada *lessee*.

Beberapa kriteria sewa pembiayaan telah dirincikan dalam PSAK 73, sebagai berikut:

1. Sewa mengalihkan kepemilikan aset pada akhir masa sewa kepada *lessee*.
2. Terdapat opsi beli bagi *lessee* pada harga yang cukup rendah dari nilai wajar aset. Opsi beli dapat di ambil pada tanggal yang telah ditentukan di kontrak.
3. Masa sewa adalah Sebagian besar dari umur ekonomis aset walaupun kepemilikan aset belum berpindah kepada *lessee*.
4. Nilai sewa secara substansial mencakup nilai wajar aset sewa pada tanggal insepasi.

5. Aset sewa bersifat khusus sehingga hanya penyewa yang dapat menggunakannya tanpa modifikasi khusus.

Selain beberapa kriteria diatas, beberapa kriteria tambahan berikut ini juga dapat mengindikasikan suatu sewa menjadi sewa pembiayaan:

1. Jika *lessee* membatalkan sewa dan timbul kerugian, maka ditanggung oleh *lessee*.
2. Keuntungan atau kerugian nilai wajar terutang pada *lessee*.
3. *Lessee* dapat melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan harga yang lebih rendah dari harga sewa pasar.

7.2 Akuntansi Lessee

Dari dua kriteria *lease* yang telah disebutkan sebelumnya, *lessee* harus mengakui seluruh sewa sebagai sewa hak guna atau financial *lease*, kecuali untuk sewa dengan jangka pendek dan aset sewa memiliki nilai yang rendah, contohnya seperti perangkat computer, sewa mobil untuk periode yang pendek, dan lain sebagainya. Jika sewa memenuhi dua kriteria pengecualian tersebut, *lessee* akan mengakui beban sewa sama seperti beban pada umumnya, yaitu mendebet beban sewa dan mengkredit kas atau utang usaha atau sewa dibayar dimuka jika awalnya pernah dicatat dengan metode harta. *Lessee* boleh tidak mengakui aset hak guna pada kasus tersebut. Jadi tidak ada perubahan dalam laporan posisi keuangan, dan jenis lease ini hanya mempengaruhi laba rugi.

Pencatatan yang lebih kompleks harus dilakukan *lessee* ketika kontrak sewa adalah sewa pembiayaan, dimana *lessee* harus mencatat aset hak guna dan liabilitas sewa sebesar biaya perolehan. PSAK 73 menyebutkan bahwa aset hak guna dicatat berdasarkan biaya perolehan, yaitu:

1. Jumlah pengukuran awal liabilitas sewa

2. Pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima
3. Biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa, dan
4. Estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh *lessee* dalam membongkar atau memindahkan aset sewa, merestorasi tempat dimana aset berada atau merestorasi aset sewa ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, kecuali biaya biaya tersebut dikeluarkan untuk menghasilkan persediaan.

Ketika masa sewa telah dimulai, maka *lessee* mengukur aset hak guna menggunakan model biaya, yaitu aset hak guna diukur dengan nilai perolehannya dikurangi dengan akumulasi depresiasi dan penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali. Model biaya ini dikecualikan bagi properti investasi berdasarkan PSAK 13 dan aset hak guna yang terkait dengan kelas PPE berdasarkan PSAK 16.

Lessee mencatat depresiasi selama masa yang lebih pendek antara masa sewa aset dengan masa manfaat aset sejak awal mula sewa. Namun apabila *lessee* mengambil opsi beli atau aset menjadi milik *lessee* pada akhir masa sewa, maka aset didepresiasi selama awal masa sewa sampai habis masa manfaat ekonominya. Contohnya jika aset disewa sejak tahun 2021 hingga tahun 2031 dengan masa manfaat ekonomi 8 tahun, maka *lessee* harus melakukan depresiasi hingga tahun 2029. Namun apabila masa manfaat aset 12 tahun dan pada tahun 2031 *lessee* mengambil opsi beli, maka aset didepresiasi sampai tahun 2033.

Lessee harus melakukan pencatatan laba rugi dengan mencantumkan bunga atas liabilitas sewa dan pembayaran sewa variabel, yaitu pembayaran yang tidak dimasukkan dalam pengukuran liabilitas sewa. Jika terjadi pengukuran kembali terhadap liabilitas sewa, dimana aset hak guna sudah bernilai nol,

maka nilai sisa pengukuran kembali yang masih harus dibayarkan tersebut dapat dimasukkan dalam laba rugi. Perubahan masa sewa atau terdapat perubahan pada nilai atas opsi untuk membeli aset sewa bisa saja terjadi, maka *lessee* harus mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.

Lessee harus menyajikan terpisah aset hak guna dengan aset lainnya, baik dalam laporan posisi keuangan maupun pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika tidak, *lessee* harus menyajikan aset hak guna dalam pos yang sama dengan aset sewa dan mengungkapkan pos mana aset hak guna tersebut disajikan dalam laporan posisi keuangan. Hal ini juga tidak berbeda jauh dengan liabilitas sewa, dimana liabilitas sewa harus disajikan secara terpisah dengan liabilitas lain. Jika tidak, maka harus diungkapkan di pos mana liabilitas sewa tersebut dimasukkan.

Beban bunga atas liabilitas sewa dan beban depresiasi atas aset hak guna harus disajikan terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dalam laporan arus kas, pembayaran pokok sewa dimasukkan dalam aktivitas pendanaan, sementara itu pembayaran bunga harus disesuaikan lagi dengan persyaratan dalam PSAK 2: Laporan Arus Kas, serta pembayaran sewa operasi dan pembayaran sewa variable yang tidak termasuk pengukuran liabilitas sewa dimasukkan dalam aktivitas pendanaan.

Beberapa hal lainnya yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan selain hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, menurut PSAK 73 adalah pendapatan dari mensubsewakan aset hak guna, penambahan aset hak guna, serta keuntungan atau kerugian dari transaksi jual dan sewa-balik atau lebih dikenal dengan istilah *sale and lease back*. Selain itu, penyewa juga dapat mengungkapkan informasi tambahan baik secara kuantitatif maupun kualitatif agar pengguna laporan keuangan dapat menilai

dampak dari aktifitas sewa. Informasi tersebut seperti sifat aktifitas sewa penyewa, potensi pengeluaran kas masa depan perbatasan atau perjanjian yang timbul dari sewa, dan lain sebagainya.

7.3 Akuntansi *Lessor*

Bisnis *leasing* ternyata tidak hanya ditawarkan oleh perusahaan penyewaan yang terikat saja, namun juga oleh bank dan oleh pihak independen lainnya. Beberapa keuntungan yang ditawarkan bisnis ini bagi *lessor* diantaranya adalah seringkali memberikan margin bunga yang menguntungkan, dapat merangsang penjualan produk dari *lessor*, serta dapat menimbulkan nilai sisa yang tinggi bagi *lessor* pada saat pengembalian aset di akhir masa sewa (Kieso et al., n.d., 2020).

Lessor dapat mengakui kontrak *lease* sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan. Jika sebelumnya telah disebutkan beberapa kriteria sewa pembiayaan, dan jika kontrak sewa tidak memenuhi kriteria tersebut maka *lessor* akan mengakui sewa sebagai sewa operasi.

Jika *lessor* mengakui sewa operasi, maka pendapatan sewa akan diakui secara garis lurus atau atas dasar sistematis lain. *Lessor* harus mengakui beban yang timbul dalam mendapatkan penghasilan sewa, termasuk beban depresiasi karena aset tidak mengalami perpindahan kepemilikan, serta resiko dan manfaat. Beban awal yang timbul atas kontrak sewa juga diakui dengan dasar yang sama seperti dasar pengakuan pendapatan sewa.

Jika *lessor* mengakui sewa pembiayaan, pada awal masa sewa, *lessor* mengakui piutang sewa pembiayaan dan harga pokok penjualan di debit, lalu mengkredit aset sewa dan penjualan. Harga pokok penjualan diukur sebesar nilai aset sewa sebagai dasar perhitungannya. Jika terdapat pembayaran diawal periode sewa, maka akan terdapat penerimaan kas dengan mengkredit piutang sewa pembiayaan. Diakhir tahun yang sama, *lessor* harus mengakui piutang bunga dengan mengkredit pendapatan sewa

pembiayaan. Selanjutnya pada saat diterima pembayaran, maka piutang bunga akan dikredit bersamaan dengan piutang sewa pembiayaan. Namun bila nilai sisa tidak dijamin maka harga pokok penjualan dan pendapatan penjualan dikurangi nilai kini dari nilai sisa yang tidak dijamin.

Nilai sisa dapat dijamin atau tidak dijamin. Hal ini tergantung pada kesepakatan antara *lessor* dan *lessee*. Jika nilai sisa dijamin, maka *lessee* tidak hanya harus mengembalikan aset sewa pada akhir masa sewa, tetapi juga menjamin bahwa aset memiliki nilai sisa pada jumlah tertentu. Namun apabila nilai sisa tidak dijamin, maka *lessee* hanya memiliki kewajiban untuk mengembalikan aset pada akhir masa sewa, sehingga nilai sisa yang tidak dijamin, tidak termasuk dalam pembayaran sewa (Kieso *et al.*, n.d., 2020).

Menurut PSAK 73, untuk sewa pembiayaan, *lessor* mengungkapkan informasi berikut dalam periode pelaporannya:

1. Laba atau rugi penjualan,
2. Penghasilan keuangan atas investasi neto sewa, dan
3. Penghasilan terkait pembayaran sewa variable yang tidak termasuk dalam investasi neto sewa.
4. *Lessor* juga dapat mengungkapkan informasi tambahan baik kuantitatif dan kualitatif yang berguna bagi pengguna laporan keuangan seperti sifat aktivitas sewa menyewa, serta bagaimana *lessor* mengelola resiko, dan lain sebagainya.

7.4 Contoh Soal Sewa Pembiayaan

Perusahaan PT BBL adalah perusahaan yang bergerak dalam kegiatan penyewaan alat berat. PT BBL menyewakan sebuah excavator pada perusahaan PT INTI mulai 1 Januari 2021. Kondisi pada saat kontrak ditandatangani:

1. Jangka waktu sewa adalah lima tahun. Kontrak tidak dapat dibatalkan. Setiap awal tahun sewa yang harus dibayarkan oleh PT INTI adalah Rp 414.222 (basis anuitas).
2. Excavator memiliki nilai wajar Rp 2.000.000 pada awal sewa dengan masa manfaat lima tahun. Nilai sisa dijamin adalah Rp 10.000.
3. Sewa tidak mengandung opsi perpanjangan. Aset kembali ke PT BBL pada akhir masa sewa.
4. Tingkat pinjaman incremental PT INTI adalah 5% pertahun. Aset disusutkan dengan garis lurus.
5. PT BBL menerapkan tarif sewa tahunan untuk memperoleh tingkat pengembalian 4% per tahun.

Kewajiban sewa dan jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset hak-guna sebagai nilai sekarang dari pembayaran sewa PT INTI:

$$= \text{Rp } 414.222 \times 4.62990 (\text{PVF-AD}5,4\%)*$$

$$= \text{Rp } 1.917.806$$

* Nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo 1 selama 5 periode pada 4%

Jurnal yang dicatat oleh PT INTI adalah

1 Januari	Aset Hak Guna	Rp 1.917.806
2021	Liabilitas sewa	Rp 1.917.806
Nilai di atas adalah nilai sekarang dari pembayaran sewa.		

Pembayaran sewa pertama dicatat sebagai berikut:

1 Januari	Liabilitas sewa	Rp 414.222
2021	Kas	Rp 414.222

Nilai diatas adalah nilai sekarang dari pembayaran sewa.

PT INTI Amortisasi Sewa Dasar Anuitas				
Tanggal	Anuitas Pembayaran Sewa	Bunga (4%)	Pengurang Liabilitas Sewa	Liabilitas Sewa
1/1/21				1.917.806
1/1/21	414.222		414.222	1.503.584
1/1/22	414.222	60.143	354.079	1.149.505
1/1/23	414.222	45.980	368.242	781.263
1/1/24	414.222	31.250	382.972	398.291
1/1/25	414.222	15.932	398.291	0
	2.071.110	153.304	1.917.806	

Nilai di atas didapatkan dari:

- Anuitas pembayaran sewa adalah jumlah yang dipersyaratkan dalam sewa.
- Nilai bunga adalah nilai sisa liabilitas sewa dikalikan dengan bunga (4%).
- Pengurang liabilitas sewa adalah anuitas pembayaran sewa dikurangi dengan bunga.
- Nilai akhir liabilitas sewa adalah nilai liabilitas sewa tahun sebelumnya dikurangi dengan pengurang liabilitas sewa.

Jurnal pencatatan bunga tahun pertama:

31 Desember	Beban bunga	Rp 60.143
2021	Liabilitas sewa	Rp 60.143

Selain dapat dicatat sebagai liabilitas sewa, beban bunga yang di debit juga dapat dicatat sebagai utang bunga disisi kredit.

Jurnal pencatatan depresiasi:

31 Desember	Beban depresiasi	Rp 383.561
2021	Aset Hak Guna	Rp 383.561

Saat pembayaran bunga dan sewa di awal tahun maka disusun jurnal sebagai berikut:

1 Januari	Liabilitas sewa	Rp 414.222*
2022	Kas	Rp 414.222

*Rp 414.222 = Rp 60.143 + Rp 354.079

Dari segi BBL sebagai Lessor, pencatatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1 Januari	Piutang sewa pembiayaan	Rp 1.917.806
2021	Aset	Rp 1.917.806
1 Januari	Kas	Rp 414.222
2021	Piutang sewa pembiayaan	Rp 414.222

Jurnal pencatatan pendapatan bunga:

31 Desember	Piutang bunga	Rp 60.143
2021	Pendapatan sewa pembiayaan	Rp 60.143

Jurnal penerimaan kas diawal tahun:

1 Januari	Kas	Rp 414.222
2022	Piutang bunga	Rp 60.143
	Piutang sewa pembiayaan	Rp 354.079

7.5 Sales and Lease Back (Jual dan Sewa Balik)

Seperti namanya, *sales and lease back* adalah transaksi dimana *lessee* menjual terlebih dahulu aset kepada *lessor* dan menyewa kembali aset yang sama pada satu waktu yang sama. Transaksi yang diklasifikasikan sebagai *sales and lease back* adalah ketika transaksi pertama harus dapat diklasifikasikan sebagai transaksi penjualan sesuai dengan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. Menurut PSAK 73 jika nilai wajar imbalan untuk aset tidak sama dengan nilai wajar aset, atau jika pembayaran untuk sewa tidak sama dengan harga pasar, maka entitas melakukan penyesuaian di bawah ini untuk mengukur hasil penjualan pada nilai wajar:

- a. Jika di bawah harga pasar, maka dicatat sebagai pembayaran sewa dibayar di muka; dan
- b. Jika di atas harga pasar, maka dicatat sebagai tambahan pembiayaan yang diberikan oleh pembeli-pesewa kepada penjual-penyewa.

DAFTAR PUSTAKA

- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. 2020. *Intermediate accounting* (4th ed.).
- Wiley. Ikatan Akuntan Indonesia. 2022. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 73: Sewa. Ikatan Akuntan Indonesia.

BAB 8

AKUNTANSI UNTUK PERUBAHAN DAN ANALISIS KESALAHAN

Oleh Yenny Wati

8.1 Perubahan Akuntansi

Kerangka kerja pelaporan telah ditetapkan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB) menghasilkan tiga macam perubahan akuntansi yaitu perubahan prinsip akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, perubahan entitas pelaporan, dan kesalahan-kesalahan pada laporan keuangan. Perubahan prinsip akuntansi merupakan suatu prinsip akuntansi yang diubah menjadi prinsip akuntansi lain, seperti perubahan metode penyusutan aset tetap dari metode saldo menurun ganda menjadi metode garis lurus. Perubahan estimasi akuntansi merupakan perubahan perkiraan masa manfaat aset atau liabilitas, seperti perubahan estimasi periode penyusutan aset.

Perubahan entitas pelaporan dapat diartikan sebagai pelaporan dari suatu jenis entitas berubah menjadi jenis entitas lain, seperti laporan keuangan konsolidasi perusahaan yang mengalami perubahan pada komposisi anak perusahaannya. Kesalahan-kesalahan pada laporan keuangan dapat berupa kesalahan perhitungan, kesalahan pencatatan, dan kesalahan penerapan prinsip dan metode akuntansi. Misalnya, retur tidak diperhitungkan dalam harga pokok penjualan, sehingga perhitungan harga pokok penjualan tidak benar.

8.2 Perubahan Prinsip Akuntansi

Prinsip akuntansi yang tidak sama dengan prinsip akuntansi sebelumnya dapat diterapkan perusahaan karena perusahaan memiliki beberapa pilihan metode penerapannya disebut dengan perubahan prinsip akuntansi. Pelaporan perubahan prinsip akuntansi dapat menggunakan beberapa pendekatan yaitu retrospektif, periode berjalan, dan prospektif. Untuk laporan keuangan dengan restatement secara retrospektif, prinsip baru diterapkan dan laporan keuangan periodik sebelumnya disusun ulang sesuai dengan prinsip baru perusahaan.

Dalam laporan keuangan yang disajikan kembali dengan pendekatan periode berjalan, perusahaan tidak menyajikan kembali laporan keuangan periode sebelumnya. Perubahan yang dilaporkan berdasarkan pendekatan periode berjalan tercermin dalam laporan laba rugi periode berjalan. Untuk pelaporan perubahan dengan pendekatan prospektif, perusahaan tidak dapat melakukan perubahan dengan menerapkan standar baru pada laporan keuangan periode sebelumnya karena perusahaan menganggap laporan keuangan tersebut final menurut standar yang telah disetujui sebelumnya.

Perubahan prinsip akuntansi memiliki efek kumulatif, sehingga perubahan prinsip tercermin dalam laporan laba rugi dengan jumlah efek kumulatif dikurangi pajak penghasilan, serta laporan keuangan tidak perlu dikoreksi pada periode sebelumnya, dan menyajikan kembali jumlah laba yang telah dikoreksi pada laporan laba rugi periode terkini. Perubahan prinsip akuntansi juga memiliki efek retroaktif, yaitu melakukan penyusunan kembali terhadap prinsip baru dalam laporan keuangan periode sebelumnya. Beberapa perubahan prinsip akuntansi yang membutuhkan penyajian kembali secara retroaktif yaitu perubahan metode akuntansi untuk kontrak jangka panjang di bidang konstruksi dan perubahan metode full costing pada

perusahaan ekstraktif. Contoh perubahan akuntansi dengan efek retroaktif:

Tanggal 1 Januari 2019, PT. ABC mulai beroperasi dan menjual sahamnya sebesar Rp215.000.000. Data penjualan, pembelian, persediaan, dan beban operasi tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021 dengan transaksi kas, sebagai berikut:

	2019	2020	2021
Penjualan	750 juta	700 juta	700 juta
Pembelian	250 juta	250 juta	300 juta
Beban operasi	400 juta	400 juta	350 juta
Arus kas dari operasi	200 juta	100 juta	150 juta

Pada tahun 2021, PT. ABC beralih dari metode akuntansi persediaan rata-rata tertimbang ke metode FIFO karena membuat penghitungan persediaan menjadi lebih tepat.

Berikut adalah perbandingan metode rata-rata tertimbang dan metode FIFO untuk persediaan dari tahun 2019 sampai tahun 2021.

	Metode Rata-Rata Tertimbang	Metode FIFO	Perbandingan
1 Januari 2019	0	0	0
31 Desember 2019	55 juta	60 juta	5 juta
31 Desember 2020	80 juta	90 juta	10 juta
31 Desember 2021	100 juta	115 juta	15 juta

Berikut adalah perbandingan metode rata-rata tertimbang dan metode FIFO untuk Harga Pokok Penjualan dari tahun 2019 sampai tahun 2021.

	Metode Rata-Rata Tertimbang	Metode FIFO	Perbandingan
Tahun 2019	155 juta	150 juta	5 juta
Tahun 2020	230 juta	225 juta	5 juta
Tahun 2021	235 juta	230 juta	5 juta

Berikut adalah ilustrasi perubahan metode persediaan (laporan laba rugi):

	2019	2020	2021
Penjualan	705 juta	655 juta	655 juta
Harga Pokok Penjualan (rata-rata tertimbang)	155 juta	230 juta	235 juta
Beban operasi	355 juta	355 juta	305 juta
Laba bersih	195 juta	70 juta	115 juta

	2019	2020	2021
Penjualan	705 juta	655 juta	655 juta
Harga Pokok Penjualan (FIFO)	150 juta	225 juta	230 juta
Beban operasi	355 juta	355 juta	305 juta
Laba bersih	200 juta	75 juta	120 juta

Berikut adalah ilustrasi perubahan metode persediaan (laporan laba ditahan):

	2019	2020	2021
Laba ditahan (awal)	0	195 juta	265 juta
Laba bersih (rata-rata tertimbang)	195 juta	70 juta	115 juta
Laba ditahan (akhir)	195 juta	265 juta	380 juta

	2019	2020	2021
Laba ditahan (awal)	0	200 juta	275 juta
Laba bersih (FIFO)	200 juta	75 juta	120 juta
Laba ditahan (akhir)	200 juta	275 juta	395 juta

Berikut adalah ilustrasi perubahan metode persediaan (laporan posisi keuangan):

	2019	2020	2021
Persediaan (rata-rata tertimbang)	55 juta	80 juta	100 juta
Kas	355 juta	400 juta	495 juta
Total Aset	410 juta	480 juta	595 juta
Modal Saham	215 juta	215 juta	215 juta
Laba Ditahan	195 juta	265 juta	380 juta
Total Ekuitas	410 juta	480 juta	595 juta

	2019	2020	2021
Persediaan (FIFO)	60 juta	90 juta	115 juta
Kas	355 juta	400 juta	495 juta
Total Aset	415 juta	490 juta	610 juta
Modal Saham	215 juta	215 juta	215 juta
Laba Ditahan	200 juta	275 juta	395 juta
Total Ekuitas	415 juta	490 juta	610 juta

Berikut adalah ilustrasi perubahan metode persediaan (laporan arus kas):

	2019	2020	2021
Arus kas dari aktivitas operasi			
Penjualan	705 juta	655 juta	655 juta
Pembelian	250 juta	250 juta	300 juta
Beban operasi	400 juta	400 juta	350 juta
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	55 juta	5 juta	5 juta
Arus kas dari aktivitas pembiayaan			
Penerbitan saham biasa	215 juta	-	-
Penambahan kas bersih	270 juta	5 juta	5 juta
Kas awal tahun	-	270 juta	275 juta
Kas akhir tahun	270 juta	275 juta	280 juta

Secara retrospektif, penerapan metode FIFO akan mempengaruhi nilai persediaan, harga pokok penjualan, laba bersih dan laba ditahan.

Tahun	Laba Bersih		Perbedaan Laba
	Rata-Rata Tertimbang	FIFO	
2019	195 juta	200 juta	5 juta
2020	70 juta	75 juta	5 juta
Total kumulatif awal 2021	265 juta	275 juta	10 juta
Total 2021	115 juta	120 juta	5 juta

Jurnal untuk mencatat perubahan metode rata-rata tertimbang ke metode FIFO di awal tahun 2021, sebagai berikut:

Dr. Persediaan	Rp10.000.000	
Cr. Laba ditahan		Rp10.000.000

8.3 Perubahan Estimasi Akuntansi

Perubahan estimasi akuntansi merupakan perkiraan status aset atau liabilitas saat ini dan penyesuaian terhadap jumlah tercatat masa depan yang timbul dari informasi baru (bukan koreksi kesalahan). Beberapa contoh pos-pos yang membutuhkan estimasi yaitu piutang tak tertagih, keusangan persediaan, serta umur manfaat dan nilai sisa aset.

Pengakuan terhadap perubahan estimasi akuntansi secara prospektif yaitu: pertama, penyesuaian dilakukan pada periode perubahan atas nilai buku aset, liabilitas, atau ekuitas. Kedua, pengakuan secara prospektif dalam laporan laba rugi atas perubahan estimasi akuntansi dilakukan pada periode perubahan dan periode mendatang.

Informasi tentang perubahan estimasi yang terkait dengan akuntansi diungkapkan jika mempengaruhi tahun berjalan dan tahun mendatang. Perusahaan harus mengungkapkan informasi

tentang perubahan estimasi akuntansi yang material. Contoh perubahan taksiran masa manfaat yang diungkapkan dalam laporan tahunan misalnya perusahaan melakukan revisi taksiran masa manfaat peralatan dan mesin. Pada periode sebelumnya, perusahaan menggabungkan semua peralatan dan mesin dalam kelompok yang sama dan terdepresiasi selama 15 tahun. Perubahan umumnya berlaku untuk penggunaan aset yang baru diperoleh dan masa manfaatnya diperpanjang 20 tahun. Perubahan estimasi ini diungkapkan untuk memperlihatkan taksiran masa manfaat aset. Perubahan estimasi tersebut akan berpengaruh pada peningkatan laba bersih dan penurunan biaya depresiasi.

8.4 Perubahan Entitas Pelaporan

Perusahaan yang melakukan perubahan pada pelaporannya membuat entitas pelaporan yang berbeda. Oleh karena itu, laporan periode sebelumnya akan diubah dan disajikan kembali untuk mencerminkan perubahan baru dalam entitas pelapor. Beberapa bentuk perubahan entitas pelaporan yaitu penyajian laporan konsolidasi, perubahan komposisi anak perusahaan tertentu dalam laporan konsolidasi kelompok perusahaan, perubahan perusahaan yang dicantumkan dalam laporan konsolidasi, perubahan metode (ekuitas, biaya, konsolidasi) untuk anak perusahaan serta investasi.

Contoh perubahan entitas pelaporan adalah perusahaan mengadopsi laporan keuangan konsolidasi baru. Dengan laporan keuangan baru ini, perusahaan mengkonsolidasikan anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya, yang sebelumnya dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Perubahan tersebut mengindikasikan peningkatan konsolidasi aset dan liabilitas, namun tidak berdampak signifikan terhadap posisi keuangan entitas dan tidak mempengaruhi laba bersih. Untuk tujuan komparatif, penyajian kembali informasi keuangan konsolidasi periode sebelumnya untuk memperlihatkan perubahan tersebut.

8.5 Analisis dan Koreksi Kesalahan

Kesalahan akuntansi merupakan kesalahan dapat terjadi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan pada komponen-komponen laporan keuangan. Kesalahan, material atau tidak material yang disengaja, dimaksudkan untuk mencapai kinerja keuangan tertentu, akan membuat laporan keuangan tidak sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).

Beberapa bentuk kesalahan akuntansi yaitu perubahan dari prinsip akuntansi yang tidak berlaku umum menjadi prinsip akuntansi yang berlaku umum; kesalahan perhitungan yang disebabkan oleh penjumlahan, pengurangan, dan lainnya; perubahan estimasi karena estimasi-estimasi yang dilakukan secara tidak benar; kelalaian, seperti kegagalan untuk menanggihkan maupun mengakrualkan pendapatan atau beban tertentu pada akhir periode. Analisis kesalahan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi jenis kesalahan, membuat jurnal yang diperlukan untuk koreksi kesalahan, dan mengetahui cara penyajian kembali pada laporan keuangan setelah melakukan koreksi kesalahan.

Kesalahan laporan posisi keuangan adalah kesalahan yang berdampak pada penyajian aset, liabilitas, dan ekuitas. Kesalahan dalam laporan laba rugi karena alokasi pendapatan dan beban yang salah tidak berdampak pada laporan posisi keuangan dan laba bersih. Kesalahan yang mempengaruhi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi disebut *counterbalancing errors* dan *non-counterbalancing errors*. *Counterbalancing errors* merupakan kesalahan yang dengan sendirinya dapat tertutupi selama dua periode. *Non-counterbalancing errors* merupakan kesalahan yang tidak dapat tertutupi pada periode akuntansi berikutnya (membutuhkan waktu lebih dari dua periode).

Counterbalancing errors dapat terjadi pada beberapa kesalahan seperti tidak mencatat beban akrual, tidak mencatat beban dibayar di muka, pendapatan dibayar di muka, pendapatan

akrual, dan pembelian persediaan. Ilustrasi *counterbalancing errors* (tidak mencatat beban akrual) sebagai berikut:

Tanggal 31 Desember 2021, perusahaan tidak mencatat beban gaji akrual sebesar Rp40.000.000. Perusahaan belum tutup buku tahun 2022, maka jurnal koreksi adalah laba ditahan (debit) sebesar Rp40.000.000 dan beban gaji (kredit) sebesar Rp40.000.000. Jurnal koreksi tidak perlu dibuat, jika perusahaan sudah tutup buku tahun 2022.

Ilustrasi *counterbalancing errors* (tidak mencatat beban dibayar di muka) sebagai berikut:

Tanggal 1 Januari 2021, perusahaan tidak membeli polis asuransi sebesar Rp60.000.000 dengan uang tunai dan tidak membuat jurnal penyesuaian sampai akhir tahun. Perusahaan belum tutup buku tahun 2022, maka jurnal koreksi adalah beban asuransi (debit) sebesar Rp60.000.000 dan laba ditahan (kredit) sebesar Rp60.000.000. Jurnal koreksi tidak perlu dibuat, jika perusahaan sudah tutup buku tahun 2022.

Ilustrasi *counterbalancing errors* (pendapatan dibayar di muka) sebagai berikut:

Tanggal 31 Desember 2021, perusahaan mengakui pendapatan dibayar di muka sebesar Rp30.000.000 (tunai) untuk sewa ruang kantor selama tahun 2022 dan tidak membuat jurnal penyesuaian. Perusahaan belum tutup buku tahun 2022, maka jurnal koreksi adalah laba ditahan (debit) sebesar Rp30.000.000 dan pendapatan sewa (kredit) sebesar Rp30.000.000. Jurnal koreksi tidak perlu dibuat, jika perusahaan sudah tutup buku tahun 2022.

Ilustrasi *counterbalancing errors* (pendapatan akrual) sebagai berikut:

Tanggal 31 Desember 2021, perusahaan mengakui pendapatan akrual atas bunga sebesar Rp35.000.000 yang seharusnya diakui tahun 2022. Perusahaan belum tutup buku tahun 2022, maka jurnal koreksi adalah laba ditahan (debit) sebesar Rp35.000.000 dan pendapatan bunga (kredit) sebesar Rp35.000.000. Jurnal

koreksi tidak perlu dibuat, jika perusahaan sudah tutup buku tahun 2022.

Ilustrasi *counterbalancing errors* (pembelian persediaan) sebagai berikut:

Tanggal 31 Desember 2021, perusahaan mencatat pembelian persediaan sebesar Rp45.000.000 yang seharusnya diakui tahun 2022. Persediaan fisik tahun 2021 menggunakan metode persediaan periodik dan tercatat dengan benar. Perusahaan belum tutup buku tahun 2022, maka jurnal koreksi adalah pembelian (debit) sebesar Rp45.000.000 dan laba ditahan (kredit) sebesar Rp45.000.000. Jurnal koreksi tidak perlu dibuat, jika perusahaan sudah tutup buku tahun 2022.

Ilustrasi *non-counterbalancing errors* sebagai berikut:

Tanggal 1 Januari 2021, perusahaan melakukan pembelian mesin sebesar Rp100.000.000 dan memiliki estimasi manfaat selama 10 tahun tanpa nilai residu. Perusahaan telah melakukan pencatatan jurnal dengan pembebanan biaya perolehan mesin pada tahun 2021 dan kesalahan tersebut baru diketahui oleh perusahaan pada tahun 2022. Perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk seluruh aset. Perusahaan belum tutup buku tahun 2022, maka jurnal koreksi adalah:

Dr. Mesin	Rp100.000.000
Dr. Beban depresiasi Mesin	Rp10.000.000
Cr. Laba ditahan	Rp90.000.000
Cr. Akumulasi depresiasi Mesin	Rp20.000.000

Perusahaan sudah tutup buku tahun 2022, maka jurnal koreksi adalah:

Dr. Mesin	Rp100.000.000
Cr. Laba ditahan	Rp80.000.000
Cr. Akumulasi depresiasi Mesin	Rp20.000.000

Pembahasan mengenai analisis kesalahan berfokus pada pengidentifikasian jenis kesalahan dan memperhitungkan koreksinya dalam catatan akuntansi. Pada laporan keuangan komparatif, koreksi kesalahan harus disajikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt & Terry D. Warfield. 2014. *Intermediate Accounting: FASB Edition*. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Martani, Dwi, Sylvia V. S., Ratna W., Aria F., Edward T. & Taufik H. 2014. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2020. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

BAB 9

AKUNTANSI UNTUK PELAPORAN ALIRAN KAS

Oleh Paradisa Sukma

9.1 Pendahuluan

Laporan arus kas (*statement of cashflows*) merupakan laporan yang meringkas arus kas masuk dan keluar perusahaan selama periode waktu tertentu (Gordon *et al.*, 2019). Laporan arus kas disusun oleh perusahaan bertujuan untuk memberikan informasi tentang penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama suatu periode. Selain itu, laporan arus kas juga disusun untuk memberikan informasi berbasis kas tentang aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan. Oleh karena itu, laporan arus kas melaporkan penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahan kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan selama suatu periode (Kieso *et al.*, 2020).

9.2 Kegunaan Laporan Arus Kas (Tujuan)

Tujuan utama laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi tentang penerimaan kas dan pembayaran kas perusahaan dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama periode waktu tertentu. Berdasarkan Gordon *et al.* (2019) dan Kieso *et al.* (2020), laporan arus kas membantu pengguna laporan keuangan dalam:

1. Menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas masa depan, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas operasinya.

Tujuan utama pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang membantu memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Arus kas masa depan dapat diprediksi dengan lebih baik dengan memeriksa hubungan antara pos-pos seperti penjualan dan arus kas bersih dari aktivitas operasi dan kenaikan atau penurunan kas daripada menggunakan data berbasis akrual saja.

2. Mengevaluasi kemampuan entitas untuk memenuhi kewajiban (utang) dan membayar dividen.

Kas merupakan hal yang sangat penting, karena tanpa adanya kas yang memadai, perusahaan tidak dapat membayar gaji karyawan, melunasi utang, membayar dividen, dll. Laporan arus kas menunjukkan dari mana kas perusahaan berasal dan bagaimana perusahaan menggunakan kasnya. Pengguna laporan keuangan sangat membutuhkan laporan ini karena menunjukkan arus kas dalam bisnis.

3. Memahami perbedaan antara laba bersih dan penerimaan dan pembayaran kas terkait.

Angka laba bersih memberikan informasi tentang kinerja perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. Tetapi laba bersih berbasis akrual karena perusahaan harus membuat perkiraan untuk menghitungnya. Berbeda dengan uang tunai (kas). Sehingga pengguna laporan keuangan dapat memperoleh manfaat dengan mengetahui mengapa laba bersih dan arus kas bersih perusahaan dari aktivitas operasi berbeda dan dapat menilai sendiri keandalan angka pendapatan tersebut.

4. Mengidentifikasi transaksi investasi dan pembiayaan entitas selama periode tersebut.

Selain kegiatan operasi, perusahaan melakukan transaksi investasi dan pembiayaan. Aktivitas investasi mencakup

pembelian dan penjualan aset selain produk atau layanan perusahaan. Kegiatan pembiayaan meliputi pinjaman dan pembayaran kembali pinjaman, investasi oleh pemilik, dan distribusi kepada pemilik. Dengan memeriksa aktivitas investasi dan pendanaan perusahaan, pengguna laporan keuangan dapat lebih memahami mengapa aset dan kewajiban meningkat atau menurun selama periode tersebut.

5. Menentukan kebutuhan entitas akan pendanaan eksternal.

9.3 Klasifikasi Laporan Arus Kas

Laporan arus kas mengklasifikasikan penerimaan kas dan pembayaran kas menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Berdasarkan Kieso et al (2020), karakteristik transaksi dan peristiwa lain dari setiap jenis aktivitas adalah sebagai berikut.

1. Aktivitas operasi (*Operating Activities*)

Aktivitas ini melibatkan pengaruh kas dari transaksi yang masuk ke dalam penentuan laba bersih, seperti penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, dan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan untuk pembelian persediaan dan beban. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator utama sejauh mana operasi entitas telah menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, mempertahankan kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa jaminan. sumber pendanaan eksternal.

2. Aktivitas investasi (*Investing Activities*)

Aktivitas ini melibatkan aset tidak lancar, seperti: memperoleh dan menjual investasi dan aset berumur panjang yang produktif. Pengungkapan atas arus kas yang berasal dari aktivitas investasi penting karena arus kas mencerminkan sejauh mana pengeluaran telah dilakukan

untuk sumber daya yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.

3. Aktivitas pendanaan (*Financing Activities*)

Aktivitas ini melibatkan item liabilitas dan ekuitas, seperti: mendapatkan kas dari kreditur dan membayar kembali jumlah yang dipinjam, kemudian mendapatkan modal saham dari investor dan memberi mereka pengembalian atas investasi mereka (dividen). Pengungkapan arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan penting karena berguna dalam memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh penyedia modal bagi perusahaan.

Tabel 9.1 : menunjukkan jenis penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

Tabel 9.1 : Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Kas

<i>Operating Activities</i> <i>Cash Inflows</i> Dari Penjualan barang dagang dan jasa Dari bunga dan dividen <i>Cash Outflows</i> Pembayaran persediaan untuk pemasok Pembayaran gaji karyawan Pembayaran pajak Pembayaran bunga pinjaman Pembayaran beban	Item Laporan Laba/Rugi
<i>Investing Activities</i> <i>Cash Inflows</i> Dari Penjualan Aset Lancar Dari penjualan sekuritas utang atau	Item Aset Tidak Lancar

ekuitas entitas lain Cash Outflows Untuk pembelian aset Lancar Untuk pembelian obligasi entitas lain	
Financing Activities Cash Inflows Dari Penjualan sekuritas ekuitas Dari penerbitan pinjaman (utang) Cash Outflows Untuk pembayaran dividen Untuk pembayaran utang jangka panjang	Item Liabilitas dan Ekuitas Tidak Lancar

Sumber: Kieso et al (2020)

Kategori aktivitas operasi merupakan aktivitas yang paling penting karena menunjukkan kas yang disediakan oleh operasi perusahaan. Sumber kas ini umumnya dianggap sebagai ukuran terbaik dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas yang cukup untuk melanjutkan kelangsungan usahanya.

9.4 Kas dan Setara Kas

Laporan arus kas menjelaskan perubahan kas dan setara kas selama periode tersebut. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang mudah dikonversi menjadi kas dalam jumlah yang diketahui, dan begitu mendekati jatuh tempo akan menimbulkan risiko perubahan nilai yang tidak signifikan (misalnya karena perubahan suku bunga). Umumnya, hanya investasi dengan jatuh tempo awal tiga bulan atau kurang yang memenuhi syarat berdasarkan definisi ini. Akuisisi dan pelepasan investasi jangka pendek dalam bentuk kas dan setara kas merupakan bagian dari keseluruhan aktivitas manajemen kas perusahaan (Kieso *et al.*, 2020). Pada tabel 9.2 menunjukkan deskripsi kas dan setara kas.

Tabel 9.2 : Deskripsi Kas dan Setara Kas

Kas	Uang tunai, mata uang, dan deposito bank serta instrumen yang dapat dinegosiasikan seperti cek dan wesel
Setara Kas	Investasi jangka pendek yang sangat likuid dengan jatuh tempo asli 3 bulan atau kurang, termasuk: • <i>Treasury bills</i> • <i>Commercial paper</i> • <i>Money market funds</i>

Sumber: Gordon et al (2019)

9.5 Sumber Data Laporan Arus Kas

Perusahaan menyusun laporan arus kas dengan cara berbeda dari tiga laporan keuangan lainnya. Laporan arus kas tidak disiapkan dari neraca saldo yang disesuaikan, tetapi memerlukan informasi terperinci mengenai perubahan saldo akun yang terjadi antara dua titik waktu. Neraca saldo yang disesuaikan tidak akan menyediakan data yang diperlukan. Selain itu, laporan arus kas berkaitan dengan penerimaan dan pembayaran kas. Akibatnya, perusahaan harus menyesuaikan pengaruh penggunaan akuntansi akrual untuk menentukan arus kas. Kieso et al (2020) menjelaskan informasi untuk menyiapkan pernyataan ini biasanya berasal dari tiga sumber:

1. Komparasi laporan posisi keuangan memberikan jumlah perubahan aset, kewajiban, dan ekuitas dari awal hingga akhir periode.
2. Data laporan laba rugi saat ini membantu menentukan jumlah kas bersih yang disediakan atau digunakan oleh operasi selama periode tersebut.
3. Data transaksi yang dipilih dari buku besar memberikan informasi rinci tambahan yang diperlukan untuk

menentukan bagaimana perusahaan menyediakan atau menggunakan kas selama periode tersebut.

9.6 Format Laporan Arus Kas

Format Laporan Arus Kas terdiri dari tiga bagian, yaitu: aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

9.6.1 Aktivitas Operasi

Ada dua format dalam penyusunan aktivitas operasi dan laporan arus kas, yaitu: metode tidak langsung dan metode langsung. Kedua metode tersebut melaporkan jumlah kas bersih yang sama yang disediakan oleh aktivitas operasi dengan menggunakan pendekatan yang berbeda (Gordon *et al.*, 2019).

Metode Tidak Langsung (Indirect Method)

Penyusunan aktivitas operasi pada laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung dilakukan dengan merekonsiliasi laba bersih menjadi kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi dengan membuat dua jenis penyesuaian:

- a. Penyesuaian atas pendapatan yang bersifat nonkas, beban, serta keuntungan dan kerugian lainnya
- b. Penyesuaian atas perubahan aset lancar dan kewajiban lancar.

Untuk menyesuaikan laba bersih menjadi kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi, perusahaan harus menambahkan biaya dan kerugian nonkas kembali ke laba bersih. Sebaliknya, harus perusahaan mengurangi pendapatan atau keuntungan nonkas dari laba bersih untuk mendapatkan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi.

- a. Kenaikan kewajiban lancar menyebabkan arus kas operasi lebih tinggi dari pendapatan berbasis akrual.
- b. Penurunan kewajiban lancar menyebabkan arus kas operasi lebih rendah dari penghasilan berbasis akrual.

- c. Kenaikan aktiva lancar menyebabkan arus kas operasi lebih rendah dari pendapatan berbasis akrual.
- d. Penurunan aset lancar menyebabkan arus kas operasi lebih tinggi dari pendapatan berbasis akrual.

Metode Langsung (Direct Method)

Metode langsung menyiapkan aktivitas operasi pada laporan arus kas dengan memisahkan laporan laba rugi dan menyesuaikan setiap item untuk mengkonversi dari basis akrual ke basis kas. Pada metode ini, perusahaan menyiapkan laporan laba rugi berbasis kas. Perusahaan menerapkan penyesuaian serupa seperti pada metode tidak langsung kecuali bahwa penyesuaian diterapkan pada masing-masing pos pendapatan dan beban, bukan terhadap laba bersih. Metode langsung mensyaratkan item berikut dalam arus kas dari perhitungan aktivitas operasi:

- a. Kas yang dikumpulkan dari pelanggan.
Kas yang dikumpulkan dari pelanggan dihitung menggunakan pendapatan berbasis akrual dan kurangi kenaikan piutang atau tambahkan penurunan piutang untuk mendapatkan pendapatan berbasis kas atau kas yang dikumpulkan dari pelanggan.
- b. Kas yang dikumpulkan dari bunga dan dividen.
Kas yang dikumpulkan dari bunga atau dividen dihitung dengan pendapatan berbasis akrual dan kurangi kenaikan piutang bunga atau dividen atau tambahkan penurunan piutang bunga atau dividen untuk mendapatkan pendapatan berbasis kas. Pembayaran tunai untuk barang dagangan.

c. Kas untuk pembayaran persediaan

Perhitungan kas yang dibayarkan untuk barang dagangan membutuhkan dua langkah:

- 1) Tentukan pembelian secara akrual.
- 2) Tentukan berapa banyak kas yang dikeluarkan perusahaan untuk pembelian ini.

Pembelian berbasis akrual ditentukan dengan menyesuaikan antara harga pokok penjualan dan perubahan persediaan. Jika persediaan meningkat, maka pembelian lebih besar dari harga pokok penjualan. Jika persediaan berkurang, maka pembelian lebih kecil dari harga pokok penjualan. Dalam hal ini, perusahaan menjual seluruh persediaan yang dibeli serta sebagian persediaan awal untuk menutupi unit yang terjual pada periode berjalan. Perusahaan menyesuaikan pembelian berbasis akrual untuk perubahan utang usaha yang berkaitan dengan persediaan. Untuk melihat jumlah kas yang dikeluarkan untuk pembayaran persediaan, maka pembelian dikurangi kenaikan utang usaha dari pembelian dan tambahkan penurunan utang dagang dari pembelian.

d. Kas yang dikeluarkan untuk pembayaran kepada karyawan dan pembayaran tunai untuk biaya akrual lainnya, termasuk bunga dan pajak.

Untuk menghitung kas yang dibayarkan kepada karyawan dan vendor lain, maka kurangi kenaikan akun hutang yang relevan dari biaya berbasis akrual. Peningkatan utang menunjukkan bahwa perusahaan telah mencatat lebih banyak biaya menggunakan sistem akrual daripada jumlah uang tunai yang dibayarkan. Tambahkan penurunan pada akun utang yang relevan dari biaya berbasis akrual untuk sampai pada biaya berbasis kas.

- e. Kas yang dikeluarkan untuk pembayaran biaya operasi lainnya termasuk asuransi dan biaya dibayar di muka lainnya.

Untuk menghitung pembayaran tunai untuk biaya operasional lainnya, termasuk asuransi dan biaya dibayar di muka lainnya, maka biaya berbasis akrual dikurangi penurunan akun dibayar di muka dan tambahkan kenaikan pada akun dibayar dimuka yang relevan. Penurunan biaya dibayar di muka merupakan arus kas keluar yang terjadi pada periode sebelumnya yang tercermin sebagai beban pada laporan laba rugi pada periode berjalan. Sedangkan kenaikan biaya dibayar dimuka merupakan arus kas keluar pada periode berjalan yang muncul di neraca sebagai aktiva tetapi tidak mempengaruhi laba bersih.

9.6.2 Aktivitas Investasi

Arus kas investasi dan pendanaan dilaporkan dengan bruto, berbeda dengan arus kas operasi yang disajikan secara neto. Sehingga, perusahaan harus melaporkan penerimaan dan pembayaran kas secara terpisah. Perusahaan menghitung arus kas dari aktivitas investasi menggunakan pendekatan metode langsung. Arus kas investasi mencakup transaksi yang melibatkan aset tetap, investasi utang (obligasi) dan saham, dll. Akibatnya, bagian investasi dari laporan arus kas mencakup item seperti:

1. Pembelian aset tetap
2. Hasil penjualan aset tetap
3. Pembelian investasi
4. Hasil penjualan investasi

Perusahaan melaporkan kenaikan dan penurunan secara terpisah di bagian investasi dari laporan arus kas. Oleh karena itu, perolehan dan pelepasan aset tetap merupakan item terpisah daripada perubahan kas bersih dari aktivitas tersebut. Bagian arus

kas investasi didasarkan pada analisis akun neraca untuk aset tetap, investasi, dan piutang jangka panjang (Gordon *et al.*, 2019).

9.6.3 Aktivitas Pendanaan

Perusahaan juga menghitung arus kas dari aktivitas pendanaan dengan menggunakan pendekatan metode langsung. Arus kas aktivitas pendanaan mencakup transaksi yang melibatkan utang dan ekuitas perusahaan sendiri. Akibatnya, bagian pendanaan dari laporan arus kas mencakup item seperti:

- 1. Hasil dari penerbitan modal saham
- 2. Pembelian *saham treasury*
- 3. Hasil dari penerbitan obligasi
- 4. Dividen dibayarkan
- 5. Pembayaran pokok utang
- 6. Penjualan *treasury stock*

Seperti halnya arus kas investasi, perusahaan melaporkan kenaikan dan penurunan dari arus kas pendanaan secara terpisah di bagian pembiayaan laporan arus kas. Bagian arus kas pembiayaan didasarkan pada analisis akun neraca utang dan ekuitas (Gordon *et al.*, 2019).

9.7 Contoh Kasus Laporan Arus Kas

9.7.1 Kasus Laporan Arus Kas PT Makmur Jaya

PT Makmur Jaya menyajikan laporan laba rugi dan beberapa akun pada Laporan Posisi Keuangan sebagai berikut.

PT Makmur Jaya	
Laporan Laba Rugi	
31 Desember 2022	
(Dalam rupiah)	
Penjualan	134,500,000.00
Harga Pokok Penjualan	(85,200,000.00)

PT Makmur Jaya
Laporan Laba Rugi
31 Desember 2022
(Dalam rupiah)

Laba Kotor	49,300,000.00
Beban Gaji	(5,400,000.00)
Beban Administrasi dan Umum	(11,200,000.00)
Beban Depresiasi	(2,700,000.00)
Laba Operasi	30,000,000.00
Beban Bunga	(1,000,000.00)
Laba sebelum Pajak	29,000,000.00
Beban Pajak Penghasilan	(8,700,000.00)
Laba Bersih	20,300,000.00

Berikut informasi perubahan pada akun-akun terkait di laporan posisi keuangan (dalam rupiah)

Akun	Saldo Awal Periode	Saldo Akhir Periode	Perubahan
Piutang	2,000,000	1,525,000	(475,000)
Persediaan	54,340,000	57,530,000	3,190,000
Beban Dibayar Dimuka	1,245,000	1,059,000	(186,000)
Utang Usaha	5,567,000	5,200,000	(367,000)
Utang Gaji	540,000	670,000	130,000
Utang Bunga	225,000	200,000	(25,000)

Informasi tambahan:

Deskripsi Kas	Arus Masuk (Keluar)
Penerimaan kas dari penjualan asset tetap	5,000,000
Pembayaran kas untuk pembelian sekuritas investasi	(2,000,000)
Penerimaan kas dari pinjaman bank	6,000,000
Pembayaran kas dari pembayaran pinjaman	(1,000,000)

9.7.2 Penyelesaian Laporan Arus Kas Menggunakan Metode Langsung

PT Makmur Jaya	
Laporan Arus Kas	
31 Desember 2021	
(dalam rupiah)	
Aktivitas Operasi	
Penerimaan Kas dari Pelanggan	134,975,000.00
Pembayaran Kas untuk Persediaan	(88,757,000.00)
Pembayaran Kas untuk Karyawan	(5,270,000)
Pembayaran Kas untuk Cash Pembayaran Kas untuk beban lainnya	(11,014,000.00)
Pembayaran Kas untuk bunga	(1,025,000)
Pembayaran Kas untuk Pajak Penghasilan	(8,700,000)
Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	20,209,000
Aktivitas Investasi:	

PT Makmur Jaya	
Laporan Arus Kas	
31 Desember 2021	
(dalam rupiah)	
Penjualan Aset tetap	5,000,000
Perolehan Sekuritas Investasi	(2,000,000)
Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	3,000,000
Aktivitas Pendanaan	
Penerbitan Utang	6,000,000
Pelunasan Utang	(1,000,000)
Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5,000,000
Kenaikan Kas bersih	28,209,000
Saldo awal kas	12,000,000
Saldo Akhir	40,209,000

9.7.3 Penyelesaian Laporan Arus Kas Menggunakan Metode Tidak Langsung

PT Makmur Jaya	
Laporan Arus Kas	
31 Desember 2021	
(dalam rupiah)	
Aktivitas Operasi	
Laba Bersih	20,300,000
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih menjadi kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi:	

PT Makmur Jaya	
Laporan Arus Kas	
31 Desember 2021	
(dalam rupiah)	
Beban Depresiasi	2,700,000
Perubahan akun modal kerja operasional:	
Penurunan piutang	475,000
Kenaikan persediaan	(3,190,000)
Penurunan Beban Dibayar Dimuka	186,000
Penurunan Utang	(367,000)
Kenaikan Utang Gaji	130,000
Kenaikan Utang Bunga	(25,000)
Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	20,209,000
Aktivitas Investasi:	
Penjualan Aset tetap	5,000,000
Perolehan Sekuritas Investasi	(2,000,000)
Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	3,000,000
Aktivitas Pendanaan	
Penerbitan Utang	6,000,000
Pelunasan Utang	(1,000,000)
Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5,000,000
Kenaikan Kas bersih	28,209,000
Saldo awal kas	12,000,000
Saldo Akhir	40,209,000

DAFTAR PUSTAKA

- Gordon, E. A. (Associate professor), Raedy, J. S., & Sannella, A. J. 2019. *Intermediate accounting* (2nd ed.).
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. 2020. *Intermediate accounting* (4th ed.). John Wiley & Sons.

BAB 10

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PADA PELAPORAN KEUANGAN

Oleh Daniel Kartika Adhi

10.1 Pendahuluan

Akuntansi memegang peranan yang penting dalam suatu entitas. Tidak hanya entitas bisnis saja, tetapi semua entitas baik yang bergerak dalam bidang sektor publik maupun sektor privat perlu untuk melaporkan kondisi keuangan dan kinerjanya. Akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu (Martani, *et al*, 2012). Menurut (Kieso, *et al*, 2010) Akuntansi adalah suatu sistem. Sebagai suatu sistem dengan input berupa data transaksi keuangan dan outputnya berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal. Informasi yang didistribusikan kepada semua harus bersifat tulus, terbuka, integritas, dan tepat waktu. Media utama untuk berkomunikasi dengan pihak internal maupun eksternal perusahaan adalah laporan keuangan. Beragamnya pihak eksternal yang menggunakan informasi dari laporan keuangan membuat pihak penyusun laporan keuangan menggunakan prinsip dan asumsi-asumsi dalam proses penyusunan laporan keuangan, untuk itulah dibutuhkan adanya standar akuntansi yang menjadi pedoman bagi penyusun dan pembaca laporan keuangan. Standar akuntansi merupakan pedoman umum yang dibuat oleh badan pembuat standar untuk membekali penyusun dalam pelaporan keuangan serta membantu pengguna dalam memahami laporan keuangan

yang dihasilkan oleh manajemen perusahaan sesuai dengan tujuan akhir dari laporan keuangan yang terdapat dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Salah satu karakteristik standar akuntansi adalah bahwa standar tidak mengatur prosedur akuntansi tetapi lebih merupakan pedoman-pedoman umum yang lengkap tentang fungsi akuntansi sebagai alat untuk mengungkapkan informasi keuangan (Suwardjono, 2017). Belkaoui (2011) mengemukakan alasan pentingnya merumuskan standar akuntansi yang relevan bagi lembaga-lembaga resmi akuntansi, diantaranya sebagai berikut:

1. Dapat menyajikan informasi keuangan, prestasi dan kegiatan perusahaan. informasi yang disusun berdasarkan standar akuntansi yang lazim diharapkan mempunyai sifat yang jelas, konsisten, terpercaya dan dapat dibandingkan.
2. Memberi pedoman dan peraturan bekerja bagi akuntan agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan hati-hati, independen dan dapat mengabdikan keahliannya dan kejujurannya melalui penyusunan laporan akuntansi setelah melalui pemeriksaan akuntan.
3. Memberikan *database* kepada pemerintah tentang berbagai informasi yang dianggap penting dalam perhitungan pajak, peraturan tentang perusahaan, perencanaan dan peraturan ekonomi, dan peningkatan efisiensi ekonomi, dan tujuan-tujuan makro lainnya.
4. Dapat menarik para ahli dan praktisi di bidang teori dan standar akuntansi. Semakin banyak standar yang dikeluarkan, semakin banyak kontroversi dan semakin bergairah untuk berdebat, berpolemik dan melakukan penelitian.

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan

(Suwardjono, 2017). Catatan atas laporan keuangan merupakan media untuk pengungkapan yang diharuskan dalam standar akuntansi dan yang tidak dapat disajikan dalam neraca, laporan laba rugi atau laporan arus kas.

10.2 Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting bagi pengguna eksternal maupun internal untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil kinerja yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan (Fahmi, 2018). Analisis akun-akun dalam laporan posisi keuangan dan laba rugi seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban akan menghasilkan laporan kinerja suatu entitas. Laporan keuangan dibutuhkan oleh semua pihak (*stakeholder*) pengguna laporan keuangan baik internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Laporan keuangan juga menunjukkan pertanggung jawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber daya. (Jusup, 2011). Dalam mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai entitas secara relevan yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dan distribusi pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik serta arus kas.

Penyajian laporan keuangan diatur dalam PSAK No. 1. PSAK No. 1 menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum (*general purpose financial statements*) yang selanjutnya disebut 'laporan keuangan' agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. PSAK No. 1 menetapkan karakteristik umum untuk penyajian laporan keuangan. Secara khusus membahas aspek-aspek penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap standar akuntansi, kelangsungan

usaha (*going concern*), dasar akrual akuntansi, materialitas, agregasi dan saling hapus, frekuensi pelaporan, informasi komparatif dan konsistensi penyajian.

PSAK No. 01 menjelaskan bahwa dalam laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi komprehensif selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan, dan laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

1. Laporan Posisi Keuangan

Klasifikasi Laporan Posisi Keuangan nampak pada Tabel dibawah ini:

Tabel 9.3 : Klasifikasi Laporan Posisi Keuangan

Aset	Liabilitas	Ekuitas
Aset Lancar	Liabilitas Jangka Pendek	Hak Non Pengendali
Aset Tidak Lancar	Liabilitas Jangka Panjang	Ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk

Sumber: PSAK 1

Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar

Klasifikasi aset lancar jika;

- a) Mengharapkan akan merealisasikan aset atau mengharapkan akan merealisasikan aset, atau bermaksud bermaksud untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal;
- b) memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan;

- c) mengharapkan akan merealisasi aset dalam
mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka
waktu 12 bulan setelah pelaporan; atau
- d) kas atau setara kas (PSAK 2: Laporan Arus Kas) kecuali
aset tersebut tersebut dibatasi pertukarannya atau
penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas
sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode
pelaporan.

Berdasarkan kategori diatas, yang termasuk ke dalam
aset lancar antara lain adalah kas dan setara kas, piutang,
persediaan, investasi jangka pendek dan biaya dibayar dimuka.

Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk ke
dalam kategori diatas sebagai aset tidak lancar. Aset tidak
lancar adalah investasi jangka panjang, aset tetap dan *property*
investasi, aset tak berwujud dan aset lain yang bersifat tidak
lancar.

Liabilitas Jangka Pendek dan Jangka Panjang

PSAK 1 (Revisi 2009) tidak membahas secara khusus
klasifikasi dan jenis liabilitas jangka pendek. Bentuk usaha
entitas akan menentukan jenis dan klasifikasi liabilitas yang
dimiliki sebuah entitas. Entitas mengklasifikasikan liabilitas
lancar, jika (PSAK 1):

- a) Mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut
tersebut dalam siklus operasi normalnya;
- b) Memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan
diperdagangkan;
- c) Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan
dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode
pelaporan; atau
- d) Tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda
penyelesaian

Berdasarkan kategori diatas, yang termasuk liabilitas
jangka pendek adalah utang dagang, beban yang masih harus

dibayar, utang bank jangka pendek, wesel bayar, utang pajak, utang dividen, pendapatan diterima dimuka, utang terkait gaji karyawan, uang muka pelanggan (deposit)

Liabilitas yang tidak termasuk kategori di atas, diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka Panjang. Liabilitas jangka panjang biasanya mencakup (Martani, *et al*, 2012):

- a) Liabilitas yang berasal dari pembiayaan, seperti penerbitan obligasi, utang sewa guna usaha, dan utang bank jangka Panjang;
- b) Liabilitas yang berasal dari kegiatan operasi entitas, seperti kewajiban pensiun dan kewajiban pajak tangguhan;
- c) Liabilitas yang bergantung pada terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa di masa depan, seperti provisi untuk kewajiban garansi

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Penyajian pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi komprehensif dapat dilakukan oleh entitas dengan beberapa cara dengan tujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Entitas dilarang menyajikan pos penghasilan dan beban sebagai pos luar biasa dalam laporan laba rugi komprehensif atau catatan atas laporan keuangan. Pos yang bersifat tidak biasa terjadi disajikan sebagai keuntungan atau kerugian non operasi. Entitas dapat memilih menyajikan laporan laba rugi komprehensif dalam satu periode dalam bentuk satu laporan (bentuk tunggal) yaitu laporan laba rugi komprehensif atau dalam bentuk dua laporan (bentuk ganda) yang terdiri dari laporan laba rugi terpisah dan laporan laba rugi komprehensif yang dimulai dengan laba rugi periode berjalan.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

PSAK 1 menyatakan bahwa entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas mencakup informasi sebagai berikut:

- a) Total penghasilan komprehensif selama periode berjalan, yang menunjukkan secara tersendiri jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali;
- b) Untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara *retrospektif* sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan; (contoh dari perubahan kebijakan akuntansi yang memerlukan *retrospektif* adalah perubahan kebijakan dari metode LIFO menjadi rata-rata bergerak)
- c) Rekonsiliasi atas perubahan selama periode berjalan untuk setiap komponen ekuitas yang dihasilkan dari laba atau rugi setiap pos dari pendapatan komprehensif lain, serta transaksi dengan pemilik, seperti tambahan modal atau penarikan;
- d) Dividen yang diakui dan jumlah dividen per saham. Pos ini dapat juga disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Laporan Arus Kas

Informasi arus kas menyediakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Laporan Arus Kas, diklasifikasikan menurut aktifitas menjadi tiga, yaitu (PSAK 2):

- a) Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi diperoleh terutama dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas.

b) **Aktivitas Investasi**

Arus kas dari aktivitas investasi diperoleh terutama dari aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka Panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas

c) **Aktivitas Pendanaan**

Aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas Entitas dianjurkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. Metode langsung menyediakan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan oleh metode tidak langsung.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi sebagai berikut:

- a) Menyajikan informasi dasar penyusunan laporan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi, dasar pengukuran, kebijakan yang relevan, asumsi dalam estimasi;
- b) Mengungkapkan informasi informasi yang disyaratkan disyaratkan SAL yang tidak disajikan disajikan dibagian mana pun dalam laporan keuangan;
- c) Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan laporan keuangan keuangan, tetapi informasi informasi tersebut tersebut relevan relevan untuk memahami memahami laporan keuangan (pengelolaan modal)

Sepanjang praktis, penyajian catatan atas laporan keuangan dilakukan secara sistematis, membuat referensi silang atas setiap pos untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan.

10.3 Pengungkapan pada Laporan Keuangan

Arti pengungkapan (*disclosure*) dalam KBBI adalah proses, cara, perbuatan mengungkapkan. Bila dikaitkan dengan pengungkapan informasi, *disclosure* mengandung pengertian bahwa pengungkapan informasi harus memberikan penjelasan yang cukup, tidak ada yang ditutup-tutupi, lengkap, jelas, akurat dan dapat dipercaya mengenai keadaan yang sebenarnya dalam entitas. Kata *disclosure* memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan (Ghozali dan Chariri, 2007).

Kualitas informasi keuangan dari entitas tercermin pada luas tidaknya suatu pengungkapan (*disclosure*) laporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak internal maupun eksternal yang memerlukan. Semakin luas tingkat pengungkapan semakin memudahkan para pemangku kepentingan baik pihak intern maupun pihak ekstern untuk mengambil keputusan.

Terdapat dua jenis pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan keuangan entitas (Ghozali dan Chariri, 2007), yaitu;

- 1) pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*), yaitu pengungkapan minimum butir-butir laporan keuangan yang harus diungkapkan perusahaan khususnya yang sudah *go public* atau emiten yang terdaftar di pasar modal. Kewajiban pengungkapan informasi ini telah diatur oleh pemerintah atau badan pembuat standar (seperti Badan Pengawas Modal / BAPEPAM dan Ikatan Akuntansi Indonesia / IAI),
- 2) pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), yaitu pengungkapan butir-butir laporan keuangan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.

Hendriksen (2010) berpendapat bahwa untuk mencapai pengungkapan yang pantas, sebuah pengungkapan harus menjawab pertanyaan:

- a) Untuk siapa informasi diungkapkan?
- b) Apa tujuan dari pengungkapan informasi?
- c) Berapa banyak informasi harus diungkapkan?

1. Fungsi atau Tujuan Pengungkapan

Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda (Suwardjono, 2017). Pengungkapan dapat diwajibkan untuk tujuan melindungi, informatif atau melayani kebutuhan khusus.

a) Tujuan melindungi

Tidak semua pemakai laporan keuangan dapat mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomik yang melandasi suatu pos statemen keuangan, oleh karena itu pengungkapan dimaksudkan untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan terbuka, sehingga tingkat atau volume pengungkapan akan menjadi tinggi.

b) Tujuan Informatif

Tujuan ini dilandasi bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat pemahaman tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut.

c) Tujuan Kebutuhan Khusus

Merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang

bermanfaat bagi pemakai yang dituju. Untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci.

2. Keluasan Pengungkapan

Keluasan pengungkapan berkaitan dengan seberapa besar informasi harus diungkapkan. Evans (2003) dalam Suwardjono (2017), mengidentifikasi tiga tingkat pengungkapan yaitu memadai (*adequate disclosure*), wajar atau etis (*fair or ethical disclosure*), dan penuh (*full disclosure*).

a) memadai (*adequate disclosure*)

Tingkat memadai adalah tingkat minimum yang harus dipenuhi agar statemen keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan.

b) wajar atau etis (*fair or ethical disclosure*)

Fair disclosure secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.

c) penuh (*full disclosure*).

Full disclosure menyangkut kelengkapan penyajian informasi yang diungkap secara relevan.

3. Metode Pengungkapan

Merupakan cara atau teknis bagaimana informasi disajikan kepada pemakai laporan dalam satu perangkat statemen keuangan beserta informasi lain (Suwardjono, 2017). Adapun metode pengungkapan yang biasanya digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Pos (Akun) dalam Laporan Keuangan;
Informasi keuangan dapat diungkapkan melalui *income statement* dalam bentuk pos atau akun dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan standar tentang definisi, pengukuran, penilaian, dan penyajian.
- b) Catatan kaki (*foot notes*);
Catatan kaki (*footnotes*), atau catatan atas statemen keuangan (*notes to financial statements*) merupakan metode pengungkapan untuk informasi yang tidak praktis atau tidak memenuhi kriteria untuk disajikan dalam bentuk pos atau elemen statemen keuangan. Catatan atas statemen keuangan menjadi bagian integral dari statemen keuangan secara keseluruhan.
- c) Penjelasan dalam kurung;
Penjelasan singkat berbentuk tanda kurung mengikuti suatu pos atau elemen dapat dijadikan cara untuk mengungkapkan informasi.
- d) Lampiran;
Rincian, statemen tambahan, daftar rincian, atau semacamnya dapat disajikan sebagai lampiran atau disajikan dalam seksi lain yang terpisah dengan statemen utama.
- e) Catatan dalam laporan auditor.
Pengungkapan dapat dilakukan oleh pihak lain yaitu auditor independen. Pengungkapan yang dinilai auditor telah memadai dan wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum secara otomatis akan terrefleksi dalam statemen (laporan) keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Chariri dan Imam Ghozali. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2011. *Teori Akuntansi*". Buku 2. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Fahmi, I. 2018. *Analisis Kinerja Keuangan: Panduan bagi Akademisi, Manajer, dan Investor dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan*. Bandung, Alfabeta
- Hendriksen, Eldon S Dan Michael F Van. Brode, 2010, *Teori Akuntansi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kieso, Donald. E., Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield, 2010, *Intermediate Accounting: IFRS Edition*. Edisi 1, Volume 1, John Wiley & Sons.
- Martani. Dwi., Sylvia Veronica NPS., Ratna Wardhani., Aria Farahmita., dan Edward Tanujaya. 2012, *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Salemba Empat
- Suwardjono, 2017, *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, BPFE Yogyakarta
- Jusup, Al Haryono. 2011. *Dasar – Dasar Akuntansi*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

BAB 11

METODE PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN PIRANTI LUNAK

Oleh Men Wih Widiatno

11.1 Pendahuluan

Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, segala sesuatu menjadi lebih mudah, terutama pencarian dan pengelolaan informasi, termasuk Laporan Keuangan." "Dengan perkembangan teknologi saat ini, banyak berkembang dalam pengembangan alat yang dirancang untuk menjalankan kegiatan perusahaan." "Dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, pengoperasian perusahaan menjadi mudah." "Misalnya toko online dengan menggunakan smartphone dapat melayani pembeli tanpa harus bertemu langsung." "Teknologi dengan berbagai fungsi aplikasi digunakan tidak hanya untuk memasarkan dan mempromosikan produk, tetapi juga untuk membantu perusahaan memperoleh informasi operasi bisnis." "Salah satu bentuk penggunaan teknologi informasi dalam operasional bisnis adalah penggunaan sistem akuntansi." "Laporan Keuangan yang disusun oleh bagian akuntansi secara teratur mengikuti standar yang ditetapkan oleh SAK dan setiap perusahaan harus mematuhi aturan/aturan tersebut, namun dalam kasus perusahaan publik, Laporan Keuangan harus diubah oleh akuntan untuk memastikan konsistensi." "sistem yang digunakan, sehingga pengembangannya sesuai dengan keadaan riil perusahaan." "Pada titik ini perusahaan harus mampu bekerja dengan cepat dan tepat dengan ketelitian yang tinggi untuk dapat

bersaing dengan perusahaan yang sudah ada." "Selain itu, sistem yang dibutuhkan oleh perusahaan harus akurat karena mendukung kelancaran fungsi perusahaan atau instansi dalam menjalankan perusahaan."

Karena perkembangan teknologi informasi membuat dampak yang signifikan terhadap proses akuntansi perusahaan." "Efek yang nyata adalah pengolahan data berubah dari sistem manual menjadi sistem komputerisasi." "Berbagai ahli telah mengembangkan berbagai program akuntansi untuk mendukung operasional perusahaan (Peta 2017)." "Bahkan saat ini, software akuntansi tidak hanya digunakan di komputer tetapi juga dapat digunakan di smartphone." "Smartphone mudah digunakan dan dapat digunakan di segala situasi dan di semua tempat, menjadikan smartphone sebagai salah satu perangkat yang saat ini dipilih pemilik bisnis untuk melakukan tugas bisnis misalnya pembukuan dan akuntansi (Jessica 2018)."

Pencatatan uang masuk dan keluar sebagai bagian dari pembukuan masih belum membuat informasi yang lengkap tentang keadaan perusahaan." "Dewan Standar Akuntansi (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan SAK-EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah) yang mengatur penerapan akuntansi perusahaan UMKM dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab dengan penyajian pengadaan Laporan Keuangan (IAI-SAK EMKM, 2018)." "Laporan Keuangan adalah unsur penting dalam kelangsungan bisnis dimasyarakat." "Semua kegiatan keuangan perusahaan dicatat dalam Laporan Keuangan." "Laporan Keuangan adalah alat untuk membuat laporan informasi keuangan (Didin et al., 2018)." "Laporan Keuangan yang lengkap, objektif, dan andal digunakan untuk membentuk opini tentang kondisi keuangan suatu perusahaan (Thalassinos dan Liapis, 2014)." "Informasi keuangan ini digunakan oleh beberapa pihak di dalam dan di luar perusahaan untuk mengambil keputusan."

Selain membuat laporan informasi keuangan, Laporan Keuangan juga adalah alat yang memungkinkan pengguna untuk mengukur kinerja bisnis." "Kinerja bisnis dinilai dengan mengevaluasi kondisi keuangan masa lalu dan saat ini (Osadchy *et al.*, 2018)." "Salah satu pihak yang berkepentingan dengan Laporan Keuangan adalah lembaga keuangan atau bank." "Sebagai dasar pemberian pinjaman, mereka memerlukan Laporan Keuangan dari unit usaha untuk menilai profitabilitas usaha." "Komponen Laporan Keuangan tahunan biasanya berupa aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan biaya (IAI-SAK EMKM, 2018)." "Pengakuan bagian-bagian Laporan Keuangan adalah suatu proses dimana suatu pos/akun dibuat dalam neraca atau laporan laba-rugi yang sesuai dengan definisi bagian-bagian Laporan Keuangan (IAI-SAK EMKM, 2018)." "Pembuatan posisi/ akun ini adalah titik awal penyusunan Laporan Keuangan tahunan."

Teknologi informasi (TI) digunakan untuk menjalankan bisnis perusahaan (Wilkinson, 1991) dan adalah penghubung yang menghubungkan bisnis perusahaan dengan pemasoknya, bisnis perusahaan dengan pelanggannya, dan antara pemasok dan pelanggan." "Orang terkait adalah orang terkait karena rantai nilai." "Oleh karena itu, TI adalah penghubung dalam rantai nilai antara bisnis perusahaan, pemasok, dan pelanggan." "TI memicu sistem nilai." "Dengan demikian, sistem informasi komunitas dapat menjadi sistem informasi entitas lain, yang secara efektif menghasilkan persediaan modal." "Manajemen membutuhkan sistem informasi fungsional yang strategis." "Penerapan teknologi informasi (misalnya EDI) dalam SIA menjadikan SIA sebagai strategic information sistem (SIS) untuk duplikasi informasi." "Informasi duplikat dapat mempengaruhi semua organisasi yang menghasilkan hampir." "Informasi ini dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas internal dan eksternal." "Efek kembar pengetahuan telah menyebabkan perubahan besar dalam lingkungan manajemen dan akuntabilitas." "Sistem informasi ini

dapat dianalogikan dengan sistem sensor pemanas, kebakaran dan banjir yang terpasang di setiap rumah." "Untuk mengimplementasikan dualitas data, perangkat sensor mengamati dan menangkap sinyal kejadian dan memprosesnya secara real time."

11.2 Pembahasan

11.2.1 Sistem Akuntansi

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan adalah hasil dari rangkaian proses akuntansi yang memuat informasi mengenai informasi keuangan dan kinerja keuangan perusahaan." "Pemegang saham dan pihak luar lainnya mempercayai manajemen untuk menggunakan sumber daya yang mereka sediakan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka dilaporkan dalam bentuk Laporan Keuangan ." "Laporan Keuangan sangat penting bagi para pengguna Laporan Keuangan karena dengan bantuan Laporan Keuangan mereka mendapatkan informasi untuk mengambil keputusan dasar untuk mengetahui status keuangan dan kinerja manajemen."

Menurut Suwardjono (2010), Laporan Keuangan sebenarnya adalah pernyataan resmi yang harus dipertanggung jawabkan secara hukum." "Kesalahan atau ketidakjujuran dalam penyampaian akan menimbulkan akibat hukum bagi penyaji." "Apa yang dicantumkan dalam Laporan Keuangan dapat dijadikan dasar untuk menggugat moderator yang merasa tersinggung karena mempercayai dan menggunakan laporan tersebut." "Definisi Laporan Keuangan dapat dipahami sebagai keluaran dari suatu proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan informasi atau tindakan keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi atau operasi perusahaan."

Menurut Thomas (2013:35) menjelaskan pengertian Laporan Keuangan adalah hasil akhir dari siklus akuntansi, yang membuat gambaran keuangan perusahaan yang disusun secara teratur oleh manajemen." "Laporan Keuangan bersifat historis, yaitu." "mereka membuat angka tentang pendapatan dan posisi keuangan perusahaan di masa lalu (historis)."

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2015:2) Laporan Keuangan adalah bagian dari proses akuntansi." "Laporan Keuangan yang lengkap biasanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan dalam neraca (misalnya disajikan dengan cara yang berbeda, misalnya laporan arus kas atau laporan arus kas), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang adalah bagian yang tidak terpisahkan." "dari Laporan Keuangan."

Bentuk informasi yang disajikan oleh kantor akuntan adalah Laporan Keuangan ." "Laporan Keuangan ini dapat dilihat sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemangku kepentingan atas tindakan atau kinerja yang dicapai selama periode tertentu." "Laporan Keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas." "Laporan Keuangan harus disusun menurut prinsip, metode, Kebutuhan dan syarat tertentu yang harus dipenuhi, dengan memperhatikan keterkaitan antar Laporan Keuangan secara individual." "Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena Laporan Keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi dan objek kunci serta harus dijadikan pedoman manajemen akuntansi."

2. Pengertian Akuntansi

Menurut Fess (2016:10) Secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai "suatu sistem informasi yang menyusun laporan bagi pihak-pihak yang berkepentingan tentang kegiatan keuangan dan kondisi perusahaan."

"Akuntansi Menurut Horngren dan Horrison (2017:4) adalah "sistem informasi yang mengukur bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan"." *"American Accounting Association* di Soemarso (2018:5) mendefinisikan "akuntansi sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran dan pelaporan informasi keuangan yang memungkinkan pengguna informasi untuk membuat penilaian dan keputusan yang jelas dan konsisten."" "Definisi ini memiliki beberapa arti, yaitu:

- 1) Operasi Akuntansi Akuntansi ini adalah suatu proses yang terdiri dari pengidentifikasian, pengevaluasian dan pelaporan informasi keuangan."
- 2) Kegunaan akuntansi bahwa informasi keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan dapat bermanfaat dalam mengevaluasi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan entitas bisnis yang bersangkutan."

Tujuan utama akuntansi menurut Soemarso (2018:5) Penyajian informasi keuangan entitas keuangan kepada pihak yang berkepentingan." "Badan usaha adalah badan usaha (*business enterprise*)."

"Informasi keuangan yang dihasilkan oleh departemen akuntansi berguna bagi pihak-pihak baik di dalam maupun di luar perusahaan." "Untuk membuat informasi keuangan, perusahaan harus membuat metode untuk mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis dan mengelola transaksi dan kegiatan keuangan serta melaporkan hasilnya." "Kegiatan akuntansi terdiri dari:

- 1) Mengidentifikasi dan mengukur informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan." "
- 2) Pengolahan data yang relevan dan pelaporan data yang dihasilkan."

3) Meneruskan Informasi ke Pengguna Pelaporan."

3. Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen untuk menjalankan bisnis perusahaan (Mulyadi, 2018)." "Sistem akuntansi terdiri dari lima unsur utama, yaitu:

1) Formulir

Formulir adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat transaksi." "Formulir sering disebut sebagai dokumen karena formulir digunakan untuk mencatat (dokumen) di atas kertas peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam organisasi." "Contoh formulir adalah faktur penjualan, kwitansi pengembalian, cek dan lain-lain." "

2) Jurnal

Jurnal adalah catatan akuntansi utama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas informasi keuangan dan lainnya." "Contoh jurnal adalah jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan lain-lain."

3) Buku besar

Buku besar (GL) terdiri dari akun-akun yang digunakan untuk meringkas informasi keuangan yang sebelumnya dicatat dalam jurnal." "Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan elemen data yang disajikan dalam Laporan Keuangan."

4) Buku bantuan

Sub-buku besar terdiri dari sub-akun yang mencatat informasi keuangan dari akun-akun tertentu dalam buku besar umum." "Misalnya buku rekening anak

perusahaan yang berisi semua informasi tentang pelanggan."

5) Laporan

Hasil akhir dari proses akuntansi adalah Laporan Keuangan , yang dapat berupa laporan pendapatan, perubahan modal, laporan harga pokok penjualan, dan lain-lain."

Pengoperasian sistem akuntansi mencakup tiga fase:

- a. Harus mengetahui dokumen bukti transaksi yang digunakan oleh perusahaan mengenai jumlah fisik dan jumlah rupiah serta informasi penting lainnya yang terkait dengan transaksi bisnis."
- b. Informasi yang tercantum dalam sertifikat transaksi harus diklasifikasikan dan dicatat dalam akun." "
- c. Informasi yang terkandung dalam materi akuntansi harus disusun menjadi laporan bagi manajemen dan pemangku kepentingan lainnya

Akuntansi harus dirancang sedemikian rupa sehingga memenuhi Kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, dengan mempertimbangkan analisis keuntungan dan biaya-biaya dari perolehan data informasi tersebut." "Agar laporan yang disajikan oleh sistem akuntansi menjadi efektif, laporan tersebut harus tepat waktu, jelas, dan konsisten." "Laporan harus disajikan sesuai dengan kebutuhan pengguna sehingga mereka dapat mempergunakan data tersebut sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan." "Penerapan sistem akuntansi yang baik membutuhkan siklus akuntansi."

4. Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi bermanfaat untuk mengatur formulir, catatan, dan laporan dalam administrasi bisnis perusahaan." "Siklus akuntansi adalah tahapan proses dalam penyusunan Laporan Keuangan ." "Siklus akuntansi menggambarkan Prosedur penyelenggaraan akuntansi sesuai dengan peristiwa yang terjadi di perusahaan dan memberi makan akuntansi (Pura, 2013)."

Menurut Wijaya (2018), terdapat dua jenis kegiatan dalam siklus akuntansi." "Pertama, incident preparation (persiapan) dimana empat kegiatan dilakukan secara berurutan, yaitu identifikasi insiden, pengukuran, dokumentasi insiden sebagai bukti insiden, dan input jurnal insiden." "Kedua, pencatatan transaksi (pemesanan), yang mencakup kemampuan penjurnalan dan berbagi nilai."

Prosedur penyelenggaraan akuntansi adalah pencatatan, klasifikasi, rangkuman dan output yaitu pelaporan (Fitria, 2014)." "Siklus akuntansi juga merupakan prosedur akuntansi yang digunakan untuk mencatat semua transaksi dan diproses menjadi data dalam Laporan Keuangan

11.2.2 Metode Penyusunan Laporan Keuangan

Prosedur penyelenggaraan akuntansi terdiri dari pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan pelaporan (Fitria, 2014)." "Pencatatan akuntansi adalah suatu alat proses yang digunakan dalam melaksanakan aktivitas pencatatan semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan." "Setelah data transaksi keuangan perusahaan direkam sesuai dengan formulir, proses selanjutnya adalah pengolahan data informasi keuangan berupa tindakan pencatatan data tersebut dalam catatan akun akuntansi yang permanen (Mulyadi, 2018)." "Guna untuk melakukan proses pencatatan tersebut, terdapat 3(tiga) tahapan proses yang menjadi dasar pembukuan, (Weygandt, Kimmel, dan Kieso, 2018) yaitu:

- a. Tahapan Analisis terhadap akibat dari tiap transaksi dalam rekening atau akun pembukuan
- b. Mencatat dan merekam data informasi semua transaksi melalui jurnal."
- c. Penginputan data informasi kedalam jurnal ke rekening atau akun yang tepat dalam buku besar." "Rekening atau akun (*account*) adalah catatan akuntansi secara mandiri individual yang berisi penambahan dan pengurangan data aset, liabilitas atau ekuitas tertentu

Dalam catatan pembukuan akuntansi, transaksi ini dapat dikelompokkan berdasarkan klasifikasi yang akan dipergunakan dan bermanfaat sesuai rekening-rekening bersangkutan dalam buku besar (*general ledger*), selain itu juga terdapat buku besar pembantu (*subsidiary ledger*) yang berisi rincian rekening atau akun tertentu yang ada dalam buku besar." "Catatan pembukuan akuntansi tersebut terbagi atas:

a. Jurnal

Jurnal adalah suatu catatan pembukuan akuntansi yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan." "Tujuan Jurnal akan dipergunakan oleh perusahaan untuk analisis bukti-bukti transaksi dalam bentuk berbagai formulir, misalnya bukti kas masuk, bukti kas keluar, ataupun faktur dan invoice penjualan, dan diperuntukan menganalisa dampak yang akan terjadi terhadap pada akun tertentu." "Dalam jurnal selain transaksi dikelompokkan, transaksi juga dirangkum demi kepentingan pengadaan informasi keuangan dalam laporan keuangan." "Berbagai jenis jurnal dapat dipergunakan oleh Perusahaan, misalnya jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan bentuk jurnal yang paling pokok, yaitu jurnal umum (*general journal*)." "Jurnal memiliki kolom untuk tanggal, judul akun dan keterangan, referensi, dan dua

kolom jumlah transaksi (Weygandt, Kimmel, dan Kieso, 2018)." "

Beberapa kegunaan dan manfaat jurnal sebagai kegiatan pencatatan transaksi, yakni:

- 1) Jurnal bertujuan menyajikan keterangan akibat dari transaksi lengkap dalam satu tempat
- 2) Jurnal dipergunakan untuk membuat pencatatan transaksi secara kronologis."
- 3) Jurnal dapat membantu perusahaan untuk menghindari dan mencegah kesalahan dengan membandingkan jumlah debit atau kredit untuk setiap ayat jurnal."

Jurnal transaksi tersebut harus diisi secara benar, jelas dan lengkap agar setiap pencatatan transaksi tersebut mudah diusut kembali ke dalam dokumen sumbernya bila terjadi kesalahan(Mulyadi, 2018)."

b. Buku Besar

Buku besar adalah bagian dari catatan akuntansi pada pokoknya berisi ringkasan data yang sudah diklasifikasikan, yang berasal dari jurnal." "Keseluruhan akun yang dimiliki perusahaan disebut buku besar (*ledger*)." "Dalam buku besar terdapat semua data informasi tentang mutasi atau perubahan transaksi di tiap-tiap saldo akun." "Proses pemindahan data informasi dari ayat jurnal keakun buku besar disebut pemindahbukuan (*posting*)." "Pemindahbukuan (*posting*) terdiri dari beberapa tahapan proses berikut:

- 1) Setiap Akun dalam buku besar pada akun debit
 - a) "masukkan data jurnal ke akun yang didebet dalam kolom yang tepat terdiri dari tanggal transaksi, halaman jurnal dan jumlah debit misalnya yang ditunjukkan oleh jurnal."
 - b) 'Pada kolom referensi jurnal, tuliskan nomor akun yang akan dibukukan jumlah debetnya ."

- 2) Setiap akun dalam buku besar pada akun kredit
- a) "masukkan pada akun yang dikredit dalam kolom yang tepat terdiri dari tanggal transaksi, halaman jurnal dan jumlah kredit misalnya yang ditunjukkan oleh jurnal."
 - b) "Pada kolom referensi jurnal, tuliskan nomor akun yang akan dibukukan jumlah kreditnya (Weygandt, Kimmel, dan Kieso, 2018)."

Semua Kode dan jenis akun berbeda-beda untuk setiap perusahaan." "Jumlah akun dalam pembukuan tergantung seberapa detail data informasi yang diinginkan oleh perusahaan." "Perusahaan dapat membuat, mengubah dan menambah daftar akun (*chart of account*)

c. Buku Pembantu

Buku pembantu adalah cabang atau perluasan lebih lanjut rekening/akun tertentu dari buku besar, tujuan adalah untuk memudahkan dan mempercepat penyusunan laporan keuangan." "Akun atau rekening buku besar terdapat data informasi yang secara rinci dalam buku besar disebut rekening control (*controlling account*), sedangkan rekening-rekening rincian yang terdapat dalam buku pembantu disebut rekening pembantu (*subsidiary account*)."

"Beberapa buku pembantu, contohnya buku pembantu piutang, utang, aktiva tetap, persediaan (kartu persediaan) dan biaya (kartu aktiva tetap)."

"Menurut Mulyadi (2013), pemindahbukuan (posting) jurnal kedalam buku besar dan buku pembantu dapat dilakukan sesuai dengan salah satu aturan dan cara dari 4 metode berikut:

- 1) Pemindahbukuan (Posting) jurnal ke dalam rekening buku besar dengan tulisan tangan dan Pemindahbukuan (Posting) dokumen sumber ke

dalam rekening buku pembantu dengan cara yang sama."

- 2) Pemindahbukuan (Posting) dokumen sumber ke dalam rekening buku pembantu yang menghasilkan jurnal sebagai tembusan Pemindahbukuan (Posting) ke dalam rekening tersebut
- 3) Pemindahbukuan (Posting) ke dalam buku pembantu sebagai akibat dari pengisian dokumen sumber, yang sekaligus menghasilkan jurnal sebagai tembusan pengisian bukti tersebut
- 4) Pembukuan tanpa buku pembantu (ledgerless bookkeeping)

11.2.3 Laporan Keuangan

Setelah proses akuntansi, proses berikutnya adalah tahapan penyusunan, penyajian dan pengadaan Laporan Keuangan tahunan." "Untuk mempermudah penyusunan Laporan Keuangan, semua data informasi yang dicatat dalam buku besar dimasukkan dan dirangkum ke dalam laporan neraca dan laporan laba-rugi." "Neraca saldo termasuk cakupan akun dan saldo pada waktu tertentu." "Neraca saldo dipersiapkan pada akhir periode pembukuan akuntansi." "Neraca saldo mencantumkan akun-akun sesuai urutan kemunculannya di buku besar." "Saldo debit muncul di kolom kiri dan saldo kredit di kolom kanan." "Jumlah kedua kolom tersebut harus sama (Kieso *et al.*, 2017)."

Dalam proses pencatatan, Perusahaan akan membuat ayat jurnal penyesuaian untuk mengakui pendapatan pada periode saat perusahaan memperoleh pendapatan dan mengakui biaya pada periode saat biaya tersebut terjadi." "Jurnal penyesuaian juga dipergunakan oleh perusahaan untuk melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas yang benar pada laporan keuangan terbagi atas neraca pada tanggal periode

neraca, pendapatan dan biaya yang benar terjadi di laporan laba-rugi untuk periode tersebut." "Setelah semua jurnal penyesuaian dimasukkan dan dicatat, perusahaan menyiapkan neraca saldo yang disesuaikan." "

Neraca saldo yang disesuaikan dapat menampilkan pengaruh dari semua peristiwa keuangan yang terjadi selama periode akuntansi." "Hasil Neraca saldo tersebut akan dipergunakan Perusahaan menyusun Laporan Keuangan berupa neraca." "Laporan Keuangan adalah penyajian terstruktur dari kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan (Diana dan Setiawati, 2017)." "Laporan Keuangan juga merupakan sarana utama untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak di luar perusahaan dan menggambarkan sejarah kegiatan perusahaan dalam satuan moneter (Kieso *et al.*, 2017)."

Saat menyiapkan Laporan Keuangan, perusahaan harus menggunakan prinsip panduan dengan konsep unit bisnis." "Unit-unit tersebut dipisahkan dengan jelas kepemilikan dan transaksi dari masing-masing perusahaan sehingga transaksi pemilik dipisahkan dari transaksi umum (IAI-SAK EMKM, 2018)." "Dari perspektif ini, perusahaan dipandang sebagai entitas yang terpisah dan terpisah dari pemiliknya (Kieso *et al.*, 2017)." "Kebutuhan akan pelaporan keuangan bermula dari konsep unit bisnis ini." "Neraca berisi data informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada titik waktu tertentu." "Laporan laba-rugi berisi informasi tentang hasil kegiatan keuangan perusahaan, yang terdiri dari pendapatan dan biaya pada periode pelaporan." "Apendiks Laporan Keuangan tahunan berisi tambahan dan informasi tentang sejumlah item utama." "Oleh karena itu, unsur-unsur Laporan Keuangan harus dapat membuat laporan secara akurat informasi akuntansi dari fenomena yang disajikan."

11.2.4 Unsur-Unsur Penyusun Laporan Keuangan

Secara umum Laporan Keuangan terdiri dari laporan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan biaya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018)." "Bagian dari Akuntansi yang dikenal sebagai Laporan Keuangan adalah proses membuat input transaksi ke dalam daftar akun di neraca atau laporan laba rugi." "Akun atau rekening tersebut harus memenuhi definisi unsur akuntansi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018)." "Membuat akun tersebut merupakan titik awal untuk membuat Laporan Keuangan ." "Menurut standar akuntansi entitas ekonomi mikro, kecil dan menengah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018), bagian-bagian akuntansi terdiri atas:

a. Aset

Sumber daya berupa harta yang dimiliki entitas (ekonomi) sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana entitas (ekonomi) akan menerima manfaat ekonomi di masa depan." "

b. Kewajiban (obligations)

Kewajiban yang ada pada unit (ekonomi) yang timbul dari peristiwa masa lalu dan pemenuhannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mewakili manfaat ekonomi dari unit (ekonomi) yang bertambah." "

c. Ekuitas

Sisa kekayaan (modal) entitas setelah dikurangi seluruh kewajiban

d. Penghasilan

Peningkatan manfaat keuangan yang berlawanan yang terkait dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban."

e. Beban

Pengurangan manfaat keuangan yang berlawanan yang terkait dengan penurunan aset atau pengurangan aset atau peningkatan kewajiban."

Objek dari Laporan Keuangan mencerminkan sumber daya dari komunitas tertentu, tuntutan atas sumber daya tersebut, efek dari transaksi dan kejadian transaksi lain serta keadaan lain yang mengubah dapat sumber daya dan permintaan tersebut." "Oleh karena itu, unsur-unsur Laporan Keuangan harus dapat digunakan untuk membuat laporan secara akurat tentang informasi akuntansi dari kegiatan transaksi yang akan disajikan." "Perlakuan akuntansi yang dimaksud dalam poin ini mengacu pada pelaporan, evaluasi dan penyajian pos-pos laporan akuntansi tahunan termasuk aset, kewajiban atau utang, ekuitas, pendapatan dan biaya-biaya." "Ada 3 asumsi dasar yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan yaitu:

a. Dasar akrual

Perusahaan menyusun akunnya berdasarkan dasar akrual, dimana entitas mencatat aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan biaya ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk setiap item tersebut." "Pembukuan perusahaan tidak lagi menggunakan asumsi kas, yang mana transaksi bisnis dicatat berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas, tetapi transaksi dicatat pada saat terjadinya." "Secara akrual, perusahaan juga dapat memperoleh informasi kewajiban dan Kebutuhan yang terkait dengan transaksi pembelian dan penjualan." "

b. Kesiambungan usaha

Perusahaan akan menjalankan kegiatan usahanya tanpa batas waktu sampai saat perusahaan bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya, atau bisnis perusahaan tersebut telah berhenti." "Jika entitas (ekonomi) tidak menyusun Laporan Keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, entitas (ekonomi) harus memberi keterangan fakta yang

menyebabkan entitas (ekonomi) tidak memiliki dasar untuk kelangsungan usaha." "

c. Konsep entitas bisnis

Perusahaan adalah entitas yang mandiri, terlepas dari pemiliknya." "Transaksi yang berhubungan dengan perusahaan harus dibedakan dengan transaksi dengan pemilik perusahaan."

Untuk mendesain Laporan Keuangan Perusahaan maka

1. Perusahaan menyusun ikhtisar kebijakan akuntansi." "
2. Perusahaan menyusun daftar akun dan penjelasannya."
3. Perusahaan merancang bukti transaksi." "
4. Perusahaan menyusun siklus akuntansi."
5. Perusahaan menyusun catatan akuntansi." "Keenam, menyusun Laporan Keuangan ."

11.2.5 Komputerisasi Sistem Akuntansi

Komputerisasi akuntansi adalah proses pengolahan informasi dari manual menjadi otomatis dengan menggunakan lingkungan komputer." "Komputer akuntansi ini juga adalah alat yang memfasilitasi kehidupan bisnis yang efisien dan efektif." "Komputerisasi akuntansi juga adalah perangkat lunak sistem untuk mencatat, merekam, dan menganalisis data keuangan suatu perusahaan." "Komputer digunakan sebagai alat teknis yang menjalankan sistem akuntansi." "Mulai dari melakukan transaksi hingga menyiapkan rekening tahunan perusahaan." "Laporan akuntansi dalam sistem komputerisasi dapat menghilangkan resiko kesalahan yang dapat terjadi pada sistem manual." "Manfaat sistem akuntansi perusahaan juga dapat dilihat pada peningkatan kualitas kerja." "Itulah sebabnya akuntansi terkomputerisasi dianggap sebagai sistem canggih yang membuat bisnis lebih efisien dan menguntungkan." "

Berbagai pihak, terutama manajemen baik pengurus maupun pemilik perusahaan memerlukan informasi akuntansi dan laporan keuangan untuk mengambil keputusan bisnis." "Selain manajemen perusahaan, beberapa pihak di luar perusahaan juga membutuhkan informasi keuangan, misalnya calon investor, perbankan, kreditur, otoritas pajak dan masyarakat, sehingga informasi akuntansi tersebut diperlukan suatu sistem yang dapat memproses pembukuan akuntansi dan informasi untuk Laporan Keuangan ." "Pada dasarnya siklus akuntansi SIA terkomputerisasi sama dengan SIA manual, artinya kegiatan yang harus dilakukan untuk menyusun Laporan Keuangan tidak bertambah atau berkurang." "SIA terkomputerisasi hanya mengubah sifat operasi." "Model komputer berbasis biaya historis tidak cukup untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan di era teknologi informasi (Elliot dan Jacobson, Gani, 1999)." "Model komputer era teknologi informasi memerlukan model komputer untuk mengukur kecepatan perubahan sumber daya, tingkat perubahan proses, pengukuran aset tidak berwujud, fokus eksternal pada nilai pelanggan, pengukuran proses secara real time, dan penciptaan, jaringan." "Perubahan dan perkembangan dalam proses akuntansi mempengaruhi proses audit, karena audit adalah cabang ekonomi yang menggunakan Laporan Keuangan yang merupakan produk akuntansi sebagai tujuannya." "Tujuan dari audit eksternal adalah untuk membuat pendapat atas penyajian yang benar dari Laporan Keuangan tahunan." "

Informasi yang dihasilkan dari SIA adalah informasi akuntansi yang dapat berupa informasi operasional (IO), informasi akuntansi manajemen (IAM) dan informasi akuntansi keuangan (IAK)." "Perbedaannya terletak pada proses informasi operasional (IO) yang didedikasikan untuk penyusunan laporan yang mencerminkan kegiatan

perusahaan." "Kegiatan tersebut terbagi atas kegiatan utama perusahaan dan kegiatan lain yang berlangsung di perusahaan." "Kegiatan utama biasanya adalah data informasi yang diperoleh, dipemrosesan atau pengolahan dan penjualan yang diperoleh dari pengolahan sebelumnya." "Fungsi lain mungkin termasuk akuntansi, administrasi dan operasi umum, dll." "

Informasi Laporan Keuangan adalah informasi umum yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP)." "Informasi ini bersifat umum karena ditujukan untuk pihak internal dan eksternal." "IAC disajikan dengan asumsi bahwa kebutuhan informasi investor, kreditur, calon investor dan kreditur, manajemen, pemerintah, dll dapat memenuhi kebutuhan informasi non-investor dan kreditur." "Oleh karena itu, diperlukan informasi yang seragam bagi semua pihak yang berkepentingan dengan kegiatan perusahaan." "Pada umumnya IAK disusun dan dilaporkan secara berkala, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan manajemen akan informasi yang tepat waktu." "Selain itu, IAK disajikan dalam bentuk yang terlalu kaku, sehingga tidak dapat mengisi informasi yang dibutuhkan oleh administrasi."

Pemodelan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berbasis Data

Penyimpanan akuntansi dalam database sistem berbasis komputer disajikan dalam empat jenis file yang beredar, yaitu : file induk, file transaksi, file referensi, dan file arsip."

1. File Induk,

secara umum file induk berisi data-data akun antara lain berupa buku besar dan buku besar pembantu." "Nilai data-data dalam file induk diperbaharui berdasarkan data transaksi."

2. File Transaksi,
file sementara yang menyimpan record transaksi yang akan digunakan untuk mengubah atau memperbaharui data dalam file induk." "Pesanan penjualan, penerimaan persediaan, dan penerimaan kas adalah contoh dari file transaksi."
3. File Referensi,
Dipergunakan untuk menyimpan data yang digunakan sebagai standar untuk memproses transaksi." "Contohnya program pembayaran gaji dapat merujuk ke tabel pajak." "File referensi lainnya terdiri dari daftar harga untuk faktur pelanggan, daftar pemasok yang diotorisasi, daftar nama pegawai, dan file kredit pelanggan untuk penjualan kredit."
4. File Arsip,
Berisi data-data tentang transaksi masa lalu yang dipertahankan dan disimpan untuk referensi akan datang." "Bentuk transaksi ini merupakan bagan yang penting dari jejak audit." "File arsip terdiri dari jurnal-jurnal, informasi pembayaran gaji periode sebelumnya, daftar nama pegawai sebelumnya, record tentang akun yang dihapus dan buku besar periode sebelumnya."

Perusahaan yang menggunakan buku besar untuk Laporan Keuangan dilakukan sesuai dengan sistem urutan kumpulan file untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mempergunakan tingkat keamanan yang tinggi." "Sistem informasi Akuntansi harus mudah digunakan, dan dapat mengontrol akses ke buku besar dengan mudah." "Buku besar juga dapat digunakan untuk mendukung fungsi yang lebih luas dalam suatu organisasi, sistem yang menggunakan pemrosesan waktu nyata dan akses langsung ke file sangat dibutuhkan dalam sistem informasi akuntansi." "Proses

komputerisasi ini merancang dari metode tradisional akuntansi umum menjadi metode otomatis sehingga dalam metode ini memerlukan perencanaan teknologi menggunakan perangkat lunak terkomputerisasi."

Akuntan dan profesional keuangan dan akuntansi harus menguasai teknik dokumentasi untuk merancang dan mendukung audit sistem." "Auditor secara teratur menggunakan sistem dokumentasi." "Oleh karena itu, kemampuan untuk mendokumentasikan sistem secara grafis adalah keterampilan penting yang harus dikuasai auditor." "Ada enam teknik dasar dokumentasi, antara lain:

Diagram hubungan entitas (REA), diagram aliran data (DDD), diagram aliran dokumen, diagram aliran sistem, diagram aliran program, dan diagram aliran data." "Hall dan Singleton (2007) mengatakan bahwa kontrol aplikasi adalah inisiatif terprogram yang dirancang untuk mengatasi berbagai potensi kompromi yang mengancam aplikasi tertentu misalnya sistem penggajian, pembelian, dan pembayaran tunai." "Jenis kontrol ini jatuh ke dalam tiga kategori umum, yaitu kontrol input, kontrol pemrosesan, dan kontrol output." "Tujuan pengelolaan aplikasi PDE adalah:

Tetapkan prosedur kontrol khusus untuk aplikasi akuntansi dan berikan jaminan yang wajar bahwa semua transaksi telah diotorisasi sepenuhnya dan dicatat serta diproses secara tepat waktu."

Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi

Model umum sebuah sistem informasi akuntansi terdiri dari input, proses, dan output." "Model umum tersebut merupakan konsep sistem yang sederhana, hal ini disebabkan sebuah sistem dapat mempunyai beberapa masukan dan keluaran." "Disamping itu, suatu sistem juga mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, antara lain:

- a. *Component* (Komponen Sistem),
Suatu sistem yang terdiri dari sejumlah bagian-bagian yang saling berinteraksi dan saling bekerja sama untuk membuat suatu bagian-bagian lain dari sistem."
- b. *Boundary* (Batasan Sistem),
Batasan daerah yang membatasi suatu sistem dengan sistem yg lain atau lingkungan kerja lainnya
- c. Subsistem,
Bagian-bagian lebih kecil dari sistem yang berasal sistem informasi yang sedang beraktifitas dan berinteraksi satu dengan sistem lain untuk mencapai tujuan yang menjadi sasaran masing-masing sistem."
- d. *Environment* (Lingkungan Luar Sistem),
Lingkungan suatu sistem yang ada pada luar sistem tersebut dan terdapat batas sistem yg ditentukan operasi sistem."
- e. *Interface* (Penghubung Sistem),
Media penghubung antara suatu subsistem dengan subsistem lain." "Dengan adanya penghubung ini maka sistem memungkinkan adanya aneka macam sumber daya yang mengalir dari suatu subsitem ke subsistem lainnya."
- f. Masukan Sistem (Input),
Data yg masuk ke dalam sistem, agar sistem tersebut dapat berinteraksi."
- g. Keluaran Sistem (*output*),
akibat data informasi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yg berguna dan terdapat residu data proses yang tidak terpakai."
- h. Pengolahan Sistem (*Process*),
suatu sistem bisa memiliki suatu bagian pengolah yang akan mengganti masukan menjadi keluaran."

- i. target Sistem (*Object*),

Target atau tujuan yang ingin dicapai Sistem, dan akan dikatakan berhasil bila tentang sasaran atau tujuan sudah sesuai dengan apa yang diinginkan." "(Hanif Al Fatta,2007)

11.3 Kesimpulan

Sistem aplikasi komputer adalah aplikasi yang dikembangkan untuk memenuhi Kebutuhan Perusahaan untuk memperoleh informasi dan pemrosesan data." "Perkembangan perusahaan akan meningkatkan permintaan akan data dan informasi." "Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sistem aplikasi yang dikembangkan perlu dipelihara." "Sistem akuntansi perusahaan dapat didukung oleh sistem aplikasi komputer, sehingga memudahkan sistem untuk beroperasi dan mencapai tujuannya." "Melalui seperangkat prosedur kerja tertentu yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dijalankan untuk mengolah data menjadi suatu bentuk informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, perpaduan kedua sistem tersebut akan menghasilkan "Sistem Informasi" "yang sangat berguna bagi suatu perusahaan."

Perusahaan menggunakan sistem akuntansi untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi terbagi dalam unit-unit bisnis." "Sistem akuntansi juga bertanggung jawab atas pelaporan atas aset dan kewajiban yang terkait dengan transaksi sehingga Perusahaan dapat yakin bahwa mereka telah dicatat." "lengkap, valid, dinilai dengan tepat, diotorisasi dengan tepat, diklasifikasikan dengan tepat, dimasukkan dengan tepat ke dalam buku besar, dan diikhtisarkan dengan tepat untuk memastikan disajikan dan diungkapkan secara memadai dalam Laporan Keuangan ."

Laporan Keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas Laporan Keuangan disusun dan disajikan dengan menggunakan metode SAK ETAP yang dimulai dengan pengumpulan bukti transaksi, analisis transaksi, mencatat transaksi dalam bentuk jurnal, memposting ke buku besar, membuat neraca saldo, menyesuaikan ayat jurnal, dan menyusun neraca saldo setelah disesuaikan." "Proses penyusunan sistem manual dalam proses yang hanya menggunakan sistem aplikasi komputer atau perangkat lunak identik dengan metode penggunaan perangkat lunak di semua siklus akuntansi (transaksi hingga neraca saldo setelah penutupan)."

DAFTAR PUSTAKA

- Didin Fatihudin, Jusni and Mochamad Mochklas." "2018." "How Measuring Financial Performance." "International Journal of Civil Engineering and Technology, 9 (6), 553–557."
- Elvira, Jessica Gita." "2018." "Analisis Penerapan Aplikasi Akuntansi Berbasis Android SI APIK Utuk Memenuhi Kebutuhan Sistem Informasi Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah(Studi Kasus di GR Souvenir Pundong, Bantul, Yogyakarta)." "Jurusan Akuntansi." "Universitas Sanata Dharma.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)." "2009." "Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas publik (SAK ETAP)." "Jakarta :Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2012." "Standar Akuntansi Keuangan." "PSAK." "Cetakan Keempat, Buku Satu, Jakarta : Penerbit Salemba Empat, Jakarta." "Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)." "2016." "Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah." "Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan."
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)." "2018." "Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM)."
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)." "2018." "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no." "69
- Karte, Cyprianus." "2017." "Analisis Pemilihan Aplikasi Akuntansi Berbasis Android." "Jurusan Akuntansi." "Universitas Sanata Dharma

- Thalassinos, I." "E." "and Liapis, K." "2014." "Segmental financial reporting and the internationalization of the banking sector." "Chapter book in, Risk Management: Strategies for Economic Development and Challenges in the Financial Sistem, (eds), D." "Milos Sprcic, Nova Publishers, 221-255
- Ankarath, N.", K." "J." "Mehta, T." "P." "Ghosh and Y." "A." "Alkafaji." "2015." "Memahami IFRS: Standar Pelaporan Keuangan Internasional." "Jakarta: Indeks." "Azim, Md." "and J." "Ara." "2015." "Accountability of Accounting Stakeholders." "Global Journal of Management and Business Research,15 (2), 4-10."
- Bank Indonesia dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia." "2015." "Profil Bisnis perusahaan UMKM." "LPPI bekerja sama dengan Bank Indonesia."
- Diana, A." "dan L." "Setiawati." "2017." "Akuntansi Keuangan Menengah Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Terbaru." "Yogyakarta: Andi."
- Fitria, D." "2014." "Buku Pintar Akuntansi Untuk Orang Awam & Pemula." "Jakarta Timur: Laskar Aksara."
- Hapsari, K." "R.", A." "W." "Azinar dan Sugiyanto." "2016." "Perancangan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan perusahaan UMKM Berbasis Sistem Informasi." "Prosiding Seminar Nasional Teknologi Terapan (SNTT) SV UGM." "<http://www.researchgate.net/publication/316682385>."
- Hasanaj, P and B." "Kuqi." "2019." "Analysis of Financial Statements: The Importance of Financial Indicators in Enterprise." "Humanities and Social Science Research, 2 (2), 17-27."
- Kieso, D." "E.", J." "J." "Weygandt dan T." "D." "Warfield." "2017." "Akuntansi Keuangan Menengah Edisi IFRS." "Volume 1." "Jakarta: Salemba Empat."

- Krismiaji." "2015." "Sistem Informasi Akuntansi." "Yogyakarta: UPP STIM YKPN."
- Lepădatu, G." "V." "and M." "Pîrnău." "2009." "Transparency in Financial Statements (IAS/IFRS)." "European Research Studies, XII (1), 101-108."
- Miles, M." "B." "dan A." "M." "Huberman." "1992." "Analisis Data Kualitatif." "Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi." "Jakarta: UI-Press." "Moleong, L." "J." "2010." "Metode Penelitian Kualitatif." "Bandung: Pustaka Setia."
- Mulyadi." "2018." "Sistem Akuntansi." "Edisi 4." "Jakarta: Salemba Empat."

BIODATA PENULIS



Renika Hasibuan, S.E.,M.Si

Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (FEIS)
Universitas Sari Mutiara Indonesia, dan menjabat sebagai Ketua
Program Studi Akuntansi

Renika Hasibuan, S.E.,M.Si adalah Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (FEIS) Universitas Sari Mutiara Indonesia, dan menjabat sebagai Ketua Program Studi Akuntansi. Lahir dari Desa Lumbanrau, 29 Agustus 1985. Mengampu mata kuliah Pengantar Akuntansi, Akuntansi Keuangan Menengah, Akuntansi Keuangan Lanjutan, Praktikum Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Perpajakan. Aktif di berbagai penelitian dan pengabdian masyarakat. Selain aktif menjadi dosen, Alumni S-1 Akuntansi Universitas Darma Agung (lulus 2009) dan S-2 di Universitas Sumatera Utara (lulus 2013) ini juga menjadi konsultan accounting di STTBM sampai sekarang, sebelumnya Ibu dari dua anak ini juga pernah berkarir sebagai Auditor di Kreston Internasional, dan merintis bisnis jual beli perabot dengan nama Tania Perabot. E-mail : renikahasibuan2016@gmail.com.

BIODATA PENULIS



Richad Alamsyah SE.,M.Ak.,CSA®,CRMO®,CFP®,CRMP®,AAAIK

Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis
Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan

Penulis lahir di Bogor pada tanggal 03 Desember 1991. Penulis merupakan dosen tetap di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor Program Studi Akuntansi. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S2 di Magister Akuntansi Universitas Pancasila. Penulis juga telah menyelesaikan beberapa sertifikasi profesi antara lain: sertifikasi profesi pasar modal, manajemen risiko, ahli asuransi kerugian dan perencanaan keuangan

BIODATA PENULIS



Dr. Dra. Nurchayati, SE, MSi, Ak

Staf Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan
Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Penulis lahir di Semarang tanggal 14 Januari 1963. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen tahun 1987, S2 Akuntansi tahun 2002 dan Program Pendidikan Profesi Akuntan tahun 2013 pada Universitas Diponegoro Semarang, S1 Akuntansi pada Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan S3 Manajemen tahun 2021 pada Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Penulis menekuni bidang Akuntansi dan Manajemen Keuangan.

BIODATA PENULIS



Parju

Dosen tetap Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNTAG Semarang

Penulis lahir di Sragen Tanggal 21 Oktober 1963. Penulis adalah dosen tetap Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNTAG Semarang. Menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen di UNTAG Semarang tahun 1989, S1 Akuntansi di UNTAG Semarang tahun 2002 dan S2 Manajemen Keuangan Di Universitas Hasanudin Tahun 1998

BIODATA PENULIS



Nita Andriyani Budiman, S.E., M.Si, Ak, BKP, CA
Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus

Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Menyelesaikan pendidikan S1, S2, dan Pendidikan Profesi Akuntansi di STIE YKPN Yogyakarta. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah diberbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu.
Email: nita.andriyani@umk.ac.id

BIODATA PENULIS



Dra. Rr. Suprantiningrum, S.E., M.Si.

Dosen tetap di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Program
Studi Akuntansi

Penulis lahir di Semarang pada tahun 1965. Penulis merupakan dosen tetap di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Program Studi Akuntansi. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen dan Akuntansi di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang di S2 di Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.

BIODATA PENULIS



Novia Rizki, S.E., M. Ak., Ak., CA

Dosen Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Penulis lahir di Selong tanggal 13 November 1993. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi di Universitas Mataram dan melanjutkan Pendidikan Profesi Akuntansi sekaligus Magister Akuntansi di Universitas Indonesia. Penulis menekuni bidang akuntansi keuangan, akuntansi biaya, dan audit.

BIODATA PENULIS



Yenny Wati, S.E., M.Ak., ACPA
Staf Dosen Jurusan Akuntansi

Yenny Wati adalah dosen di Fakultas Bisnis, Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Penulis menyelesaikan pendidikan Diploma 3 Akuntansi di Politeknik Caltex Riau, S-1 Akuntansi di Universitas Riau dan S-2 Magister Akuntansi di Program Pascasarjana Universitas Riau. Penulis juga aktif memublikasikan hasil penelitiannya di berbagai seminar dan jurnal baik nasional maupun internasional.

BIODATA PENULIS



Paradisa Sukma, S.E., M.A.

Dosen Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Penulis lahir di Mataram tanggal 24 Maret 1995. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi dan melanjutkan S2 pada Jurusan Akuntansi. Penulis menekuni bidang akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan pasar modal.

BIODATA PENULIS



Daniel Kartika Adhi, SE, M.Si

Dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara (STIE PENA) Program Studi Akuntansi

Lahir di Semarang tanggal 26 Oktober 1967. Penulis merupakan dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara (STIE PENA) Program Studi Akuntansi. Lulus Magister Akuntansi (S2) STIE Dharma Putra Semarang. Disamping sebagai staf pengajar, penulis juga sebagai auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Sophian Wongsargo Semarang. Pengalaman penulis lain adalah sebagai instruktur Bimtek APBD, TUKD, Penilaian Barang Milik Daerah, Penyusunan Sisdur Keuda, di berbagai Pemda mulai tahun 2006-2012.

BIODATA PENULIS



Men Wih Widiatno, S."H.", S."Kom.", M."M.", M."Kn

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

Penulis lahir di Pontianak tanggal 09 Agustus 1972, Penulis menyelesaikan pendidikan formal program studi S1 Teknik Informatika di Universitas Bina Nusantara, S1 Hukum di Universitas Esa Unggul, S2 Magister Management di Universitas Esa Unggul dan S2 Kenotariatan di Universitas Indonesia, dan sekarang sedang menempuh pendidikan S3 Ilmu Hukum di Universitas Tarumanagara." "Sekarang profesi penulisa adalah Konsultan Pajak , Notaris, PPAT dan dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul." "